



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TAMAN
WISATA ALAM BUKIT KELAM DALAM RANGKA
PELESTARIAN LINGKUNGAN
(Studi di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten
Sintang Kalimantan Barat)**

DISERTASI

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR DOKTOR**

Oleh :

**MARTINUS SYAMSUDIN
NIM.157150100111006**

**PROGRAM DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG 2018**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelestarian lingkungan mempunyai peran penting dalam keberlanjutan ekosistem. Purnaweni (2014) bahwa "Pengelolaan lingkungan bertujuan agar terciptanya keberlanjutan pembangunan dengan azas keterpaduan antara berbagai *stakeholders*, yakni mencakup indikator *Planning*, *Organizing*, dan *Actuating*. Pembangunan berkelanjutan diperlukan suatu perencanaan yang jelas, organisasi pelaksana memiliki sikap tegas mengaktualisasi suatu konsep pembangunan yang strategis".

Pendapat Octastefani dan Kusuma (2015) bahwa "meningkatkan pembangunan daerah melalui pengembangan obyek wisata terbagi menjadi empat indikator, yaitu: *entrepreneur*, *koordinator*, *fasilitator*, dan *stimulator*". Serta Pratiwi (2015) bahwa "dalam pengembangan kepariwisataan yang ramah terhadap lingkungan terdapat tiga indikator yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yaitu sebagai koordinator, fasilitator dan stimulator".

Tojeiro (2011) menyatakan bahwa "salah satu kontribusi utama perubahan isu lingkungan adalah fakta bahwa masyarakat membutuhkan organisasi dan kepemimpinan politik yang lebih bersikap memadai dan bertanggungjawab; dinyatakan secara konkret sebagai pandangan pembangunan yang efisiensi ekonomi, keadilan sosial dan harmoni ekologi secara terpadu dan tidak terpisahkan".

Rencana strategis pemerintah dalam pembangunan khususnya pembangunan kepariwisataan sudah tertuang pada kebijakan pemerintah.

Pengembangan kepariwisataan haruslah menganut konsep ramah lingkungan dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Konsep kepariwisataan berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang



Kepariwisataan, tetapi kenyataan bahwa berbagai isu keberlanjutan telah mengindikasikan adanya kesadaran tentang konsep berkelanjutan, yang beraspek multidimensi yakni ramah lingkungan, secara ekonomi dapat memberi manfaat, secara sosial budaya dapat diterima, dan menempatkan masyarakat sebagai subjek inti dalam pembangunan. Mengelola dan mengembangkan suatu objek wisata pemerintah harus mampu mempertahankan kondisi keaslian sekitar kawasan baik kondisi sosial budaya ataupun keaslian keanekaragaman hayati di kawasan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa pemerintah mempunyai kewenangan dalam hal: a).Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan; b).Mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah; c).Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha industri pariwisata; d).Menetapkan destinasi pariwisata; e). Menetapkan daya tarik objek wisata; f). Memfasilitasi promosi pariwisata dan produk pariwisata.

Ceballos-Lascurain (1996) bahwa "wisata alam merupakan salah satu jenis rekreasi dengan mengadakan kegiatan perjalanan atau sebagian kegiatan tersebut bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam melalui terminologi *ecoturisme*". Kegiatan wisata alam pada umumnya disediakan di *lanskap* alami seperti taman wisata alam oleh Perusahaan Pariwisata Alam (PPA) yang diawasi dan diarahkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Penyelenggaraan kepariwisataan secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nizar (2014) menyatakan dampak dari peningkatan devisa pariwisata sebagai berikut. (i) pertumbuhan pariwisata (devisa pariwisata dan jumlah turis) dan nilai tukar memiliki hubungan kausalitas timbal balik, (ii) dampak dari peningkatan devisa pariwisata akan meningkatkan (apresiasi) kurs rupiah, sedangkan kenaikan jumlah wisatawan akan meningkatkan (apresiasi) nilai tukar



rupiah; (iii) apresiasi (depresiasi) rupiah akan mendorong peningkatan (penurunan) devisa pariwisata dan jumlah turis dalam waktu yang berbeda; (iv) ada hubungan positif dan pengaruh timbal balik antara jumlah turis dan devisa pariwisata.

Scheyvens (1999) bahwa "Usaha Ekowisata harus berdampak pada lingkungan kehidupan masyarakat sekitar". Dari perspektif pembangunan, usaha ekowisata dianggap berhasil jika masyarakat setempat menerima manfaat dari munculnya kegiatan ekowisata. Oleh karena itu pemberdayaan sangat dianjurkan dengan membuat analisis dampak sosial, psikologi dan politik ekowisata pada masyarakat setempat

Jing Li (2013) bahwa "Pengembangan ekowisata harus mampu mencapai keseimbangan antara pemangku kepentingan yang berbeda dan kepentingan-kepentingan oleh para *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata bertujuan untuk mencapai hasil yang dapat diterima dalam masyarakat luas". Melibatkan anggota masyarakat disemua tingkatan partisipasi mungkin juga membantu mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang pengembangan pariwisata, dengan prinsip-prinsip praktis pendekatan menggabungkan ini akan membawa manfaat antara ekowisata dan masyarakat lokal. Pengembangan pembangunan ekowisata berkelanjutan secara terpadu sangatlah penting untuk menilai keberlanjutan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan.

Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, bahwa RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan tahapan ketiga pembangunan jangka panjang, yaitu tahap pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian dari sektor industri pengolahan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat demi terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dan merata. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,



tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Sintang, maka Visi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2021 yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”

Sektor Pariwisata Kabupaten Sintang memiliki potensial dalam pengelolaan dan pengembangannya apabila dilakukan secara maksimal, potensi wisata Kabupaten Sintang yang beragam yakni berupa wisata alam, agrowisata, wisata budaya dan wisata minat khusus, wisata alam berupa pemandangan alam, gunung, sungai, air terjun yang indah dan sebagainya. Wisata budaya sebagai latar belakang sejarah diantaranya Museum Dara Juanti, Museum Kapuas Raya dan benda-benda cagar budaya lainnya serta aneka ragam seni dan budaya yang khas dan unik untuk menarik wisatawan. Upaya pengembangan kepariwisataan tentunya melihat potensi wisata yang ada di Kabupaten Sintang dengan cermati secara teliti dan akurat, sehingga dibutuhkan langkah-langkah sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi dimaksud yang akan diklasifikasi sesuai dengan standar wisata yang akan dikembangkan.

Kecamatan Kelam Permai merupakan Kecamatan yang menjadi prioritas pengembangan wisata alam, memiliki 9 objek daerah tujuan wisata alam yang menjadi daerah wisata unggulan dalam pengembangan kawasan tujuan wisata alam di Kabupaten Sintang. Salah satu objek daerah tujuan wisata di Kecamatan Kelam Permai adalah Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam (TWABK). Kawasan TWABK seluas 520 hektar, oleh pemerintah pusat ditetapkan melalui surat keputusan menteri kehutanan RI nomor 594/Kpts-II/92 tanggal 06 Juni 1992 ditetapkan sebagai TWABK.

Fenomena gap bahwa kondisi keaslian dan pelestarian kawasan TWABK yang juga dikenal dengan lingkaran bukit kelam kini sangat berubah, dimana pada lima tahun terakhir di kawasan ini bongkahan batu-batuan yang bisa mencapai



berdiameter 40-50 meter yang jumlah mencapai ratusan buah yang berada pada kaki bukit sebagai ciri khas keunikan, kini dipecahkan dan diperjual belikan sebagai sumber ekonomi oleh masyarakat setempat untuk material bangunan dan jalan, pada kawasan lingkaran bukit kelam ini juga telah dan masih terjadi menebangan dan pembukaan lahan pertanian sehingga hilangnya keaslian pepohonan yang membuat rindang dan sejuknya udara dikawasan wisata tersebut. Hal ini juga bertambah parah dengan adanya ijin terkebunan besar tanaman kelapa sawit yang mencapai ratusan ribu hektar yang jaraknya hanya beberapa ratusan meter dari kaki bukit. Tentunya pembukaan lahan perkebunan dengan melakukan penebangan dan mengubah struktur alam terutama dengan membentuk sungai baru (parit-parit besar) sehingga hilangnya resapan air disekitar kawasan. Beberapa hal perubahan dikawasan lingkaran bukit kelam ini sangat mengkhawatirkan dimasa akan datang tidak ada bentuk keaslian dan hilangnya keunikan serta kerusakan yang berdampak tentu akan merugikan bagi manusia secara umum dan masyarakat yang berada dikawasan secara khusus karena hilangnya keberlangsungan keaslian serta terhambatnya pelestarian lingkungan.

Sehubungan dengan perubahan yang terjadi pada kawasan wisata lingkaran bukit kelam jelas terjadi perubahan sifat fisik baik langsung maupun tidak langsung dari kawasan lingkaran bukit tersebut yang telah ditetapkan menjadi kawasan wisata alam. Kajian strategis dari tinjauan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan jelas bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup haruslah dapat tertata dengan baik sehingga tidak memberi dampak yang merugikan manusia. Oleh karena pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi;

- perencanaan,
- pemanfaatan,
- pengendalian,
- pemeliharaan,
- pengawasan,
- penegakan hukum.

Menjaga keaslian kawasan adalah upaya untuk tidak merubah sifat fisik adalah hal yang harus dilakukan sebagai bentuk pelestarian dan kelangsungan.



Dalam hal ini pelestarian fungsi lingkungan hidup juga dirumuskan pada pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor Nomor 23 tahun 2009 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup yakni rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selanjutnya konsep daya dukung

lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.

Serta konsep daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk dan dimasukkan kedalamnya, konsep daya tampung berguna dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2008

Tentang Kepariwisata, pasal (5), menyatakan bahwa Pembangunan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan

membuat obyek-obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata, kemudian pada pasal (6) dinyatakan bahwa, pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan

dengan memperhatikan:

- 1) Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
- 2) Nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
- 4) Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Implementasi Kebijakan Kepariwisata Kabupaten Sintang dengan tujuan mendatangkan wisatawan baik lokal maupun dari luar daerah ataupun

internasional, menjadi peluang besar meningkatnya kunjungan wisata pada Kawasan Taman Wisata Bukit Kelam. Kunjungan wisatawan dapat memberi

kontribusi sangat besar bagi peningkatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Didukung Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7



Tahun 2010 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sintang. Pada bagian kelima pasal 18 butir (1) bahwa pengembangan lingkungan pariwisata diarahkan sebagai perencanaan pengembangan Rencana Teknis Objek Wisata (RTOW) yang memperhatikan kelestarian lingkungan, serta menghasilkan produk wisata yang ramah lingkungan sehingga aslinya tetap lestari sesuai dengan budaya lokal yang dimiliki. Sedangkan butir (2) strategi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut: a) mengadakan inventarisasi, analisis dan evaluasi kesesuaian sumber daya kepariwisataan, b) melakukan prakiraan dampak pengembangan kepariwisataan terhadap kelestarian lingkungan, c) meningkatkan sanitasi lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan bagi wisatawan.

Implementasi kebijakan Kepariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan menjadi fokus utama. Pengembangan kawasan daerah wisata yang setelah diterapkan, tidak membuat kawasan TWABK menjadi lebih baik, akan tetapi pembangunan sektor pariwisata dikawasan ini tidak teralisasi dengan maksimal. Dibutuhkannya suatu program untuk dapat menata kembali agar program kebijakan dapat berjalan, sehubungan dengan itu juga di butuhnya penafsiran ataupun interpretasi yang sama untuk dapat mengimplementasikan program. Berdasarkan diskripsi latar belakang permasalahan diatas menunjukkan bahwa mengimplementasikan kebijakan masih belum berhasil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fakta empirik pertama, yakni *research gap* yang mengisyaratkan masih terdapat banyak pemahaman hasil penelitian mengenai ekowisata dan pelestarian lingkungan terhadap pemangku kebijakan, persepsi ataupun sikap masyarakat serta penerapan atau aplikasi kebijakan yang ada. Kedua, *fenomena gap* yang ditunjukkan oleh kondisi keaslian dan pelestarian



kawasan lingkaran bukit kelam Kabupaten Sintang kini sangat berubah dan jumlah pengunjung yang masih rendah yakni hanya 10.704 pada tahun 2015.

Dari kedua fakta empirik di atas melahirkan sebuah masalah penelitian (*research problem*), yakni masih belum dapat diimplementasikan kebijakan kepariwisataan, dan rendah pemahaman masyarakat terhadap penerapan kebijakan tersebut. Oleh karena itu masalah penelitian ini memerlukan penjelasan secara ilmiah.

Berdasarkan uraian masalah penelitian (*research problem*) di atas, selanjutnya dirumuskan pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kepariwisata Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam dalam rangka Pelestarian Lingkungan?
- b) Faktor-Faktor apakah yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Kepariwisata Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam dalam rangka Pelestarian Lingkungan?
- c) Bagaimanakah Model Implementasi Kebijakan Kepariwisata Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam dalam rangka Pelestarian Lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mengidentifikasi dan menganalisis implementasi Kebijakan Kepariwisata Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam dalam rangka Pelestarian Lingkungan.
- b) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Kepariwisata Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam dalam rangka Pelestarian Lingkungan.
- c) Merumuskan Model Implementasi Kebijakan Kepariwisata Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam dalam rangka Pelestarian Lingkungan.



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai dokumen acuan penyusunan dan membuat kebijakan terhadap pelestari lingkungan pada kawasan taman wisata alam serta akan berguna dalam pengembangan kebijakan pemerintah.
- b) Sebagai model alternatif pencegahan kerusakan lingkungan dan memecahkan permasalahan kepariwisataan daerah dalam pembangunan khususnya pengembangan dan pelestarian lingkungan.
- c) Secara akademik diharapkan dapat menambah wawasan tentang studi kebijakan ekologi dan penganggulangan kerusakan lingkungan serta pelestarian lingkungan.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

(1) Implementing Sustainable Tourism: A Multi-Stakeholder Involvement Management Framework (Victoria M. Waligo, Jackie Clarke, Rebecca Hawkins. 2013)

Penelitian ini menyajikan temuan dari sebuah studi kasus di Inggris yang berbasis tujuan mengevaluasi keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya dari *sustainable tourism* (ST). Menggunakan lebih dari lima puluh rekening pemangku kepentingan yang diambil dari delapan kelompok pemangku kepentingan utama, dikembangkan kerangka kerja '*multi-stakeholder involvement management*' (MSIM) '(manajemen keterlibatan multipihak)'. Kerangka kerja MSIM terdiri dari tiga tingkat strategis: ketertarikan, integrasi dan pengelolaan keterlibatan pemangku kepentingan.

Ketiga tingkatan tersebut ada enam tahap pokok yakni: setting adegan, pengakuan *stakeholder* kapasitas keterlibatan, manajemen hubungan pemangku kepentingan, mengejar tujuan yang dapat dicapai, mempengaruhi kapasitas pelaksanaan dan pemantauan keterlibatan pemangku kepentingan. Ini didukung oleh gagasan menyeuruh 'saling keterkaitan' dan aksi bersama [mis. mengelola kemampuan adaptasi para pemangku kepentingan] meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam ST.

Kesimpulan Penelitian ini; Peran stakeholder dalam implementasi ST adalah menjadi lebih menonjol dengan kedua 'sifat multipihak' dari pembangunan berkelanjutan dan pariwisata, konsep stakeholder adalah lensa yang tepat untuk mengeksplorasi isu-isu stakeholder. Pemangku kepentingan perspektif ST dan inisiatif tindakan keberlanjutan selanjutnya berpengaruh secara keseluruhan, oleh karena itu diperlukan analisis pemangku kepentingan. Studi kasus CoAST memberikan pemahaman tentang signifikansi pemangku kepentingan, keterlibatan



dan partisipasi pemangku kepentingan ST. Karena pemangku kepentingan sangat berperan dalam mencapai keberlanjutan tujuan, pandangan pemangku kepentingan sangat penting untuk pengembangan strategi keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif. Faktor kunci yang mempengaruhi Keterlibatan *stakeholder* di ST diidentifikasi sebagai kepemimpinan kualitas, kualitas informasi dan aksesibilitas, pola pikir pemangku kepentingan, kapasitas keterlibatan pemangku kepentingan, hubungan pemangku kepentingan dan prioritas implementasi, hal ini didukung oleh kompleksitas ST, keadaan kontekstual dan keragaman *stakeholder*.

Penelitian ini telah menyajikan kerangka kerja baru yang mendasar untuk meningkatkan keterlibatan *stakeholder* dalam implementasi ST. Kerangka kerja MSIM dikembangkan ditiga tingkat dengan kesadaran untuk menarik pemangku kepentingan ke ST, integrasikan mereka ke dalam proses keterlibatan pemangku kepentingan, dan proses. Dipandu oleh enam tahap yang disematkan di ketiganya tingkat, kerangka MSIM menangani masalah *stakeholder* sementara memberikan dukungan yang relevan untuk mereka. Identifikasi pemangku kepentingan dan analisis sangat penting karena memungkinkan kemitraan yang efektif. Kolaborasi memiliki dampak positif terbesar terhadap keberlanjutan inisiatif dalam penelitian dan merupakan hasil kepemimpinan proaktif.

Kerangka kerja MSIM menyampaikan tentang sesuatu kemungkinan dan keinginan untuk keterlibatan *stakeholder* dalam ST dan efektivitasnya dalam mengejar keberlanjutan. Ini memberikan kerangka manajemen holistik yang mengintegrasikan keterlibatan *stakeholder* dalam implementasi ST. Meski penting Kepemimpinan diabaikan, kita berpendapat bahwa sebagian besar tanggung jawab terletak pada jenis kepemimpinannya dan interaksi pihak terkait terkait. Dengan perencanaan yang matang dari proses partisipatif, kelompok pemangku kepentingan dapat sangat mempengaruhi kebijakan pariwisata strategis dan tingkat distribusi.



(2) Improving Tourism Policy Implementation e The use of hybrid MCDM Models. (Chui-Hua Liu, Gwo-Hshiong Tzeng, Ming-Huei Lee. 2012).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah ini, dengan menggunakan metode hybrid *Multiple Criteria Decision-Making* (MCDM) (beberapa kriteria pengambilan keputusan) untuk menguji hubungan ketergantungan antar berbagai dimensi dan kriteria kebijakan pariwisata dan, pada akhirnya, untuk menyarankan rencana perbaikan optimal untuk kebijakan pariwisata Taiwan. Sebuah Laboratorium uji coba dan evaluasi pengambilan keputusan (*Decision-Making Trial And Evaluation Laboratory* (DEMATEL)) dipekerjakan untuk membangun hubungan jaringan peta (*Network Relationship Map* (NRM)), yang kemudian digunakan untuk menggambarkan jaringan kebijakan pariwisata yang berpengaruh model perbaikan Proses jaringan analitik berbasis DEMATEL *Based Analytic Network Process* (DANP) dan VIKOR diadopsi ke mengevaluasi bobot dan kesenjangan pada tingkat implementasi yang diinginkan.

Model ini berguna dalam mengidentifikasi jaringan yang berpengaruh dan urutan prioritas dimensi/kriteria yang berkaitan dengan pariwisata kebijakan dan, oleh karena itu, sangat membantu pengelolaan kebijakan pariwisata.

Penelitian ini memodelkan strategi perbaikan yang seharusnya sebagai bagian dari implementasi kebijakan pariwisata di Taiwan. Sebuah Metode MCDM hybrid baru digunakan untuk mengatasi ketergantungan hubungan antara berbagai kriteria bersama dengan DEMATEL (seperti yang digunakan untuk membangun NRM) dan DANP (seperti yang digunakan untuk memutuskan bobot relatif kriteria) dan VIKOR (seperti biasa tentukan prioritas perbaikannya). Dalam penelitian ini, dari berbagai macam evaluasi pelaksanaan kebijakan pariwisata, yang disediakan oleh pakar domain dari MCDM menghasilkan yang paling berguna hasil. Urutan prioritas pengaruh adalah sebagai berikut: lingkungan yang aman, lingkungan industri, lingkungan sosio-ekonomi dan sumber daya pariwisata.

Kesenjangan rata-rata antara tingkat aktual implementasi kebijakan dan yang



diinginkan adalah 0,398, yang menunjukkan tingkat implementasi kebijakan pariwisata Taiwan saat ini perlu dijangkau. Implikasi dari hasil ini untuk rencana manajemen dan perbaikan telah dinaikkan dan diformulasikan. Konsep dasar yang diterapkan di sini ditemukan dapat dipahami oleh pengambil keputusan, dan perhitungan untuk Teknik yang dibutuhkan sangat mudah dan sederhana, melalui penggunaan Program Excel, temuannya bisa berkurang kekhawatiran terkait dengan rencana induk wisata yang jarang diimplementasikan atau yang tidak bisa dijalankan di dunia nyata dan menekankan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini Uji coba pendekatan empiris, dilakukan dengan menggunakan studi kasus Taiwan, yang mengilustrasikan kegunaan pendekatan dalam berurusan dengan kebijakan pariwisata nasional yang kompleks dan implikasi dari penelitian kami untuk pengambil kebijakan. Namun, ada beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini dilakukan dengan sampel relatif lebih besar, kelompok sampel ahli yang membawa lebih banyak kekuatan jelas akan memungkinkan lebih canggih analisis evaluasi dan verifikasi temuan saat ini meningkat generalisability (Tseng, 2010). Kedua, kriteria evaluasi dipilih dari tinjauan literatur tentang pelaksanaan kebijakan pariwisata. Metodologi lainnya, seperti longitudinal studi dan wawancara mendalam, seharusnya sudah diterapkan mengidentifikasi beberapa kriteria lain yang mungkin. Penelitian lebih lanjut adalah demikian dibutuhkan dibidang pengembangan multi kriteria yang lebih banyak Struktur menggabungkan sampel besar menggunakan hybrid MCDM metode di masa depan.

(3) Factors Affecting Tourism Policy Implementation: A conceptual Framework And A Case Study in China (Dan Wang, John Ap. 2013)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada kerangka kerja dan teori mengenai implementasi kebijakan Kepariwisata dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang diidentifikasi dalam pendekatan Implementasi kebijakan *top-down* dan *bottom-up*.



Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka konseptual yang menggambarkan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata dan menggambarkan kerangka kerja dengan pengalaman implementasi kebijakan pariwisata di tingkat lokal di China. Di temukan empat faktor diantaranya: lingkungan makro ekonomi dan sosial; pengaturan kelembagaan; hubungan antar organisasi (IOR) dan struktur koordinasi antar organisasi (IOC); dan kelompok kepentingan berpengaruh di implementasi kebijakan pariwisata. Selain itu, studi kasus di China mengidentifikasi peran masing-masing faktor dalam hal kendala dan fasilitator pada konteks realita dan memperkaya kerangka konseptual dengan menggambarkan hubungan antara faktor-faktor tersebut. Studi ini menyoroti konsep dan teori yang terkait implementasi kebijakan pariwisata. Ini juga membahas beberapa solusi yang dapat memperkaya kebijakan pariwisata sastra dalam konteks Asia dan negara berkembang.

Kesimpulan Penelitian ini dengan pertimbangan kerugian dari "top-down" dan Pendekatan "Bottom-up" dan untuk tujuan menyediakan pemahaman komprehensif tentang sifat Implementasi kebijakan pariwisata, penelitian ini mengadopsi pendekatan sintesis dianjurkan oleh Goggin, et al (1990) dan Krutwaysho dan Bramwell (2010) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata dalam konteks masyarakat dan lingkungan. Kerangka konseptual yang merangkum faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan pariwisata dikembangkan berdasarkan studi di bidang pariwisata, administrasi publik dan pembuatan kebijakan, perencanaan dan tata kelola pariwisata, dan pemasaran tujuan organisasi. Empat faktor, yaitu: ekonomi makro dan sosial; pengaturan kelembagaan; Inter-Organizational hubungan (IOR) dan struktur koordinasi antar organisasi (IOC); dan kelompok kepentingan diidentifikasi sebagai berpengaruh dalam implementasi kebijakan pariwisata. Selanjutnya, studi kasus di China menentukan



peran masing-masing faktor (yaitu kendala dan fasilitator) dalam konteks nyata dan memperkaya kerangka konseptual dengan menggambarkan hubungan antara faktor-faktor tersebut.

Di China, kerja sama antar organisasi pemerintah diidentifikasi sebagai kunci implementasi kebijakan pariwisata yang efektif. Karena itu, kemampuan *Tourism Administrative Organizations* (TAO) lokal untuk berkoordinasi dengan organisasi pemerintah yang lain dalam mencapai Implementasi kebijakan yang efektif. Studi ini juga menemukan bahwa walaupun implementasinya kebijakan pariwisata terjadi di tingkat daerah, karena sistem pemerintahan terpusat, politik dan antar organisasi hubungan antara TAO (yaitu Administrasi Pariwisata Nasional China) dan organisasi pemerintah lainnya di tingkat nasional bisa secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan di tingkat lokal. Untuk Misalnya, hasil koordinasi di tingkat nasional dan sistem pengawasan nasional yang dirancang untuk memantau kebijakan pariwisata Implementasi dapat menjadi kendala bagi TAO lokal dalam implementasi kebijakan pariwisata di tingkat lokal, tiga faktor termasuk lingkungan makro, pengaturan kelembagaan, dan antar organisasi struktur koordinasi. Secara khusus, empat kendala diidentifikasi sebagai hambatan dalam implementasi kebijakan pariwisata, yaitu: 1) pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tidak jelas tentang isu-isu terkait pariwisata; 2) pemahaman terbatas tentang pariwisata administrasi dan peran TAOs; 3) kurangnya insentif / sanksi mekanisme kerjasama antar organisasi (IOC); dan 4) kombinasi antara pemerintah dan badan usaha milik negara. Semua ini Kendala bisa ditelusuri kembali ke administrasi yang tidak tepat pengaturan sistem administrasi publik yang ada, yang tidak bisa dipecahkan tanpa adanya reformasi keseluruhan kelembagaan Pengaturan. Pengaturan pengaturan administratif tersebut di ketergantungan TAOs pada organisasi pemerintah lainnya dalam kebijakan Implementasi. Hubungan antar-organisasi didasarkan pada baik perspektif pertukaran atau perspektif ketergantungan sumber daya (Levine dan



White 1961; Pfeffer dan Salancik 1978), yang pada dasarnya memang demikian tidak ada antara TAO dan organisasi pemerintah lainnya.

Namun, di tingkat lokal untuk Kunming dan Lijiang, para fasilitator berasal dari konteks sosio-ekonomi. Misalnya, Lingkungan makro lokal diidentifikasi sebagai faktor fundamental menentukan pelaksanaan kebijakan pariwisata, karena bisa secara substansial mempengaruhi komitmen pejabat kunci dan sumber daya yang dialokasikan untuk implementasi kebijakan. Komitmen dari pejabat kunci menuju pariwisata dan pelaksanaan pariwisata Kebijakan secara positif dapat mempengaruhi pemahaman pejabat di organisasi pemerintah lainnya tentang peran mereka dalam pariwisata. juga, Struktur koordinasi antar organisasi tidak hanya membangun saluran komunikasi dan kerjasama, tapi juga meningkatkan pengalaman organisasi pemerintah dalam koordinasi antar organisasi dan kerjasama; meningkatkan koordinasi para pejabat kemampuan; dan mengarah pada pengembangan hubungan pribadi (yaitu, guanxi) antara pejabat TAO setempat dan yang lainnya organisasi pemerintah.

Terlihat bahwa pengaruh kelompok kepentingan seperti yang disarankan Dalam kerangka konseptual lemah di China, hubungan antara pemerintah dan kelompok kepentingan di bidang pariwisata Cina ditandai dengan 'statisme' Eising (2004), di mana pemerintah dominan dalam pembuatan dan implementasi kebijakan dan kelompok kepentingan dikonsultasikan untuk umpan balik mengenai implementasi. Meski beberapa orang yang diwawancarai (yaitu: Interviewees KM3 dan LJ2) disebutkan peran kelompok kepentingan produsen seperti travel agensi dan asosiasi hotel dalam implementasi kebijakan pariwisata, Mereka adalah organisasi semi-pemerintah di bawah TAO setempat dan mereka hanya sedikit berpengaruh pada organisasi pemerintah lainnya dan hubungan antar organisasi. Orang yang diwawancarai tidak melakukannya sebutkan kelompok minat non-produsen seperti konsumen dan lingkungan karena kelompok ini memiliki keterlibatan terbatas dalam pembuatan kebijakan pariwisata (Kuang,



2001). Dengan demikian, bukan produsen Kelompok kepentingan memiliki pengaruh yang kecil terhadap antar-organisasi proses implementasi kebijakan pariwisata. Memang, guanxi sebagai Faktor baru, yang berasal dari konteks sosial di China itu diidentifikasi sangat membantu dalam menjembatani kerja sama antar organisasi (Gu, Ryan, Li, and Gao, 2013). Identifikasi guanxi di Studi kasus ini mencerminkan pentingnya pendekatan relasional (Krutwayshe dan Bramwell, 2010) untuk mempelajari kebijakan pariwisata Implementasi.

Pada studi selanjutnya, kerangka konseptual dikembangkan dalam hal ini studi dapat diteliti lebih lanjut melalui studi kasus implementasi kebijakan tertentu.

Menimbang bahwa peran dan bobot faktor dapat berbeda untuk masing-masing kebijakan pemeriksaan kerangka konseptual dalam pelaksanaan sebuah kebijakan khusus akan memperkaya kerangka konseptual dengan lebih jauh menggambarkan peran dan kekuatan masing-masing faktor. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut dengan lebih banyak kasus di lokasi lain China dan negara lain dengan status politik dan sosio ekonomi yang berbeda konteks.

Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah bahwa hal itu memeriksa TAOs di tingkat administratif yang berbeda dalam hal yang sama provinsi, yaitu Propinsi Yunnan. Sementara di tempat lain di China, institusi politik mungkin serupa; ekonomi dan sosial lingkungan mungkin sangat berbeda, yang mungkin berpengaruh secara langsung keputusan pemerintah daerah tentang pengembangan pariwisata. Dengan demikian, faktor berasal dari lingkungan makro dan pengaruh lokal pemerintah bisa berbeda dengan yang diidentifikasi di Yunnan. Sedangkan di negara lain, institusi politik juga lingkungan ekonomi dan sosial dapat berbeda secara mendasar. Dengan demikian, ada potensi besar untuk menyelidiki fitur masing-masing faktor dan mekanisme di mana faktor-faktor ini bekerja sama mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pariwisata di masyarakat yang berbeda sistem administrasi.



(4) Implementing Integrated Rural Tourism: An Event-Based Approach. (Emese Panyik, Carlos Costa, Tamara Rátz, 2011)

Kurun dua dekade terakhir, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan daerah semakin mendapat perhatian sebagai pendekatan alternatif untuk pembangunan pedesaan di Uni Eropa (UE), terutama dalam konteksnya sektor pelengkap pertanian seperti pariwisata. Meski ada berbagai macam Pendekatan integrated untuk pengembangan pariwisata di daerah pedesaan, pendekatan berbasis acara sejauh ini belum menjadi pusat perhatian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dan laporan tentang pengembangan kapasitas kolaboratif dari Kelompok Aksi Lokal (LAG) untuk promosi pariwisata pedesaan dalam konteks acara tingkat nasional yang inovatif, 'Hari Pariwisata Pedesaan Hungaria'. Sebuah metode campuran Pendekatan ini diterapkan untuk mengeksplorasi dan membandingkan pandangan sisi penawaran mengenai keberhasilan dan kegagalan perencanaan acara dan proses organisasi dan untuk mendapatkan faktor kunci keberhasilan dari pendekatan berbasis peristiwa Pariwisata Pedesaan Terintegrasi (IRT). Hasilnya memberikan bukti adanya konsekuensi kegagalan mengintegrasikan keprihatinan lokal ke dalam proses organisasi acara dan menyoroti peran penting manajemen perantara dalam membangun hubungan kepercayaan dengan penyedia layanan pedesaan. Selain itu, Dikatakan bahwa tantangan utama pendekatan berbasis peristiwa terhadap IRT terletak pada kapasitas pemangku kepentingan untuk secara kolektif merencanakan dan menerapkan strategi pemasaran di tingkat lokal.

Penelitian ini melaporkan tentang pengembangan kapasitas kolaboratif LAGs untuk promosi pariwisata pedesaan dalam konteks inovatif, acara tingkat nasional, Hari Pariwisata Pedesaan Hungaria. Perspektif sisi penawaran atas keberhasilan dan kegagalan proses organisasi dan manajemen menjadi fokus analisis. Secara khusus, pendekatan metode campuran diterapkan mengeksplorasi dan membandingkan sudut pandang penyelenggara dan peserta



operator pariwisata. Temuan itu kaya akan implikasi manajerial sebagai pelajaran strategis dari pengalaman, untuk menggunakannya dalam merencanakan dan membimbing upaya kelayakan inisiatif untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan jangka panjang masa depan.

Analisis yang dilakukan di sini nampaknya mendukung temuan baru-baru ini dilaporkan di lingkungan akademik berkaitan dengan pentingnya pendekatan kooperatif untuk pembangunan pedesaan, namun lebih jauh lagi memberikan bukti tentang konsekuensi kegagalan untuk berintegrasi keprihatinan lokal dalam acara proses organisasi. Memang, sementara penelitian ini memperkuat pentingnya ruang publik di membina atau memungkinkan partisipasi masyarakat (Bramwell & Sharman, 1999; Vernon, et al., 2005) dari manajemen acara perspektif, ini menyoroti peran penting perantara manajemen dalam perencanaan dan pengorganisasian acara berbasis pendekatan ke IRT

Secara khusus, wawancara mendalam tentang informan kunci dilakukan dengan manajer LAG mengungkapkan ketidakpercayaan secara umum terhadap layanan tersebut penyedia untuk elemen kunci dari acara: temporal diskon yang diberikan selama acara berlangsung. Sedangkan beberapa wisata operator, terutama dari pedesaan atau pinggiran yang paling tertinggal daerah, sangat antusias dengan tingkat nasional, serba Kampanye pemasaran, perhatian utamanya adalah profitabilitas inisiatif dipecah ke penyedia layanan individu. Meyakinkan operator tentang manfaat jangka panjangnya Pengurangan pendapatan akibat diskon pada dasarnya masalah kepercayaan diri, yang membutuhkan pendirian kepercayaan hubungan. Dengan demikian, peran perantara berbasis lokal manajemen dalam merekrut dan menghubungkan pihak lokal dan tingkat nasional sangat diperlukan untuk keberhasilan acara.

Strategi pemasaran utama juga menjadi sumber konflik dilihat. Sedangkan manajemen pusat disukai media massa kampanye yang dilakukan di saluran televisi utama dan surat kabar, para pimpinan LAG menekankan



pentingnya diseminasi tersebut informasi tentang acara di tingkat lokal. Itu berpendapat bahwa sumber informasi utama masyarakat pedesaan adalah lokalitas, oleh karena itu strategi pemasaran harus dimanfaatkan keuntungan teritorial dan relasional dari kedekatan geografis. Narasi tersebut menunjukkan keberhasilan rujukan dari mulut ke mulut dan kerjasama dengan pelaku sentral pedesaan yang disematkan di daerah jaringan bisnis masyarakat dan pariwisata seperti restoran dan pemilik hotel, yang perusahaannya sering dikunjungi oleh perusahaan besar jumlah wisatawan setiap hari. Selanjutnya, acara diinduksi asosiasi kuat dengan 'Greedy Thursday', versi asli dari acara dari sektor catering, menunjukkan bahwa sinergis teknik pemasaran berdasarkan transfer asosiasi bisa digunakan untuk saling meningkatkan nilai merek acara yang diselenggarakan di konteks sektoral yang berbeda.

Ada tiga kesimpulan utama yang bisa ditarik dari multipel analisis regresi dilakukan untuk mendeteksi signifikan secara statistik hubungan antara tiga indikator kinerja dan enam faktor keberhasilan Pertama, mungkin temuan yang paling mencolok penelitian ini adalah menguatkan salah satu kesimpulan utama yang ditarik dari wawancara kualitatif tentang pentingnya lokal pemasaran dengan hasil statistik. Upaya pemasaran lokal ditemukan sangat berpengaruh pada keberhasilan acara tersebut seluruh ketiga variabel dependen dianalisis. Ini bertentangan arah utama dari strategi pemasaran utama acara dan menyarankan agar lebih banyak perhatian diberikan pada promosi acara di tingkat lokal melalui media lokal, langsung pemasaran dan organisasi pariwisata lokal dengan yang aktif partisipasi bisnis pariwisata, agar lebih efektif menjangkau segmen pengunjung lokal. Pemasaran lokal yang sukses sebuah acara tingkat nasional bukan hanya aktivitas lokal, melainkan malah hasil kerja sama vertikal dan horizontal dari sisi penawaran aktor. Selanjutnya, tantangan utama berbasis event Pendekatan IRT terletak pada kapasitas pemangku kepentingan untuk secara kolektif merencanakan dan menerapkan strategi pemasaran di tingkat lokal.



Kedua, beranda acara terbukti menjadi sumber penting informasi bagi para pengunjung, mendukung temuan terkini yang menunjukkan Pergeseran besar dalam kebiasaan dan metode pencarian informasi pemesanan wisatawan pedesaan menuju sumber online (IESE, 2008). ketiga, Hasil yang menarik adalah kurangnya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan jumlah pengunjung dan tingkat diskont. Berlawanan dengan ekspektasi, tingkat diskonto yang lebih tinggi dari pada Nilai minimum yang mungkin (30%) tidak ditemukan untuk ditemani dengan pertumbuhan jumlah wisatawan yang semakin tinggi. Ingat itu Pemasaran pariwisata menargetkan kepentingan wisatawan, bukan dari penyedia layanan, temuan kualitatif dan kuantitatif menyoroti beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dari sudut pandang penyedia layanan pedesaan saat mengembangkan strategi pemasaran sebuah pendekatan berbasis event untuk IRT. Yang terpenting, itu diperdebatkan Secara umum, menawarkan diskon di daerah pedesaan memiliki risiko lebih tinggi penyedia layanan daripada di daerah perkotaan. Menimbang bahwa 'tipikal pengusaha pariwisata pedesaan justru menghindari risiko ekonomi daripada yang diinginkannya membuat investasi pertumbuhan cepat di bisnisnya '(Komppula, 2004; p. 125), sangat penting untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan wisatawan dan risiko finansial untuk layanan pedesaan penyedia dengan mengevaluasi dampak diskon pada kedua belah pihak dan memposisikan nilai-nilai yang sesuai. Hal ini karena bersifat kualitatif temuan menunjukkan bahwa operator enggan untuk berpartisipasi peristiwa tersebut disebabkan oleh tingginya risiko keuangan yang ditimbulkan diskon. Sebenarnya, itu alasan utama penolakannya berpartisipasi. Hasil kuantitatif, di sisi lain menunjukkan hal itu Operator pariwisata yang memberikan tingkat diskont yang lebih tinggi tidak mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jumlah pengunjung dibanding mereka memberikan tarif yang lebih rendah atau minimum saja. Temuan ini menyiratkan bahwa tingkat standar minimum paling dapat diterima operator yang bisnisnya sangat bergantung pada



penghasilan harian. Helianihus, sangat diperlukan untuk menjadi juga kepentingan penyedia layanan diperhitungkan dalam keputusan pada tingkat diskon yang ditawarkan, Karena, pada akhirnya, penyelenggaraan acara tergantung pada kesediaan para operator untuk bergabung dan secara kolektif menawarkan potongan harga layanan mereka.

Namun, masalah ini menyoroti bahwa keterbatasan utama ini Studi muncul dari kekuatan utamanya, yaitu berfokus sepenuhnya pada sisi penawaran. Dengan tidak adanya survei pengunjung, variabel tunggal yang mempertimbangkan informasi terkait pengunjung (V1 'Kesadaran akan pengunjung tentang acara ini') diukur berdasarkan data dikumpulkan oleh penyedia layanan dari para wisatawan; yang lainnya variabel mencerminkan pandangan operator.

Selain itu, kesimpulan diambil dari kasus 'Hari Pariwisata Pedesaan Hungaria', sehingga generalisabilitasnya hasil kedua komponen terbatas pada konteks kasus. di Istilah statistik, Model 2 memiliki sifat statistik terlemah, menjelaskan hanya 21,1% dari varians dalam peningkatan pendapatan dari penyedia layanan Akhirnya, faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah terbatas pada yang dikonfirmasi oleh mayoritas manajer LAG dan juga yang diterima oleh HLC untuk disertakan dalam instrumen survei, dua skala terbatas survei akhirnya ditentukan oleh HLC. Oleh karena itu, faktor lain seperti yang terkait dengan peran manajemen perantara dan paket program dibahas dalam wawancara tidak termasuk dalam statistik analisis.

Pemasaran pariwisata yang sukses mengeksplorasi permintaan dan determinasi proses organisasi dan manajemen yang tepat sehingga untuk memuaskan konsumen. Untuk tujuan ini, lanjutkan penelitian harus fokus pada persepsi, sikap dan motivasi faktor para pengunjung bisa mencocokkan penawaran dan permintaan Faktor.



(5) Tourism Innovation Policy: Implementation And Outcomes (Isabel Rodríguez , Allan M. Williams, C. Michael Hall. 2014)

Penelitian ini membuka "kotak hitam" Implementasi kebijakan inovasi pariwisata melalui analisis Program Kelompok Usaha Inovatif Spanyol yang mendorong inovasi melalui kolaborasi *bottom up bottom-up* dalam kelompok. Fokusnya ada pada tiga isu utama: proses implementasi kebijakan, jenis inovasi yang muncul, dan hasil dan hambatan.

Metodologi sumber sekunder, seperti Community Innovation Survey (Eurostat, 2014), sediakan beberapa data tentang inovasi perusahaan, tidak ada sumber mengenai kebijakan inovasi pariwisata, atau hasilnya. Periset yang berusaha mengatasi celah ini melalui pengumpulan data primer memerlukan akses ke tingkat tinggi pembuat kebijakan, dan penelitian ini memiliki akses istimewa ke pengambil keputusan utama di Segittur, pariwisata inovasi BUMN yang mengelola Program AEI untuk pariwisata.

Mengingat fokus Penelitian ini tentang dimensi instrumental dan operasional kebijakan inovasi pariwisata, bersifat kualitatif Pendekatan memungkinkan kekhasan dan nuansa proses dan hasil kebijakan inovasi pariwisata untuk diatasi Keaslian penelitian ini terletak pada evaluasi monografi terhadap inovasi pariwisata program, yang melibatkan wawancara dan analisis dokumenter pada tingkat yang berbeda dalam kebijakan tersebut kerangka kerja, dan meninjau keseluruhan siklus hidup beberapa proyek. Segittur menyediakan dokumen internal yang berkaitan dengan pengelolaan program dan alokasi dana untuk AEI individu, 2008-2012. Ini termasuk laporan evaluasi dengan ringkasan rinci setiap orang dari 59 tindakan / proyek yang didanai, yang memungkinkan produksi data kuantitatif sumatif tentang investasi inovasi, aktor yang terlibat dan jenis inovasi yang ditangani oleh proyek.

Mereka tidak memberikan informasi yang memadai mengenai keefektifan hasil, atau faktor-faktor yang mana mempengaruhi ini oleh karena itu peneliti juga



melakukan wawancara semi terstruktur, melalui Skype, dengan perwakilan manajemen AEI wisata pada bulan November dan Desember 2012. 28 Manajer AEI dari 33 yang tercatat secara resmi di Register Khusus Kementerian tersebut setuju untuk berpartisipasi. Sisanya lima, tiga menolak diwawancarai, dan dua orang baru saja terbentuk. Wawancara tatap muka juga dilakukan dengan dua pengambil keputusan utama yang bertanggung jawab atas program di Segittur.

Format wawancara standar yang tidak diprogram memungkinkan pendekatan yang fleksibel jelaskan kompleksitas proses inovasi yang melibatkan multiplisitas aktor dan sangat ekosistem AEI yang heterogen. Rekaman wawancara ditranskrip dan dianalisis secara kualitatif menggunakan proses kodifikasi terbuka dan aksial (Strauss & Corbin, 1990) dan perangkat lunak Atlas.ti. Ini melibatkan pengurangan data melalui penerapan kode, pengkategorian dan pemilihan tema berulang. Kutipan dari transkripsi digunakan untuk mendukung dan menggambarkan tema-tema ini di bagian analisis. Sebagian besar orang yang diwawancarai memberikan salinan rencana strategis mereka. Wawancara berlangsung satu jam rata-rata.

Meskipun akses istimewa ke aktor pada tingkat yang berbeda dalam program ini, sejumlah keterbatasan dari pendekatan ini diakui termasuk sifat subjektif dari wawancara, cakupan hanya sebagian dari siklus hidup proyek dalam banyak kasus, dan hanya terbatas akses ke beberapa informal hubungan dan kontak yang memberikan 'lem' penting dalam formulasi kebijakan dan implementasi proses. Meskipun demikian, komentar para manajer AEI di triangulasi dengan mereka bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan Program AEI untuk pariwisata di Segittur, serta bahan dokumenter, untuk memberikan perspektif tentang sifat subjektif data wawancara. Penelitian tentang Program AEI merupakan studi kasus yang satu, relatif berkembang dengan baik inisiatif kebijakan inovasi pariwisata yang memiliki lintasan yang memadai untuk evaluasi dan, dengan demikian, ia menyediakannya wawasan tentang



implementasi dan hasil kebijakan. Mengingat sifat sosial yang ada Kebijakan semacam itu, dan terutama kekhususan kelembagaannya, temuan tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung di negara lain konteks nasional, namun menyoroti isu-isu kunci, kontradiksi dan konflik yang membentuk kedua implementasi tersebut dan hasil yang ditentukan oleh kekhususan inovasi dalam pariwisata. Ini lebih jauh dibahas dalam kesimpulannya.

Kesimpulan meningkatnya fokus pada kebijakan inovasi pariwisata, pada tingkat yang berbeda (nasional, regional, lokal), telah sering didasarkan pada penegasan daripada bukti. Penelitian ini berusaha menyajikan secara kualitatif dan analisis kritis terhadap satu kebijakan tersebut, Program AEI, contoh langka di mana pariwisata memiliki telah terintegrasi dalam keseluruhan program inovasi nasional (Hall & Williams, 2008). Reancangan kerja berusaha mengatasi beberapa kelemahan pendekatan tradisional, dengan menghubungkan-apa yang adasering terfragmentasi - studi implementasi kebijakan, proses inovasi, dan hasil hasil.

Implementasi kebijakan adalah, dalam berbagai tingkat, bukan proses *top-down maupun bottom-up*, tapi kontinum fluida antara pedoman pusat dan otonomi daerah masing-masing AEI untuk merancang strateginya sendiri (Pulz & Treib, 2007). Segittur ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan pariwisata dana inovasi untuk mengarahkan implementasi inovasi yang diharapkan bisa *bottom-up*, tapi proses pelaksanaannya kurang mendapat kejelasan dalam kriteria pedoman kebijakan untuk pendanaan pusat evaluasi proyek secara khusus, kriteria evaluasi lebih memperhatikan kolaborasi daripada fasilitator dan hambatan inovasi lainnya, dan mungkin juga beberapa karakteristik spesifik dari industri pariwisata, seperti kurangnya kepercayaan dan sulitnya menyeimbangkan kerjasama versus kolaborasi dalam konteks kompetisi spasial cluster (Weidenfeld et al., 2014).



Dalam prakteknya, Partisipasi aktor lokal tidak merata, dan tidak memiliki ketekunan, sehingga kontradiksi dalam Model implementasi terpapar dengan kejam begitu dana pusat ditarik. Ini adalah kelemahan fatal mengingat adanya hubungan antar kompleks antar komponen konstitutif produk atau pengalaman wisata. Selain itu, kontribusi teoritis penting dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa fokus pada lokal gagal untuk menghargai pentingnya polisentritas dalam kelembagaan pengaturan untuk implementasi, terutama berkenaan dengan pentingnya kerjasama antara beberapa otoritas yang memiliki tumpang tindih yurisdiksi dan tanggung jawab. Teori polisentrik mengemukakan bahwa untuk menjadi pendekatan hibrida yang efektif terhadap implementasi kebijakan, maka dibutuhkan semua aktor memiliki kapasitas dan otoritas politik untuk menyelaraskan strategi dan sumber daya menuju kesamaan tujuan, sebagaimana dibuktikan dalam literatur sains sosial yang lebih luas (Fyfe et al., 2009). Studi kebijakan Implementasi pariwisata, termasuk berkenaan dengan inovasi, oleh karena itu perlu dikenali bahwa aktor non-negara, termasuk NGOS, asosiasi pribadi dan bisnis, memiliki peran penting dalam bermain sendiri rezim inovasi, seperti cluster yang berada secara geografis, baik dalam pengembangan kebijakan dan implementasi. Seperti yang disarankan oleh Program AEI, di mana aktor disertakan dalam pembuatan kebijakan proses, bahkan di tingkat regional, sehingga meningkatkan otoritas politik mereka, kemungkinan sukses implementasi dan hasil meningkat.

Program AEI memang merangsang kegiatan yang berhubungan dengan inovasi, melalui pengembangan kolaborasi, dan mendanai penciptaan strategi dan sejumlah besar proyek percontohan. Inovasi itu khas inkremental, organisasi dan produk yang terfokus, dengan elemen teknologi yang kuat; yang terakhir, Tentu saja, membawa risiko tinggi keusangan yang cepat. Sebagian besar belum melangkah melampaui tahap percontohan di Saat menulis, namun penarikan dana dan penutupan 11 AEI berarti inovasi Perasaan implementasi penuh



(komersialisasi) -sebagai kemungkinan, paling tidak, menjadi sederhana. Pada pandangan pertama, Hasil kebijakan mengecewakan namun evaluasi yang lebih bernuansa menarik pada pemikiran yang lebih baru literatur generik (Mohnen & Röller, 2005) mengakui dua fase inovasi dan, dengan perluasan, dari kebijakan inovasi: pertama, keputusan untuk berinovasi dan kebijakan yang meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk berinovasi, dan kedua intensitas aktivitas inovasi. Apakah dengan desain, atau lebih mungkin secara tidak sengaja, Program AEI lebih efektif dalam mendorong kecenderungan daripada intensitas inovasi. Jadi, meski beberapa AEI telah hilang, tanpa pencapaian inovasi yang signifikan, 21 bertahan setelah melewati masa sulit, seperti siklus hidup kemitraan (Caffyn, 2000). Hasil tersebut menimbulkan pertanyaan signifikan mengenai apa yang sebenarnya merupakan keberhasilan dalam intervensi kebijakan, bagaimana evaluasi dan kerangka evaluasi (Hall, 2014).

Melihat ke depan, ada sejumlah pelajaran untuk kebijakan inovasi pariwisata, dan untuk peneliti. Pertama, setiap proses kebijakan pasti kombinasi pendekatan hibrida *top-down* dan *bottom up*. Dalam hal ini, perhatian yang tidak memadai diberikan pada kapasitas dan otoritas politik aktor yang akan memungkinkan kolaborasi yang lebih besar menuju tujuan strategis bersama. Oleh karena itu, contohnya menyoroti bahwa dalam penerapan multi level, kekuatan institusi polikentrik pengaturan merupakan penentu penting keberhasilan kebijakan (Andersson & Ostrom, 2008). Untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian hasil kebijakan yang diinginkan, pelaku harus disertakan kedua kebijakan tersebut perumusan serta kebijakan implementasi karena hal ini meningkatkan tingkat otoritas dan kapasitas politik.

Selanjutnya, ada kebutuhan untuk mengintegrasikan penelitian lintas kebijakan, proses inovasi dan hasil inovasi, yang telah menjadi kontribusi khusus dari makalah ini. Kedua, Kebijakan pariwisata lebih cenderung efektif bila didasarkan pada pemahaman tentang sistem inovasi pariwisata dan langkah-



langkah inovasi yang ditargetkan untuk memperhitungkan berbagai tuntutan sub-sektoral pada bisnis pariwisata. Seringkali, seperti dalam penelitian ini, lingkaran setan dari hambatan yang saling menguatkan menghambat inovasi dan pendekatan sistemik yang diperlukan untuk mengatasi hal ini (Galia & Legros, 2004; Mohnen & Rosa, 2002). Pendekatan semacam itu tidak hanya akan membahas transfer pengetahuan, tapi juga membiayai, pemerintahan, modal manusia dan permintaan. Kasus Spanyol juga menyoroti bahwa penghalang terkait dengan kekhususan sektor pariwisata harus diatasi pada tahap perancangan kebijakan. Beberapa hambatan adalah yang melekat dalam iklim inovasi spesifik suatu negara, namun yang lainnya sangat spesifik bagi sektor pariwisata. Ini menekankan bahwa pariwisata dapat memanfaatkan integrasi ke dalam kerangka inovasi nasional, dan menyoroti kebutuhan akan kebijakan inovasi yang lebih horisontal. Ketiga, inovasi dibedakan kebijakan, menangani hambatan inovasi spesifik di berbagai jenis daerah diperlukan (Tödting & Trippel, 2005), bukan kebijakan serial, atau transfer model ideal yang kasual. Inovasi pariwisata Kebijakan tidak hanya bisa mereplikasi keberhasilan terbukti dari lebih banyak kebijakan inovasi generik, namun harus mengatasi kekhasan sektor pariwisata dan destinasi, termasuk dominasi dari UKM, kompleksitas yang saling berkaitan antara produk wisata dan pengalaman wisata, yang memikat logika prinsip uno-acto yang sering menghasilkan jangka pendek (lihat juga OECD, 2005b), dan pentingnya ekologi proyek (peran lingkungan, hubungan antar konsumen, dan hubungan inang tamu). Akhirnya, meski inovasi semakin dilihat sebagai wisata suci pengembangan, tidak ada solusi cepat untuk defisit inovasi, dan kebijakan dan pendanaan memerlukan kerangka waktu yang tepat, dan komitmen industri dan politik. Semua pengamatan ini menggaris bawahi kebutuhan untuk mengisi kesenjangan kritis dalam pemahaman terfragmentasi kita tentang kebijakan inovasi pariwisata.



(6) Tourism Development After The Implementation Of Sustainable Strategies In Neamt County (Stefania Bodosca, dan Mihnea Diaconescu. 2015)

Beberapa tindakan telah dilakukan dalam praktik selama dekade terakhir untuk mendukung lingkungan global, target pembangunan dan berbagai peluang strategis telah diidentifikasi untuk perbaikan wilayah. Sayangnya di tingkat lokal mereka memilikinya tetap hanya tantangan politik. Tujuan makalah ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang menghambat perkembangan warisan budaya Neamt County dan untuk menarik beberapa kesimpulan mengenai keseluruhan proses pembangunan berkelanjutan. Sebagai Fokus penelitian ini, penelitian ini membawa diskusi masyarakat dan keterlibatannya dalam pelestarian dan integrasi warisan budaya.

Kesimpulan penelitian ini yakni diusulkan untuk penyelidikan masa depan sebuah penelitian kualitatif dengan bantuan wawancara kunci pemangku kepentingan dan anggota masyarakat dan sebuah survei tentang bagaimana pemulihan harus dilakukan lebih lanjut. Salah satu Keterbatasan penelitian ini adalah analisis hanya satu situs tertentu dan bahwa penelitian masa depan harus mencakup beberapa hal situs untuk melihat apakah ada keterkaitan di antara keduanya. Strategi yang baik untuk pengelolaan warisan berkelanjutan menawarkan sebuah mendukung tindakan yang berdampak pada generasi masa depan dan mendidik masyarakat bahkan jika tindakan tersebut tidak dilakukan sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktek. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dihadapkan pada beberapa hambatan seperti prioritas kebijakan ekonomi nasional, struktur administrasi publik dan interkoneksi antara kementerian yang berbeda. Karena tidak ada statistik untuk pengeluaran perjalanan bagi pengunjung budaya dan warisan, penelitian kami dianalisis hanya atraksi budaya yang mewakili nilai warisan. Kita bisa menyimpulkan bahwa meski prinsipnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sangat berharga dan menguntungkan berlakunya dan dipindahkan ke praktik adalah sebuah tugas yang



melibatkan biaya keuangan yang sangat sulit untuk didanai dan ditutupi sambil menjaga keseimbangan antara keduanya anggota masyarakat dan pengambil keputusan politik. Jika pendekatan transversal ditangani, masyarakat dapat melakukannya pahami lebih baik beberapa praktik dan operasi manajemen dan dengan cara ini proyek dapat ditemukan pemberdayaan dan animasi dari penduduk setempat.

(7) Tourism Policy and Governance: Quo vadis? (Marion Joppe.2017)

Penelitian ini tentang kebijakan dan tata kelola pariwisata sampai saat ini dan di mana penelitian selanjutnya harus dilakukan Ada kebutuhan yang jauh lebih besar untuk penelitian kebijakan yang relevan yang jelas tentang umum Definisi terminologi, mengadopsi metodologi yang lebih konsisten dalam pengumpulan data, menantang yang dominan retorika pro-pertumbuhan, dan ditulis dengan gaya yang bisa diakses oleh pembuat kebijakan. Para pemerhati telah lama berargumen untuk peran yang lebih berarti bagi masyarakat tuan rumah, namun pada saat pariwisata meningkat pesat dan ancamannya overtourism di banyak tempat tujuan "hot spot", bukan lagi pilihan untuk menahan suaranya. Keputusan terkait penentuan tujuan dan pemilihan metode untuk mencapai tujuan disebut sebagai kebijakan. Meski istilah umumnya mengacu pada keputusan atau tindakan, sebenarnya juga bisa menjadi keputusan negatif atau bahkan *non-action /non-decision*. Kebijakan dibuat dalam bentuk organisasi apa pun, namun bila mengacu pada "Kebijakan pariwisata", biasanya kita menyebut beberapa bentuk "kebijakan publik" yang terkait secara khusus dengan keputusan pemerintah di tingkat manapun dari lokal sampai internasional. Pemerintahan, di sisi lain, adalah bagaimana menangani organisasi mencapai keputusan ini Jadi, sementara tata kelola adalah konsep yang cukup langsung, meski dengan banyak tantangan,

Kebijakan pariwisata, terutama karena istilah "kebijakan" sangat kabur dan pariwisata merupakan konstruksi sosial yang mengacu untuk perilaku



tertentu: yang berpergian ke dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan biasa seseorang. Perilaku ini dikendalikan oleh kebijakan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ditulis untuk banyak tujuan lain, seperti pengendalian atau fasilitasi arus modal dan investasi, pengangkutan penumpang dan barang, hak pekerja, keamanan dan keamanan, atau perlindungan lingkungan. Dan dari situlah masalahnya dimulai, karena memang benar pengembangan pariwisata sangat bergantung pada pengambil keputusan yang kurang memperhatikan atau mengetahui kepariwisataan.

Kesimpulan Penelitian ini Agenda neoliberal dan globalisasi telah di terima secara signifikan dan meningkatkan resistensi seiring dengan pergeseran nilai konsumen dengan perubahan radikal dalam tatanan dunia, demografi dan pandangan dunia. Hal ini, pada gilirannya, menyerukan pendekatan baru yang berani untuk pengembangan pariwisata dari fenomena massa yang berorientasi volume dimana persaingan juga sering didasarkan pada harga ke model berdasarkan nilai, pengalaman yang berarti dan dimana komunitas tuan rumah dan lingkungan mendapatkan banyak manfaat bersih. Argumen untuk perubahan paradigma ini telah dilakukan sebagaimana oleh banyak penulis, tapi mungkin tidak lebih jelas dari Larry Dwyer (2017) dan Anna Pollock (2012). Tapi di wajah tubuh seperti Organisasi Pariwisata Dunia (pemerintah) dan World Travel and Dewan Pariwisata (swasta) mengucapkan selamat bersorak-sorak Dengan pertumbuhan industri yang tak henti-hentinya, sangat sedikit pembuat kebijakan telah memperhatikan pesan-pesan ini sampai saat ini. Namun, tuan rumah masyarakat dan pemangku kepentingan semakin membuat mereka Suara yang terdengar saat overtourism menjadi masalah sebagian besar tujuan populer Sejauh ini, ada beberapa rekomendasi praktis keluar dari penelitian akademis tentang bagaimana beralih dari neoliberal untuk perspektif ekonomi politik atau bagaimana untuk membatasi dan bertanggung jawab mengelola pertumbuhan pariwisata sebagai bagian dari agenda penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Ada banyak



sarjana muda, berbakat yang mengambil bagian dari ini tugas menakutkan di setiap wilayah di dunia dan berkontribusi dalam banyak hal bahasa selain bahasa Inggris. Beberapa di antaranya telah bekerja pada beberapa orang tingkat pemerintahan, memberi mereka wawasan yang baik tentang inner pekerjaan pembuatan kebijakan. Hanya beberapa yang mungkin layak ditonton, berdasarkan publikasi awal, adalah Judith Estol, Alberto Amore, Dao Truong, dan Meredith Wray - semuanya berani menantang gagasan yang telah terbentuk sebelumnya tentang pariwisata.

Secara sederhana, potongan opini ini juga menjadi tantangan besar. Karena bagaimana Anda melakukan keadilan terhadap tubuh besar pekerjaan yang Anda miliki berkontribusi dalam hal-hal kecil dan signifikan terhadap topik ini? Dengan menyebutkan beberapa, apakah orang lain akan sangat marah karena tidak dikenali? Bagaimana apakah Anda membatasi referensi ke 10 (well 12, sebenarnya) ketika benar-benar, "Pendapat" telah diinformasikan dengan membaca banyak artikel di atas tahun? Apakah saya melangkah ke dalam rawan plagiarisme dengan tidak mengutip semuanya? Pengaruh itu? Seperti yang lain menanggapi pendapat mereka pada penelitian masa depan. Menjadi topik wisata yang penting, akan menarik untuk ditemukan bagaimana mereka telah menemukan kesulitan ini.

(8) Governance of Sustainable Tourism in a Vast Area Surrounding a National Park (Graziella Benedetto, Donatella Carbonib, Gian Luigi Corintoc.2016)

Kebijakan tata kelola telah menjadi pertanyaan kunci dalam paradigma keberlanjutan. Peneliti dapat memainkan peran penting dalam mendukung aksi pembuat kebijakan dan instansi yang bertanggung jawab yang terlibat dalam pengelolaan keberlanjutan tempat yang rawan, seperti kawasan lindung saat ditekankan untuk tujuan wisata. Taman Nasional Asinara menunjukkan keunikan yang terletak di tempat kecil dan kecil pulau yang tidak dihuni, dekat dengan Pulau Italia Sardinia yang besar. Situs spesifik adalah studi kasus yang sangat menarik untuk



memikirkan kembali pentingnya tata kelola yang kolaboratif, dibandingkan dengan kebijakan *top-down* tradisional yang biasanya diadopsi di kawasan lindung. Studi kasus ini menggambarkan peluang dan kesulitan yang harus dihadapi oleh agen pengelola dan di saat bersamaan, tidak bisa dihindari, jika berhasil menjalankan pemerintahan keberlanjutan yang pada akhirnya bisa juga menjadi motor ekonomi lingkungan sekitar. Penulis menyajikan kemungkinan kemitraan pemangku kepentingan lokal di masa depan berdasarkan tata kelola terstruktur. Temuan ini sejalan dengan perdebatan literatur tentang bagaimana pemerintahan daerah dapat digunakan untuk mendukungnya pariwisata berkelanjutan

Penelitian ini menyelidiki Taman Nasional Asinara di Sardinia, Italia sebagai studi kasus. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk meneliti secara mendalam 'kasus' tertentu dalam konteks 'kehidupan nyata'. Untuk tujuan Menghadapi fokus penelitian dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pendahuluan, selama periode 2013-14, bidang kita kelompok telah mengumpulkan informasi dan data, sesuai dengan teori grounding yang disebut untuk menggambarkan kerangka analisis dari berbagai sumber seperti pengamatan pribadi terhadap bukti, proyek sebelumnya, berita dari media, dan wawancara langsung. Dalam kerangka pendekatan geografi budaya, berikut Anderson et al. kita juga dapat mempertimbangkan 'studi kasus bukan sebagai aplikasi lokal dari model abstrak, atau pernyataan' mikro 'dari Rangkaian acara 'makro'. Sebaliknya, studi kasus adalah penggusuran penuh semangat dari dunia dan pertunangan di dalamnya. Dalam melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan dan pemegang hak, kami mengikuti metode Steiner Kvale yang mempertimbangkan wawancara sebagai percakapan persahabatan sehari-hari namun memiliki struktur dan tujuan yang dikontrol secara ketat oleh mewawancarai peneliti. Dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan dan memilih yang utama kami mulai membentuk sebelumnya penelitian dan program Taman Nasional Asinara, menggiring bola salju rantai aktor kunci utama.



Asinara National Park di Sardinia adalah studi kasus tertentu karena sebenarnya tidak dihuni secara permanen penduduk dan menghadapi perlunya keterlibatan yang lebih besar dari orang-orang yang tinggal di daerah yang berdekatan. Penggunaan alam sumber daya diatur dalam Undang-Undang Nasional Italia mengenai kawasan lindung, yang memberi agen pengelolaan publik baik tugas dan wewenang untuk mengelola konservasi sumber daya alam namun mengadopsi visi yang terkendali dan meningkatkan pembukaan pariwisata sebagai kegiatan ekonomi yang mendapat izin kepada perusahaan swasta. Dari ini Datanglah keharusan untuk mengindividualkan model pemanfaatan berkelanjutan taman yang layak. Temuan utama kami setelah penelitian lapangan yang berlangsung dua tahun ini, adalah keharusan untuk mengubah kebijakan penguasaan sumber daya alam di tingkat lokal kemampuan hubungan pemerintahan antar pelaku yang menargetkan tujuan yang berbeda, termasuk keharusan untuk memiliki kolaborasi basis agen berkomitmen yang lebih besar.

Pembentukan forum yang kebersamaan, dimana kepentingan yang saling bertentangan akan menemukan komposisi yang efektif, sama seperti penting karena tampaknya melelahkan, karena bahkan bagi tokoh masyarakat setempat, yang menekankan pentingnya dari partisipasi terbesar agen sosial yang tinggal di daerah dekat atau lebih jauh ke pulau Asinara. Sebuah top down kebijakan nampaknya tidak dapat dihindari untuk mengendalikan kelestarian lingkungan namun harus menghadapi kesempatan untuk tidak memaksakan keputusan namun menghasilkan tata kelola kolaboratif pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam bersama dengan masyarakat setempat.

Beberapa pedoman untuk agensi, dan dengan demikian forum stakeholder yang stabil, adalah sebagai berikut. Pemerintahan kolaborasi akan menghasilkan:

- (1) komunikator yang terampil, yang memegang peranan penting dalam membangun, memfasilitasi dan berkoordinasi kolaborasi;



(2) hubungan kuat antara pemangku kepentingan yang didasarkan pada kapasitas individu dan kapasitas organisasi untuk kolaborasi, di mana para pemangku kepentingan perlu belajar dari pengalaman kolaboratif dan perilaku berprinsip.

Kerjasama tata kelola akan terhindar dari:

- (1) untuk mengadopsi peraturan formal yang berbeda, membagi pemangku kepentingan;
- (2) untuk melahirkan norma informal, yang memungkinkan kepemimpinan informal;
- (3) untuk mengenali sumber daya yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan, yang dapat menyebabkan ketidak seimbangan kekuasaan dan konflik.

Singkatnya, sistem pemerintahan akan dapat memilih antara skenario alternatif seperti:

- (1) Pulau ini akan dihuni oleh manusia dan kegiatan ekonomi, termasuk pertanian produktif, hewan berkembang biak, menempati desa kecil Cala d'Oliva dengan penduduk dan bisnis turis baru;
- (2) pulau ini akan menjadi laboratorium lingkungan yang memiliki satu tujuan pemantauan alamalam, hanya menikmati penelitian ilmiah;
- (3) Bayangkan, merancang dan menerapkan bentuk keramahan baru yang bisa disebar di area yang lebih luaske Taman Nasional Asinara, di luar perbatasan pulau.

Langkah selanjutnya kami dalam membuat penelitian lapangan kami akan berfokus pada analisis tentang cara-cara yang dimiliki oleh badan publik untuk merencanakan dan mengelola arus wisatawan ke pulau pada kenyataannya. Kami sudah mengantisipasi bahwa masalah yang menantang akan terjadi kemungkinan faktual untuk mengeksplor model pemerintahan yang sama di



taman nasional atau kawasan lindung lainnya, seperti lokalisme nampaknya menjadi topik pemerintahan.

(9) Tourism Policy Implementation And Society. (Oratai Krutwaysho, Bill Bramwell. 2010)

Implementasi kebijakan pariwisata penelitian ini dengan terpusat pada masyarakat, mempertimbangkan pendekatan kebijakan relasional dalam konteks sosialnya, termasuk ekonomi, pemerintahan, politik dan budaya, dan berfokus ini pada eksplorasi interaksi timbal balik yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata di Phuket, Thailand. Studi ini berfokus pada bagaimana pelaksanaannya proses berhubungan dengan masyarakat, tinjauan ini menggunakan "berpusat pada masyarakat" dan pendekatan relasional.

Pendekatannya terintegrasi *top-down* dan *bottom up* perspektif tentang proses kebijakan, dan digunakan untuk menilai kesulitan dipenerapan tiga kebijakan terkait pariwisata di Phuket. Hal ini di yakini proses implementasi kebijakan bisa lebih dipahami sepenuhnya melalui evaluasi interaksi spesifik dan kontingen. Alih-alih penekanan terutama pada mengisolasi faktor faktor terpisah yang mempengaruhi pelaksanaan, Analisis Phuket lebih fokus pada eksplorasi timbal balik Interplay antara aktor, pengaruh, proses dan konteks masyarakat.

Dikatakan bahwa pendekatan teoretis ini memberikan wawasan berharga pada implementasi kebijakan dan memiliki manfaat untuk penelitian masa depan.

Pendekatan tersebut mengungkapkan berbagai hubungan dialektis antara implementasi kebijakan dan sosial ekonomi, politik, pemerintahan dan konteks budaya. Implementasi itu ditunjukkan untuk melibatkan interaksi antara kelompok dan individu yang berbeda dalam masyarakat, termasuk antara aktor di berbagai badan publik dan tingkatan pemerintahan, siapa memiliki pandangan yang berbeda mengenai kebijakan dan aplikasinya. terungkap Negara memiliki banyak pengaruh terhadap implementasi kebijakan, namun dengan aktor di dalam dan di



Implikasi ketiga dari studi ini adalah untuk penelitian di negara-negara di mana pemerintahan lebih terpusat. Pemerintahan Thailand kuat terpusat, dan juga dua kebijakan nasional yang dipelajari di sini peraturan dan sanksi hukum, dan dengan demikian banyak proses kebijakan diperiksa relatif *top-down*. Namun hal itu ditunjukkan bahwa di Phuket masih ada beberapa ketegangan dan negosiasi seputar kebijakan, termasuk di antara para aktor yang bermaksud menerapkannya dan yang terkena dampaknya oleh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan di dalam rezim yang lebih terpusat, sentral niat pemerintah dapat frustrasi oleh tekanan masyarakat dan konflik kepentingan, termasuk oleh tindakan pemerintah tingkat lokal (Yan & Bramwell, 2008). Ada beberapa bukti di Phuket lokal keengganan pemerintah untuk menerapkan kebijakan nasional seperti penggunaan lahan kontrol perencanaan, saat itu merongrong legitimasi lokal dan pemilihannya dukungan, atau menghambat pembangunan ekonomi lokal. Ketegangan seperti itu antara pusat dan daerah setempat seputar kebijakan pariwisata pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di negara lain. Penelitian ini mungkin mempertimbangkan aplikasi kebijakan dalam konteks yang sering proses halus pemerintah pusat 'kemudi' 'pemerintah daerah. Ini juga bisa berguna untuk mengeksplorasi konflik antar nasional dan organisasi relatif pemerintah daerah dan kapasitas keuangan (Yuksel, Bramwell, & Yuksel, 2005). Ada juga ruang lingkup untuk studi tentang peluang dan kendala yang mempengaruhi lokal inisiatif pemerintah dan untuk 'birokrat tingkat jalanan' yang terlibat dengan kebijakan pariwisata. Aktor negara jelas dibatasi oleh mereka peran organisasional, namun personel individu "berbeda menafsirkannya dan bertindak berdasarkan kebijakan yang harus mereka terapkan, dan kebijakan mereka. Perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh pengalaman administratif mereka tetapi juga oleh pengalaman mereka di ranah lain " (Long, 2001, hal 48).

Keempat, penelitian ini menunjukkan pengaruh yang berpotensi besar isu ekonomi dalam implementasi kebijakan pariwisata. Lebih khusus lagi, Kasus



spesifik dari tiga kebijakan di Phuket menyoroti kebutuhan mengeksplorasi kepentingan, reaksi dan interaksi kapitalis kecil dan perusahaan besar di komunitas bisnis saat kebijakan berdampak hasil investasi dari masing-masing bisnis. Pentingnya Tanggapan operator bisnis individu di Phuket dapat menjelaskan alasannya kebijakan yang membawa manfaat ekonomi langsung yang paling nyata untuk bisnis-kebijakan keamanan pantai-sering kali terlihat diterapkan yang terbaik Pelaku usaha lokal mungkin menentang kebijakan seperti perencanaan penggunaan lahan dan pengendalian lingkungan, yang membahayakan keuntungan mereka, dan mereka mungkin mengklaim di arena publik bahwa perlawanan mereka juga berada di dalam kepentingan masyarakat luas karena melindungi ekonomi dan pekerjaan. Penelitian dan perencanaan perencanaan pariwisata perlu dipertanyakan apakah kepentingan individu dan kolektif bertepatan dengan kasus tertentu, mengingat manfaat dan biaya kebijakan yang sering berbeda. Manfaatnya dan biaya berhubungan dengan dampak lingkungan dan sosial serta ekonomi isu, pertimbangan jangka panjang maupun jangka pendek, dan juga untuk kesejahteraan sosial yang lebih luas dan pembangunan berkelanjutan. Namun Masalah ekonomi jangka pendek mungkin tampak paling menarik bagi orangtinggal di tempat tergantung pariwisata.

Akhirnya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa jaringan pertemanan dan patronclient hubungan dapat mendorong tindakan atau kurangnya tindakan yang menentang kebijakan terkait pariwisata resmi. Tanggapan ini bisa melibatkan pembayaran atau kembalinya nikmat yang ditafsirkan sebagai korup. Seringkali ini tanggapan tertanam dalam sistem nilai dan jaringan sosial yang melibatkan harapan yang dipegang luas untuk saling membantu, terutama di dalam komunitas lokal. Pentingnya dalam banyak masyarakat dari harapan ini, dan hubungan patron-klien terkait, perlu lebih sepenuhnya dieksplorasi dalam implementasi kebijakan pariwisata. di sana meningkatkan pengakuan akan potensi kerugian dari clientelism untuk perencanaan pariwisata terutama di negara



berkembang. Yuksel dan Yuksel (2008, hal 192) menunjukkan bahwa "jika memuaskan orang sendiri atau Pendukung dengan mengorbankan kriteria obyektif menjadi berangkat titik putusan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata, dan peraturan dan peraturan umumnya dihindari melalui hubungan pribadi, [lalu] pengembangan pariwisata selaras dengan lingkungan terdengar seperti mimpi yang tidak realistis". Tapi perawatan harus dilakukan Menjelaskan praktik-praktik klerelistik secara sederhana, berdasarkan potensi yang tidak pantas resep tentang model "modern", "rasional" negara pengembangan, atau tentang bagaimana orang yang kurang beruntung secara sosial ekonomi dapat menangani kebutuhan mendesak dan mendesak mereka.

(10) Governance and Sustainable Tourism: What is the Role Of Trust, Power And Social Capital? (Robin Nunkoo. 2017)

Pengenalan editorial untuk isu khusus ini menyatakan bahwa penelitian kepariwisataan dan pariwisata berkelanjutan akan dilakukan manfaat dari risalah bersama kepercayaan dan konsep tata kelola kunci lainnya seperti kekuasaan dan modal sosial. itu memperkenalkan konsep pemerintahan dalam konteks pengembangan pariwisata berkelanjutan. Diskusinya nanti menggali perspektif teoritis tentang kepercayaan, kekuasaan, dan modal sosial dan mencontohkan kontribusi mereka terhadapnya kepariwisataan dan wisata berkelanjutan. Tipologi modal sosial berpotensi bermanfaat dalam berkelanjutan

Penelitian pariwisata dikembangkan. Tipologi ini menekankan aspek positif dari modal sosial dan tantangannya konsep ini menyajikan tata kelola dan keberlanjutan. Tata kelola yang baik dan penelitian pariwisata yang berkelanjutan bisa dibidang memiliki hak istimewa konsep kekuasaan untuk merugikan kepercayaan dalam hubungan sosial. Koleksinya makalah masalah khusus ini terletak di dalam perdebatan ini. Sebuah agenda untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini disajikan dengan cara kesimpulan.



Kesimpulan penelitian ini, menemukan konsep kepercayaan, kekuatan, modal sosial dalam konteks pemerintahan pariwisata dan keberlanjutan.

Sementara kumpulan makalah membuat kemajuan teoritis kelampahan, tidak cukup membuat keadilan menjadi penting dan kontemporer topik penelitian

Diskusi tentang agenda penelitian masa depan Oleh karena itu berguna.

Kepercayaan dan kekuatan adalah kosakata penting dalam modern masyarakat

dan pengembangan pariwisata kontemporer dan dengan demikian, mereka harus

dipelajari bersama dalam setiap studi yang berhubungan dengan hubungan sosial

dan institusi sosial (Nunkoo & Ramkissoon, 2012). Mereka terbentuk proses tata

kelola dan kebijakan pariwisata berkelanjutan. Pemerintahan pariwisata Penelitian

akan mendapatkan keuntungan dari risalah kepercayaan dan kekuasaan bersama

pengaturan kolaboratif dari sebelumnya sampai saat ini telah dilakukan di Konsep

kekuasaan dalam hubungan sosial saja.

Peran jaringan sosial dalam pemerintahan telah lama dikenal dalam

literatur Namun, jaringan ini berbeda karakteristiknya tidak diciptakan sama dan

akibatnya, mereka memiliki pengaruh yang berbeda tentang perilaku aktor (Bodin

& Crona, 2009). Ini jelas memiliki implikasi untuk kemampuan aktor dalam

mengelola pengembangan pariwisata dan menangani keberlanjutan dan

tantangan tata kelola. Pengaruh seperti itu seharusnya baik dipahami oleh peneliti

pariwisata. Tujuan terdiri dari sekelompok pemangku kepentingan yang saling

terkait tertanam dalam jaringan sosial. Para pemangku kepentingan ini termasuk

organisasi sektor publik dan swasta, lembaga informal serta masyarakat lokal.

Karena itu, pemerintahan pariwisata dan penelitian keberlanjutan akan mendapat

manfaat lebih jauh dari penggunaan sinergi melihat modal sosial Secara khusus,

penting untuk pariwisata peneliti mengidentifikasi sifat kolaborasi dan hubungan

sosial dan bagaimana mereka dibentuk oleh lembaga formal dan supremasi

hukum apa maksudnya untuk pariwisata berkelanjutan dan pemerintahan yang

baik. masa depan Penelitian juga harus mencoba menemukan cara untuk



meningkatkan hasil positif manifestasi modal sosial sekaligus mengurangi negatifnya konsekuensi pada pengembangan pariwisata. Last but not least, peneliti pariwisata harus memperluas penelitian tentang modal sosial, transfer pengetahuan, dan pembangunan berkelanjutan (misalnya Inkpen & Tsang, 2016) ke destinasi. Diharapkan karya konseptual ini menjadi blok bangunan untuk penelitian tentang kekuasaan, kepercayaan, sosial modal, pemerintahan, dan pariwisata berkelanjutan ke negara yang lebih maju.

(11) Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. (Agustina Pallewa, 2016).

Agustina Pallewa, 2016. Dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Tujuan Penelitian Untuk mengkaji implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara dan menemukan faktor pendukung dan penghambat. Dengan Teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata perlu dilakukan dengan komunikasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait rencana kebijakan pariwisata, sehingga koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan pariwisata dapat dipahami oleh pemangku kebijakan yang lain. Sehingga berdampak terhadap program kurang berjalan sebagaimana yang ditargetkan. Komitmen, loyalitas dan profesionalisme pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta instansi lain perlu ditingkatkan agar mampu mengimplementasikan kebijakan pariwisata sebagai kekuatan pendorong pembangunan yang lain karena sumber daya yang lain seperti anggaran, fasilitas dan yang lainnya hanya merupakan penunjang sekalipun juga penting, namun yang terpenting adalah sumber daya manusia itu sendiri. Disposisi implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat



tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Struktur birokrasi belum terkoordinasi dengan baik dalam menjalankan tugas untuk menopang pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, baik itu secara internal maupun eksternal Dinas kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Toraja Utara, karena untuk memperoleh hasil yang maksimal seharusnya interaksi dalam struktur birokrasi lebih terpola, baik dari dalam lingkungan internal maupun luar instansi. Tata aliran pekerjaan dan garis perintah harus lebih jelas sekalipun telah tampak tetapi struktur birokrasi sering tidak berdaya karena tidak memiliki manajemen kerja dan kurang mengetahui apa yang harus dikerjakan seperti itu pula yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.

(12) Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pada Cagar Alam Pegunungan Cycloop (Yaconias Maintindom, Andry Indrawan Dan Hariadi Kartodihardjo, 2006).

Yaconias Maintindom, Andry Indrawan dan Hariadi Kartodihardjo, 2006. Dengan Judul Penelitian Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pada Cagar Alam Pegunungan Cycloop. Tujuan penelitian 1. Menganalisis alternatif pemanfaatan yang optimal terhadap Kawasan Konservasi CAPC. 2. Mengetahui sumber mata air dan nilai ekonomi. 3. Menyusun strategi pengembangan CAPC. Dengan teknik menggunakan metode survei yang bertujuan mengumpulkan data dari sejumlah variabel pada kelompok masyarakat melalui wawancara secara bebas terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan konservasi Kabupaten dan Kota Jayapura memperlihatkan dua hal. *Pertama*, lemahnya kemampuan daerah dalam mengenali permasalahan pokok pengelolaan kawasan konservasi sehingga tidak



ada prioritas kebijakan untuk penyelesaiannya. *Kedua*, adanya perbedaan kekuasaan antara pengambil kebijakan dalam proses pengambilan keputusan.

Namun demikian, implementasi dari pengelolaan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembangunan sumberdaya lahan di CAPC memperlihatkan bahwa fokus pembangunan sumberdaya lahan di Kabupaten dan Kota Jayapura sejak tahun 1985-2004 belum diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pokok pengelolaan sumberdaya lahan, yang merupakan prakondisi bagi terlaksananya pengelolaan sumberdaya lahan yang memenuhi prinsip-prinsip kelestarian.

Kondisi luas hutan dikawasan CAPC mengalami penurunan yang sangat drastis.

Indikator ini dapat dilihat dari sumber-sumber air bersih yang tadinya berjumlah 34 sungai yang berhulu di Cycloop telah mengalami kekeringan hingga 14 sungai. 12 dari 14 sungai ini bermuara di Danau Sentani yang sebagai sumber air bersih bagi penduduk yang berada disekitar Danau Sentani. Penyebab lain kekeringan sumber air/sungai-sungai diwilayah hulu Cycloop adalah perladangan berpindah pada kelerengan > 30% yang berdampak pada bencana longsor yang mengakibatkan pencemaran pada sungai dan penumpukan sedimen akibat longsor dan kegiatan pertambangan galian C dan pendulangan emas diwilayah jembatan II, mengakibatkan Danau Sentani mengalami pendangkalan.

(13) Implementasi Kebijakan Model Kampung Konservasi Taman Nasional (Ginung Pratidina, 2014)

Ginung Pratidina, 2014. Dengan judul Penelitian Implementasi Kebijakan Model Kampung Konservasi Taman Nasional. Tujuan Penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan model kampung konservasi Taman Nasional gunung Halimun Salak dalam peningkatan kelestaria lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian menggunakan studi partisipasi aksen riset, dimana data didapatkan dengan tujuan menemukan masalah dengantindakan baru untuk memecahkan masalah, dan memperbaiki situasi kerja. Hasil penelitian menunjukkan Program Model kampung Konservasi meliputi tiga kegiatan yaitu



restorasi/ rehabilitasi, observasi secara partisipatoris dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan rincian aktivitas dari tiga kegiatan MKK tersebut akan dinilai tingkat efektivitas program MKK sebagai program pemberdayaan masyarakat, dengan mengambil dua contoh masyarakat yang berhasil menerima MKK yaitu Masyarakat di Kampung Sukagalih dan program MKK yang tidak berhasil khususnya pada kampung-kampung adat Kasepuhan. Pelaksanaan kegiatan reboisasi/rehabilitasi terdiri : 1) Sosialisasi kegiatan , 2 Perencanaan bersama masyarakat , 3 Penanaman tanaman yang berfungsi secara konservasi, ekonomi dan sosial, 4 Pola tanam tidak secara monokultur, 5 Penerapan dan pengaturan pola tanam dari tanaman jangka pendek sampai jangka panjang, 6 Tumpang sari (tanaman rendah, sedang, Tinggi, 7 Pembuatan pembibitan, 8 Peningkatan kapasitas masyarakat melalui Pembibitan, 9 Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pembibitan dan teknik tanaman. Dari 9 kegiatan tersebut masyarakat Sukagalih, semua kegiatan direspon dengan positif sehingga kegiatan rehabilitasi dan reboisasi bisa berjalan sesuai dengan konsep MKK yang menjadi program BTNGHS. Adapun pada masyarakat Sirna Resmi, tidak semua kegiatan direspon secara positif, khususnya kegiatan- kegiatan yang sebenarnya secara adat Kasepuhan sudah mempunyai tatacara dan aturannya sendiri. Misalnya kegiatan tumpangsari dicurigai oleh masyarakat sebagai upaya taman nasional untuk mengusir secara halus masyarakat dari kawasan taman nasional. Kegiatan sosialisasi dan perencanaan bersama masyarakat dipandang tidak tuntas dilakukan karena tidak melibatkan para pengurus Kasepuhan, seakan-akan pemerintah berusaha memisahkan masyarakat dari kelembagaan Kasepuhan. Keinginan masyarakat Kasepuhan bahwa kegiatan sosialisasi dan perencanaan bersama sudah menjadi bagian dari kesepakatan antara TNGHS dengan masyarakat adat dimana hak otoritas adat juga diakui keberadaannya dan hak-haknya terhadap pengelolaan hutan dan kawasan hutan. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pembibitan dan teknik tanaman juga tidak



dirispondositif, karena masyarakat adat sudah memiliki pengetahuan sendiri tentang tata cara pembibitan dan tata cara tanam yang kemungkinan berbeda dan bertentangan dengan prinsip penanaman pemerintah. Pola tanam satu tahun sekali dalam pandangan masyarakat adat berbeda dengan pola tanam yang dianjurkan oleh pemerintah (intensifikasi) yang dapat meningkatkan produksi, misalnya menerapkan pola tanam satu tahun dua kali atau satu tahun tiga kali.

(14) Kajian Strategis Pengembangan Potensi Ekowisata di Lembah Baliem Sebagai Suatu Alternatif Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan (Boni Asso, Ib Adnyana Manuaba dan I Nyoman Sunarta, 2007).

Boni Asso, Ib Adnyana Manuaba dan I Nyoman Sunarta, 2007. Dengan judul penelitian Kajian Strategis Pengembangan Potensi Ekowisata Di Lembah Baliem Sebagai Suatu Alternatif Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan. Tujuan penelitian adalah mengetahui potensi pengembangan ekowisata, kendala pengembangan ekowisata, dan strategi pengembangann sumber daya ekowisata yang terdapat di Lembah Baliem dengan teknik observasi langsung melalui pengamatan dan pencatatan potensi yang tampak di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab secara informal, atau wawancara langsung dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, laporan ilmiah, dan arsip-arsip resmi, serta media elektronik. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Lembah Baliem memiliki potensi sumber daya ekowisata yang cukup bervariasi serta alami, namun belum memberikan manfaat yang berarti terhadap kehidupan masyarakat lokal. Keterpaduan dalam mengembangkan sumber daya alam perlu dipupuk guna mencapai sasaran pembangunan yang efisien dan efektif serta optimal. Nyatanya pembangunan masih dilakukan secara sektoral sehingga pencapaian sasaran pembangunan juga tidak begitu optimal. Pengembangan ekowisata secara menyeluruh tertumpu pada dinas pariwisata daerah, sementara



idealnya, pengembangan pariwisata melibatkan semua elemen terkait, baik pemerintah maupun swasta.

(15) Kebijakan Pariwisata dan Manajemen Untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Danau Engure Das Area (Criks Leitis, 2011).

Criks Leitis, 2011. Universitas Latvia dengan judul penelitian Kebijakan Pariwisata Dan Manajemen Untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Danau Engure Das Area. Tujuan penelitian adalah untuk mengusulkan rekomendasi manajemen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan teknik observasi dan wawancara terstruktur dengan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif untuk dapat memberi kontribusi dan penjelasan masalah yang fokus pada indikator pembangunan berkelanjutan dan meninjau kegiatan pejabat, pengusaha dan LSM sehubungan dengan kemungkinan manfaat dan/atau hambatan untuk implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya dukungan pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan di Latvia sehingga dibutuhkan sumber daya pariwisata yang dapat memfasilitasi pemulihan dan mengurangi beban sumber daya alam, yakni 1) memfasilitasi pelestarian dan penggunaan yang wajar keanekaragaman biologis dan kawasan lindung, 2) mempromosikan inklusi kawasan lindung dalam pembangunan ekonomi yang membatasi pada kegiatan ekonomi substantiating sosial-ekonomi yang menarik sumber keuangan untuk pengelolaan kawasan lindung, 3) mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian dengan menyediakan sumber informasi kepada penduduk tentang kualitas lingkungan dan sumber daya alam, 4) memfasilitasi pengembangan pendidikan lingkungan dan mendorong pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan serta untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, 5) mendukung pembangunan berkelanjutan dari ronment environmental alami untuk tujuan rekreasi dan untuk mempromosikan ekowisata. Rancangan pembangunan berkelanjutan strategi latvia hingga 2030, dengan mempertahankan kesadaran



identitas dan melestarikan lanskap, alam dan kultur budaya dan situs warisan sejarah.

(16) Implementasi Kebijakan Pelarangan Penambangan di Kawasan Karst Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar Kecamatan Penggang, Kabupaten Gunung Kidul) (Wuspada, 2012).

Wuspada, 2012. Dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pelarangan Penambangan di Kawasan Karst Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar Kecamatan Penggang, Kabupaten Gunung Kidul). Tujuan penelitian menganalisis implementasi Kebijakan Pelarangan Penambangan di Kawasan Karst Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Girisekar Kecamatan Penggang, Kabupaten Gunung Kidul) dengan teknik observasi dan wawancara mendalam dengan para informen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tegas dengan tidak mengeluarkan ijin usaha penambangan akan tetapi tidak tegas dalam memberi teguran terhadap penambang batu gamping maka perlu rekomendasi kebijakan yang mengakomodir masyarakat untuk dapat mengemas kembali kawasan karst sebagai daerah wisata dalam karst, sehingga tidak merusak lingkungan namun tetap memberi lapangan kerja bagi masyarakat tanpa harus melakukan penambangan.

(17) Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan tentang konservasi kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (Study di Badan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Balikpapan). (Saudah, 2006).

Saudah, 2006 Dengan judul Penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan tentang konservasi kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (Study di Badan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Balikpapan). Tujuan penelitian mendeskripsikan konservasi kawasan hutan lindung sungai Wain. Metode pendekatan yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan interview bebas dengan penyajian data deskriptif naratif. Hasil penelitian menunjukkan



Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengelola kawasan hutan lindung yang didukung dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 41 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan pada Pemerintah Kota/Kabupaten maupun PP No. 25 Tahun 2000 yang menegaskan “Kewenangan Daerah Atas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung” dan dipertegas lagi Keputusan Presiden RI No. 32/1990 tentang “Pengelolaan Kawasan Lindung”. Dengan pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada Kabupaten/Kota memberikan jalan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembenahan pengelolaan pembangunan di daerah. Melihat potensi yang ada di Hutan Lindung Sungai Wain, Pemerintah Kota sudah bertekad memperbaiki kinerja pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain dengan membentuk Badan Pengelola yang mempunyai hukum pasti dan dengan persetujuan DPRD II membuat Peraturan Daerah No. 11 tahun 2004 untuk meningkatkan kelestarian dan keseimbangan yang ada di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Oleh karena itu, segala bentuk pembinaan dan fasilitas yang akan dilakukan Pemerintah Kota harus benar-benar mempertimbangkan kondisi khas dan riil keanekaragaman hayati yang ada di kawasan dan hendaknya Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan lindung pada khususnya dan masyarakat kota Balikpapan pada umumnya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilai yang ada di sekitar kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Implementing sustainable tourism: A multi-stakeholder involvement management framework (Victoria M. Waligo, Jackie Clarke, Rebecca Hawkins, 2013)	Kurangnya atau tidak memadainya partisipasi stakeholder merupakan kendala utama dalam realisasi pariwisata berkelanjutan. menyajikan studi kasus berbasis yang mengevaluasi	Metode Penelitian Kualitatif (Miles & Huberman, 1994) Pengumpulan data dilakukan dalam dua fase. Fase pertama melibatkan tiga kelompok fokus yang diselenggarakan dengan total dua	Penelitian ini telah menyajikan kerangka kerja baru untuk meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam implementasi pariwisata berkelanjutan. Kerangka kerja MSIM	Penelitian ini menjelaskan secara holistik kerangka manajemen yang mengintegrasikan keterlibatan stakeholder dalam implementasi pariwisata berkelanjutan



		<p>ke terlibatan pemangku kepentingan implementasi pariwisata berkelanjutan dalam dari</p>	<p>belas pemangku kepentingan. Fase kedua dan utama terdiri dari empat puluh wawancara tatap muka semi-struktural dengan para pemangku kepentingan dari delapan kelompok pemangku kepentingan utama. Dengan Analisis dapat mencakup pemeriksaan, pengkodean, pengkategorian, pembuatan konsep, pengabstrakan, membandingkan, pencocokan pola, pengintegrasian dan pengulangan untuk menarik / memverifikasi kesimpulan</p>	<p>dikembangkan dengan ditiga tingkat: menarik pemangku kepentingan pariwisata berkelanjutan, mengintegrasikan dalam proses keterlibatan pemangku kepentingan, dan proses penataan.</p>	
2	<p>Improving tourism policy implementation e The use of hybrid MCDM models. (Chui-Hua Liu, Gwo-Hshung Tzeng, Ming-Huei Lee. 2012).</p>	<p>Rendah mutu pengelolaan kebijakan pariwisata dan evaluasi tingkat pelaksanaan implementasi kebijakan pariwisata dengan pemodelan yang menggunkan pendekatan holistik untuk mengusulkan model perbaikan</p>	<p>Analisis evaluasi dan verifikasi generalisability (Tseng, 2010) serta Metodologi lainnya,yakni longitudinal studi dan wawancara mendalam</p>	<p>Kesenjangan rata-rata antara Tingkat implementasi kebijakan aktual dan yang diinginkan adalah 0,398, yang menunjukkan tingkat implementasi kebijakan pariwisata Taiwan saat ini perlu dijangkau Implikasi dari hasil ini untuk rencana manajemen dan perbaikan telah dinaikkan dan diformulasikan. Konsep dasar yang diterapkan di sini ditemukan dapat dipahami oleh pengambil keputusan, dan perhitungan untuk Teknik yang dibutuhkan sangat mudah dan sederhana, melalui penggunaan Program Excel Yang terpenting, temuannya bisa berkurang Kekhawatiran terkait dengan rencana induk wisata yang jarang diimplementasikan atau yang tidak bisa dijalankan di dunia nyata dan menekankan tujuan pembangunan</p>	<p>Menghasilkan Model yang aman bagi lingkungan, lingkungan industri, lingkungan sosio-ekonomi dan sumber daya pariwisata.</p>



				berkelanjutan.	
3	<p>Factors affecting tourism policy implementation: A conceptual framework and a case study in China (Dan Wang, John Ap. 2013)</p>	<p>Mengambarkan pelaksanaan kebijakan pariwisata dan menggambarkan faktor yang mempengaruhi kerangka kerja implementasi kebijakan pariwisata di tingkat lokal di China</p>	<p>Metode menggunakan analisis kualitatif dengan proses interaktif dengan mencari data asli atau data kode didasarkan pada suara orang-orang yang berbagi pengalaman dan tidak ada suara seseorang istimewa karena pendapat orang dalam adalah kepentingan ini studi. Selain itu, informan diizinkan untuk menyuarakan pandangan yang berbeda. Akhirnya, serangkaian prosedur diambil untuk memastikan 'kepercayaan' (Lincoln & Guba, 1985) dari temuan termasuk triangulasi data, pengecekan anggota (yaitu mengirim awal hasil untuk konfirmasi yang diwawancarai), dan dokumentasi yang sistematis dari data mentah dan proses analisis data.</p>	<p>Efektivitas implementasi kebijakan pariwisata tergantung pada koordinasi dan kerja sama TAO setempat dengan organisasi pemerintah lainnya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari sisi politik, sosial dan ekonomi lingkungan. Ditemukan empat faktor diantaranya: lingkungan makro ekonomi dan sosial, pengaturan kelembagaan, hubungan antar organisasi (IOR) dan struktur koordinasi antar organisasi (IOC); dan kelompok kepentingan berpengaruh di implementasi kebijakan pariwisata.</p>	<p>Menyoroti konsep dan teori yang terkait implementasi Kebijakan pariwisata. Ini juga membahas beberapa solusi yang dapat memperkaya kebijakan pariwisata sastra dalam konteks Asia dan negara berkembang.</p>
4	<p>Implementing integrated rural tourism: An event-based approach. (Emese Panyik, Carlos Costa, Tamara Rátz.2011)</p>	<p>Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan daerah semakin mendapat perhatian sebagai pendekatan alternatif untuk pembangunan pedesaan di Uni Eropa (UE), terutama dalam konteksnya sektor pelengkap pertanian seperti pariwisata. Dengan pertanyaan; bagaimana sisi penawaran aktor, khususnya penyelenggara dan penyedia layanan pariwisata peserta memandang organisasi dan proses manajemen acara dalam hal keberhasilan dan kegagalan dan apakah ada</p>	<p>Menggunakan metode campuran pendekatan yang digunakan. Menggabungkan beberapa metode memungkinkan untuk triangulasi hasil dengan memanfaatkan kekuatan baik metode kualitatif maupun kuantitatif dalam satu studi. Secara khusus, komponen pertama (kualitatif) menginformasikan yang kedua (kuantitatif) komponen dalam desain eksplorasi sekuensial (Creswell, Plano Clark, Gutmann, & Hanson, 2003).</p>	<p>Dari sisi tawar actor Pimpinan/Menejer Local Action Groups(LAG/) mampu menyediakan layanan dengan memetakan sumber daya pariwisata yang tersembunyi, melakukan pendekatan dan menargetkan turis atau wisatawan. Dengan faktor yang mempengaruhi membutuhkan kontribusi, dan kerjasama antara pemangku kepentingan nasional, regional dan lokal dukungan keuangan tingkat nasional, koordinasi regional dan lokal Implementasi.</p>	<p>menyoroti implementasi kepariwisataan oleh kelompok lokal yang berperan penting dalam manajemen kepariwisataan dengan pemangku kepentingan dalam menyediakan layanan kepariwisataan dengan penyelenggaraan event kepariwisataan lokal dari aspek bisnis dan pemasaran</p>



		perbedaan dalam pandangan mereka? Kedua, faktor mana yang menentukan keberhasilan acara berbasis pendekatan ke IRT?			
5	Tourism innovation policy: Implementation and outcomes (Isabel Rodríguez , Allan M. Williams, C. Michael Hall. 2014)	Implementasi kebijakan inovasi pariwisata melalui analisis Program Kelompok Usaha Inovatif Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) melalui kolaborasi <i>bottom up bottom-up</i> dalam kelompok. Fokusnya pada tiga isu utama: proses implementasi kebijakan, jenis inovasi yang muncul, dan hasil dan hambatan.	metode penelitian kualitatif deskripsi dengan wawancara terstruktur wawancara semi-terstruktur, melalui Skype Rekaman wawancara ditranskripsi dan dianalisis secara kualitatif menggunakan proses kodifikasi terbuka dan aksial (Strauss & Corbin, 1990)	Pada tataran implementasi Kebijakan inovasi Partisipasi aktor lokal tidak merata, dan tidak memiliki komitmen, sehingga kontradiksi dalam Model implementasi berdampak pada dengan ditarik dana pusat. Ini adalah kelemahan fatal mengingat adanya hubungan antar kompleks antar komponen konstitutif produk atau pengalaman wisata.	Terletak pada evaluasi monografi dari program inovasi pariwisata, yang melibatkan wawancara dan analisis dokumenter pada tingkat kerangka kebijakan, dan meninjau siklus dari beberapa program.
6	Tourism development after the implementation of sustainable strategies in Neamt County (Stefania Bodosca , Dan Mihnea Diaconescu. 2015)	Mengidentifikasi tantangan yang menghambat perkembangan warisan budaya Neamt County dan untuk mendukung lingkungan global, target pembangunan dan berbagai peluang strategis telah diidentifikasi untuk perbaikan wilayah	Penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan bantuan wawancara, observasi dan study dokumentasi kunci pemangku kepentingan dan anggota masyarakat dan serta sebuah survei tentang bagaimana pemulihan harus dilakukan lebih lanjut.	Prinsipnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan menjaga keseimbangan antara keduanya anggota masyarakat dan pengambil keputusan politik dengan pendekatan transversal	Penelitian ini lebih memfokuskan pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yakni diskusi masyarakat dan keterlibatannya dalam pelestarian dan integrasi warisan budaya
7	Tourism policy and governance: Quo vadis? (Marion Joppe.2017)	Bagaimana pesatnya perkembangan kepariwisataan perlu Kebijakan Kepariwisata dan tata kelola yang dilakukan dengan memperhatikan kepentingan taun rumah/masyarakat setempat	Penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif	Agenda neoliberal dan globalisasi telah di terima secara signifikan dan meningkatkan resistensi seiring dengan pergeseran nilai konsumen dengan perubahan radikal dalam tatanan dunia, demografi dan pandangan dunia.	Pengembangan pariwisata dari fenomena massa yang berorientasi volume dimana persaingan juga sering didasarkan pada harga ke model berdasarkan nilai, pengalaman yang berarti dan dimana komunitas tuan rumah dan lingkungan mendapatkan banyak manfaat.



8	Governance of Sustainable Tourism in a Vast Area Surrounding a National Park (Graziella Benedetto, Donatella Carbonib, Gian Luigi Corintoc.2016)	Taman Nasional Asinara menunjukkan keunikan yang terletak di tempat kecil dan kecil pulau yang tidak dihuni, sangat menarik untuk memikirkan kembali pentingnya tata kelola yang kolaboratif, dibandingkan dengan kebijakan top-down tradisional yang biasanya diadopsi di kawasan lindung. Studi kasus ini menggambarkan peluang dan kesulitan yang harus dihadapi oleh agen pengelola dan, di saat bersamaan, tidak bisa dihindari, jika berhasil menjalankan pemerintahan keberlanjutan yang pada akhirnya bisa juga menjadi motor ekonomi lingkungan sekitar.	Penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dengan mengumpulkan informasi dan data, sesuai dengan teori grounding yang disebut untuk menggambarkan kerangka analisis dari berbagai sumber seperti pengamatan pribadi terhadap bukti, proyek sebelumnya, berita dari media, dan wawancara langsung kepada pemangku kepentingan.	Keharusan untuk mengubah kebijakan penguasaan sumber daya alam di tingkat lokal kemampuan hubungan pemerintahan antar pelaku yang menargetkan tujuan yang berbeda, termasuk keharusan untuk memiliki kolaborasi basis agen berkomitmen yang lebih besar.	Penelitian ini tentang kebijakan dan tata kelola pariwisata pada saat pariwisata meningkat pesat dan ancamannya overtourism dimana komunitas tuan rumah dan lingkungan mendapatkan banyak manfaat
9	Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. (Agustina Pallewa, 2016).	implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara dan menemukan faktor pendukung dan penghambat.	Teknik pengumpulan data dilakukan secara <i>triangulasi</i> (gabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis data dilakukan secara induktif.	Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata perlu dilakukan dengan komunikasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait rencana kebijakan pariwisata, sehingga kordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan pariwisata dapat dipahami oleh pemangku kebijakan yang lain.	Fokus Pada Pengembangan yang dipengaruhi oleh sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan perencanaan kebijakan sehubungan dengan pemangku kepentingan
10	Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber daya Lahan Pada Cagar Alam Pegunungan Cycloop (Yaconias Maintindom, Andry Indrawan Dan Hariadi Kartodihardjo, 2006).	1. Menganalisis alternatif pemanfaatan yang optimal terhadap Kawasan Konservasi CAPC. 2. Mengetahui sumber mata air dan nilai ekonomi. 3. Menyusun strategi pengembangan CAPC.	teknik menggunakan metode survei yang bertujuan mengumpulkan data dari sejumlah variabel pada kelompok masyarakat melalui wawancara secara bebas terstruktur	implementasi kebijakan pembangunan konservasi Kabupaten dan Kota Jayapura memperlihatkan dua hal. <i>Pertama</i> , lemahnya kemampuan daerah dalam mengenali permasalahan pokok pengelolaan kawasan konservasi sehingga tidak ada prioritas kebijakan	berfokus pada pemanfaatan kawasan, sumber daya alam dan nilai ekonomi dan strategi pengembangan



				<p>untuk penyelesaiannya.</p> <p>Kedua, adanya perbedaan kekuasaan antara pengambil kebijakan dalam proses pengambilan keputusan.</p>	
11	<p>Implementasi Kebijakan Model Kampung Konservasi Taman Nasional (Ginung Pratidina, 2014)</p>	<p>mengetahui implementasi kebijakan model kampung konversi Taman Nasional Gunung Halimun Salak dalam peningkatan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>penelitian menggunakan studi partisipasi aksesoris, dimana data didapatkan dengan tujuan menemukan masalah yang mendangantindakan baru untuk memecahkan masalah, dan memperbaiki situasi kerja.</p>	<p>Program Model kampung Konservasi meliputi tiga kegiatan yaitu restorasi, rehabilitasi, observasi secara partisipatoris dan peningkatan pendapatan masyarakat.</p>	<p>Penelitian ini lebih fokus pada pengembangan kampung konservasi</p>
12	<p>Kajian Strategis Pengembangan Potensi Ekowisata Di Lembah Baliem Sebagai Suatu Alternatif Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan (Boni Asso, Ib Adnyana Manuaba dan I Nyoman Sunarta, 2007).</p>	<p>Mengetahui potensi pengembangan ekowisata, kendala pengembangan ekowisata, dan strategi pengembangan sumber daya ekowisata yang terdapat di Lembah Baliem.</p>	<p>Teknik observasi langsung melalui pengamatan dan pencatatan potensi yang tampak di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab secara informal, atau wawancara langsung dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, laporan ilmiah, dan arsip-arsip resmi, serta media elektronik.</p>	<p>Lembah Baliem memiliki potensi sumber daya ekowisata yang cukup bervariasi serta alami, namun belum memberikan manfaat yang berarti terhadap kehidupan masyarakat lokal. Keterpaduan dalam mengembangkan sumber daya alam perlu dipupuk guna mencapai sasaran pembangunan yang efisien dan efektif serta optimal. Nyatanya pembangunan masih dilakukan secara sektoral sehingga pencapaian sasaran pembangunan juga tidak begitu optimal. Pengembangan ekowisata secara menyeluruh tertumpu pada dinas pariwisata daerah, sementara idealnya pengembangan pariwisata melibatkan semua elemen terkait, baik pemerintah maupun swasta.</p>	<p>Penelitian ini Lebih pada untuk mengetahui dan mengembangkan ekowisata.</p>
13	<p>Kebijakan Pariwisata Dan Manajemen Untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Danau Engure Das Area (Criks Leitls, 2011).</p>	<p>Pembangunan berkelanjutan dan meninjau kegiatan pejabat, pengusaha dan LSM sehubungan dengan kemungkinan manfaat dan atau hambatan untuk implementasi kebijakan. mengusulkan</p>	<p>Teknik observasi dan wawancara terstruktur dengan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif untuk dapat memberi kontribusi.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya dukungan pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan di Latvia sehingga dibutuhkan sumber daya pariwisata yang dapat memfasilitasi</p>	<p>Lebih fokus pada pembangunan pembangunan dari aspek birokrasi dan hambatan dalam implementasi dalam pengelolaan lingkungan</p>



		rekomendasi manajemen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.		pemulihan dan mengurangi beban sumber daya alam, yakni 1) memfasilitasi pelestarian dan penggunaan yang wajar keanekaragaman biologis dan kawasan lindung, 2) mempromosikan inklusi kawasan lindung, 3) mendorong partisipasi masyarakat, 4) memfasilitasi pengembangan pendidikan lingkungan dan mendorong pendidikan, 5) mendukung pembangunan berkelanjutan dari environment alami.	
14	Implementasi Kebijakan Pelarangan Penambangan di Kawasan Karst Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Giri sekar Kecamatan Penggang, Kabupaten Gunung Kidul) (Wuspada, 2012).	implementasi Kebijakan Pelarangan Penambangan di Kawasan Karst Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong dan Desa Giri sekar Kecamatan Penggang, Kabupaten Gunung Kidul).	Teknik Penelitian dengan observasi dan wawancara mendalam dengan para informen.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tegas dengan tidak mengeluarkan ijin usaha penambangan akan tetapi tidak tegas dalam memberi teguran terhadap penambang batu gamping maka perlu rekomendasi kebijakan yang mengakomodir masyarakat untuk dapat mengemas kembali kawasan karts sebagai daerah wisata dalam karts, sehingga tidak merusak lingkungan namun tetap memberi lapangan kerja bagi masyarakat tanpa harus melakukan penambangan.	Lebih fokus pada pelestarian kawasan tambangan untuk pelestarian kembali lingkungan serta pemulihan lingkungan yang rusak.
15	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan tentang konservasi kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (Study di Badan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Balik Papan). (Saudah, 2006).	Mendesripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan tentang konservasi kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (Study di Badan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Balik Papan).	Metode pendekatan yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan interview bebas dengan penyajian data deskriptif naratif.	Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengelola kawasan hutan lindung Oleh karena itu, segala bentuk pembinaan dan fasilitas yang akan dilakukan Pemerintah Kota harus benar-benar mempertimbangkan kondisi khas dan riil keanekaragaman hayati yang ada di kawasan dan hendaknya Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan	Lebih memfokuskan pada Pelaksanaan untuk kebijakan yang lebih besar tentang perlindungan kawasan sungai.



				<p>lindung pada khususnya dan masyarakat kota Balikpapan pada umumnya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilai yang ada di sekitar kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.</p>
--	--	--	--	--

2.2. Kebijakan Publik

2.2.1. Arti Kebijakan Publik

Ada kalanya kebijakan negara itu dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan. Dilaksanakan atau tidak suatu kebijakan negara dan masyarakat sebagai pilihan yang dilakukan pemerintah, menyimak arti kebijakan negara tersebut merujukkan apapun yang dipilih pemerintah apakah kebijakan negara itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, mempunyai tujuan tertentu. Dengan demikian negara mempunyai peran penting terhadap kebijakan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut James E. Anderson (dalam Islamy, 2000:19) menyatakan :

Kebijakan negara adalah kebijakan yang dikembangkan oleh Badan-badan dan Pejabat-pejabat Pemerintah. Implementasi pengertian kebijakan negara tersebut adalah: (1) Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. (2) bahwa kebijakan negara itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah. (3) bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu. (4) bahwa kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu dan (5) kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Sementara menurut David Easton (dalam Islamy, 2000:19) memberikan arti kebijakan negara sebagai “Pengalokasian nilai-nilai secara paksa (syah), kepada seluruh anggota masyarakat” dari definisi tersebut memberikan makna bahwa pemerintah yang syah saja yang dapat memaksa pelaksanaan kebijakan



negara itu atau tidak melaksanakan kebijakan negara yang berbentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Dari pengertian diatas, bahwa kebijakan negara merupakan serangkaian yang ditetapkan dan dilakukan atau tidak dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Suatu kebijakan negara yang dibuat bukan hanya untuk kepentingan politik berlaku, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan kebijakan negara bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berasal dari kata bahasa latin Tachjan (2008:23) yakni "*Implementum*" dari asal kata "*Impere*" dan "*Plere*" kata "*implere*" dengan maksud "*to fill up*" : "*to fill in*", yang artinya mengisi, sedangkan secara etimologi menurut Tachjan (2008:24) bahwa implementasi diartikan sebagai suatu kondisi yang saling berkaitan dalam penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana dan mendapatkan hasil.

Dunn (dalam Tachjan 2008:26) bahwa "kebijakan dibedakan sebagai masukan dan proses yakni masukan dapat berupa sumber daya serta proses berhubungan dengan aktifitas administratif, organisasi yang berakumulasi pada hasil dan dampak dari suatu kebijakan".

Tachjan (2008:26) bahwa "fungsi dan tujuan implementasi adalah menserasikan suatu bentuk hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan politik yang dapat diperoleh sebagai *outcome* atau hasil akhir dari aktifitas yang dilakukan pemerintah". Sehingga implementasi dapat disebut sebagai "*policy delivery system*", dengan arti bahwa sebagai sistem penyampaian kebijakan yang terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang dikehendaki oleh politik.



Dwijowijoto (2003:158) bahwa implementasi merupakan sebuah prinsip untuk mencapai tujuan, oleh karena itu dalam mencapai tujuan digunakan prinsip intervensi. Oleh karena itu implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan atau aksi dengan menggunakan intervensi.

Mazmanian dan Sabatier 1983 (dalam Dwijowijoto 2003:161) bahwa menggambarkan bagaimana melakukan intervensi dan implementasi kebijakan dalam sebuah langkah berurutan yakni identifikasi masalah yang mesti diintervensi selanjutnya menegaskan tujuan yang akan dicapai serta merancang struktur proses implementasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan memerlukan unsur-unsur yang terlibat agar langkah implementasi dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang mesti kita harapkan.

Implementasi kebijakan Grindle (Subarsono, 2005) bahwa dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel isi kebijakan (*Contents of Policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*). Variabel isi meliputi pada kepentingan kelompok sasaran atau *target groups*; manfaat yang diterima; letak sebuah program; kejelasan implementasinya; serta program didukung sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan meliputi; seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; karakteristik institusi yang berkuasa; tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran.

Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikut:



Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Policy Goals

Goals achieved?

Action Programs and Individual Projects Designed and Funded

Programs Delivered as designed?

Implementing Activities Influenced by:

a. *Content of Policy*

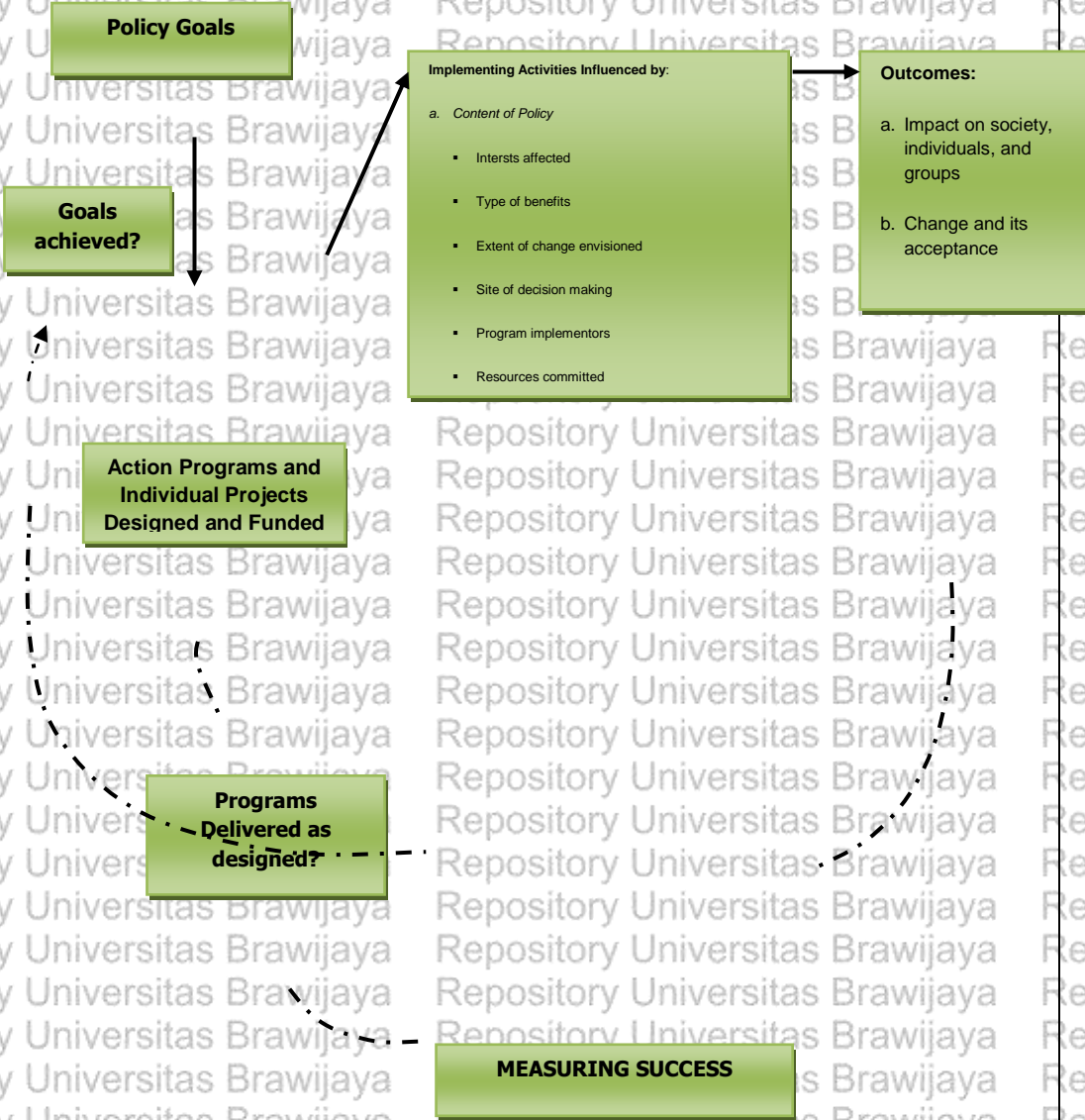
- Interests affected
- Type of benefits
- Extent of change envisioned
- Site of decision making
- Program implementors
- Resources committed

Outcomes:

a. Impact on society, individuals, and groups

b. Change and its acceptance

MEASURING SUCCESS





Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle.

Sumber: Merilee S. Grindle 1980.

Selanjut Rianty (2009) mempertegas model implementasi kebijakan grindle keunikannya pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan terutama yang berkenaan dengan pelaku/implementor, target kebijakan atau penerima kebijakan dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara implementor.

Smith (1977) dan Abdullah (1988) dalam Tachjan (2008:26) bahwa dalam implementasi unsur-unsur yang harus mutlak ada yakni Unsur pelaksana (*implementor*), Unsur program yang mesti dilakukan (*Program*) serta Unsur sasaran (*Target Groups*).

Unsur pelaksana menurut Sharkansky (1975) dan Ripley & Franklin (1986) dalam Tachjan (2008:26) bahwa pihak yang paling utama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah pemerintah yang merupakan unit birokrasi dan unit administratif, kemudian Smith dalam Tachjan (2008:27) menyebutkan dengan istilah "*implementing organization*" dengan pemahaman bahwa birokrasi pemerintah yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Untuk mengetahui keberhasilan dari kebijakan publik, maka kebijakan publik itu perlu diimplementasikan. Menurut Meter dan Horn (dalam Wibawa 1992:14) mendefinisikan bahwa: "Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik atau swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan". Definisi tersebut menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Meter dan Horn menekankan bahwa "tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan



sebelumnya, tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”.

Implementasi kebijakan Publik merupakan rangkaian proses dari suatu kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan negara perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin menurut Winarno (2002:101) karena “implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik.” Sejalan dengan hal tersebut, model implementasi kebijakan negara menurut Sabatier dan Mazmanian (dalam Wibawa 1992:31) menyatakan “ada dua model implementasi kebijakan, model pertama adalah *Top Down* dan model kedua adalah *Bottom Up*.

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar dapat dilihat hasil riil dari kebijakan tersebut.

Selanjutnya Winarno (2002:102) mengatakan implementasi kebijakan adalah: Merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil.

Sementara menurut Wibawa (1992:15) tujuan implementasi kebijakan adalah “untuk menetapkan arah agar tujuan-tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah”. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan perlu diciptakan sistem pelaksanaan kebijakan sedemikian rupa agar implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu implementasi kebijakan perlu diterjemahkan kedalam program-program yang nyata.

Proses implementasi kebijakan tentunya ada beberapa yang dapat mendorong atau menghambat implementasi. Dengan demikian, implementasi efektif memerlukan adanya seperangkat kondisi optimal, yaitu kondisi dimana implementor harus memiliki keahlian secara profesional di dalam pelaksanaan



suatu kegiatan. Tidak mungkin implementasi bisa dilakukan jika kondisinya kurang optimal atau kurang ideal.

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan, atau dengan kata lain penerapan perencanaan ke dalam praktek. Namun dalam hal ini, tidak semua program yang di implementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif.

Salah satu faktor yang mempengaruhinya menurut Walter Williams (dalam Wahab 1997:61) disebut sebagai *Implementation Capacity* dari organisasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. *Implementation Capacity* tidak lain adalah kemampuan suatu organisasi / aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*poling decesion*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Van Meter dan Horn dalam Winarno (2012:158) bahwa model dasar dalam kebijakan publik mempunyai enam variabel yang saling keterkaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja, bahwa ke enam variabel ini tidak hanya menentukan hubungan variabel keterikatan akan tetapi hubungan variabel bebas. Variabel-variabel yang saling mempengaruhi tersebut yakni (1) Standar sasaran kebijakan, (2) Sumber daya, (3) Karakter Organisasi Pelaksana, (4) Komunikasi antar organisasi terkait dan akan aktifitas pelaksanaan, (5) Sikap/kerakter pelaksana, (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

George C Edwards dalam Winarno (2012:177-206) bahwa model implementasi menurut Edwards dipengaruhi oleh *Communication, Ressourcer, Disposition* dan *Bureauoratic structure* dengan demikian jelas bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat faktor yakni 1) komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi dan 4) Struktur Birokrasi.



Smith (1973) dalam Tachjan (2008:37) bahwa setidaknya ada 4 variabel yang diperhatikan dan tidak berdiri sendiri dan justru salah berinteraksi satu sama lain dan saling mempengaruhi hubungan timbal balik. Keempat variabel tersebut yakni (1) kebijakan yang ideal *Idealised Policy* yaitu pola interaksi kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan, (2) kelompok sasaran/*target groups* yaitu orang yang langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan harus mengadopsi pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, (3) *Implementing Organization* yaitu badan-badan pelaksana serta yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan, (4) *Environmental factor* yaitu unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yakni aspek budaya, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek politik.

Warwick (1979) dalam Tachjan (2008:51) Bahwa model yang dikembangkan dikenal dengan "*Transactional Model*" model ini memandang bahwa pentingnya perencanaan dalam implementasi sehingga Warwick memandang perlu adanya (1) tahapan perencanaan dan (2) tahapan implementasi program dan proyek-proyek pembangunan. Warwick mengemukakan bahwa dalam dalam tahap perencanaan memerlukan (1) kemampuan staf perencanaan; (2) kemampuan organisasi perencanaan; (3) kemampuan teknis analisis; (4) mutu informasi yang dibutuhkan. Sedangkan tahapan implementasi program dan proyek-proyek pembangunan meliputi dua faktor yakni 1) faktor pendorong yang terdiri dari; a) *commitment of political leader*; b) *organization capacity*; c) *the commitment of implementation*; d) Dukungan dari kelompok yang berkepentingan, dan 2) faktor penghambat, yakni; a) banyaknya pemain (*actors*); b) loyalitas ganda; c) Kerumitan yang melekat pada proyek; d) Jenjang keputusan terlalu banyak; e) waktu dan perubahan pemimpin.

Menurut Nugroho (2009) implementasi kebijakan bahwa "cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya" dimana capaian tujuan tersebut "tidak lebih, ataupun kurang" untuk itu ada dua langkah dalam



mengimplementasikan kebijakan yakni langsung implementasi dalam bentuk program dan formulasi kebijakan derivat (turunan dari kebijakan tersebut). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2. Sekuensi Implementasi Kebijakan

Sumber: Riant Nugroho. 2009

2.2.3. Kebijakan Ekowisata

Wisata Alam dengan istilah “ekowisata” dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke suatu tempat dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, dimana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Para pelaku dan pakar dibidang ekowisata sepakat untuk menekankan bahwa pola ekowisata sebaiknya meminimalkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan budaya setempat dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi



masyarakat setempat dan nilai konservasi. Prinsip-prinsip pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dan konservasi yakni keberlanjutan ekowisata dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (prinsip konservasi dan partisipasi masyarakat) Ekowisata yang dikembangkan di kawasan konservasi adalah ekowisata yang "hijau dan adil" (*Green & Fair*) untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan konservasi, yaitu sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan yang dilindungi, berbagi manfaat dari upaya konservasi secara layak (terutama bagi masyarakat yang lahan dan sumberdaya alamnya berada di kawasan yang dilindungi), dan berkontribusi pada konservasi dengan meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap perlindungan bentang lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis dan nilai sejarah yang tinggi.

Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat pada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada yang lebih kompleks. Pengembangan meliputi kegiatan mengaktifkan sumberdaya, memperluas kesempatan mengakui keberhasilan dan mengintegrasikan kemajuan (Ramly, 2007). Lebih lanjut Ramly (2007) menyatakan bahwa, dari segi kualitatif, pengembangan berfungsi sebagai upaya peningkatan yang meliputi penyempurnaan program kearah yang lebih baik. Dimana hal-hal yang dikembangkan meliputi aktivitas manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Model-model perencanaan telah dikembangkan, masing-masing merefleksikan nilai-nilai yang berbeda, aumsi dan keyakinan tentang hakekat dari dunia perencanaan dilakukan. Beberapa model perencanaan diantaranya perencanaan sinoptik, perencanaan bertahap (*incremental*), *mixed scanning* dan perencanaan transaktif (Mitchell, Setiawan dan Rahmi, 1997).



Implementasi pembangunan *top down* telah menyebabkan proporsi dan konstelasi peranan tiga *stakeholder* pembangunan menjadi timpang. Negara dan swasta menjadi sangat dominan sedangkan masyarakat berada pada posisi marjinal. Bertolak dari hal tersebut diperlukan sebuah pembangunan alternatif yang lebih berorientasi pada usaha menghilangkan marginalisasi dan memperkuat sektor masyarakat. Dalam hal ini maka pembangunan yang berbasis masyarakat (*community based development*) menjadi sangat relevan untuk diimplementasikan (Suparjan dan Suyatno, 2003). Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat salah satunya menggunakan metode 7 (tujuh) langkah perencanaan (*seven magic step*) yang meliputi tahap definisi masalah, tujuan, analisis kondisi, alternatif kebijakan, pilihan alternatif, implementasi dan pemantauan (Hadi, 2005).

Boothroyd (1991), *the nature of each seven magic step can be elaborated as (1) define your palnning task, (2) Identify your goals, (3) appraise the relevant fact, (4) generate many action possibilities, (5) package the possibilities in terms of compatible and mutually options, (6) Assess the pros and cons of each option and (7) decide on an option to adopt (or to recommend) using culturally appropriate procedures.*

Kualitas lingkungan menurun pada dasarnya dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu meningkatnya kebutuhan ekonomi (*economic requirement*) dan gagalnya kebijakan yang diterapkan (*policy failure*) (Ramly, 2007). Peningkatan kebutuhan yang tak terbatas sering membuat tekanan yang besar terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada. Lingkungan masih dipandang sebagai instrumen ekonomi, bukan sebagai fungsi intrinsiknya. Akar masalah kerusakan lingkungan selama ini berasal dari kesalahan cara pandang manusia tentang dirinya, alam dan hubungan manusia dengan alam. Oleh karena itu, percepatan pembangunan ekonomi selayaknya diimbangi dengan ketersediaan sumber daya dan lingkungan yang lestari. Penduduk lokal akan memiliki insentif konservasi



lingkungan apabila ia dilibatkan dalam jasa-jasa ekowisata, pemberian informasi dan memperoleh benefit yang pantas (Nugroho, 2004).

Fandeli dan Mukhlison (2000), untuk dapat melihat sisi positif dan sisi negatif dari pengembangan pariwisata terlebih dahulu perlu diperhatikan beberapa hal bagi setiap perencana wisata karena hal ini akan menyangkut kelangsungan pertumbuhan kawasan wisata dan juga tentunya akan menyangkut kelangsungan para pelaku wisata yang berada dalam kawasan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: a) Volume atau Jumlah dari wisatawan, b) Karakteristik dari wisatawan dengan berbagai keinginan untuk berwisata, c) Type dari aktifitas wisata yang dapat ditawarkan pada sebuah kawasan, d) Wisata beserta dengan variasi wisata yang mungkin dilakukan, e) Struktur masyarakat yang berada pada kawasan wisata tersebut, f) Kondisi lingkungan sekitar yang berada pada kawasan tersebut, g) Kemampuan masyarakat untuk dapat mengadaptasi dari perkembangan kepariwisataan.

Ruang lingkup tindakan pemerintah dalam kepariwisataan dewasa ini bervariasi menurut kepentingan dan keterlibatan negara dalam pariwisata dan kondisi yang terjadi dalam negara itu (politik, ekonomi, perundang-undangan, pengembangan sosial ekonomi, tingkat perkembangan pariwisata, tingkat kematangan badan usaha swasta serta kemampuan keuangan).

Kompleksnya industri pariwisata menuntut suatu kebijakan hukum yang mantap untuk melandasi pertumbuhan pariwisata yang teratur dan terus meningkat, untuk menentukan bagian modal tertentu baik dari dalam maupun luar negeri dan untuk memantapkan suasana yang baik bagi pengarah investasi dalam sektor pariwisata. Tambahan pula, perundang-undangan dan peraturan pariwisata harus mengatur rasa kerja dan manajemen badan usaha pariwisata, termasuk pula insentif keuangan dan perpajakan, organisasi pariwisata dalam negeri, tata guna tanah dan sumber-sumber alam lainnya bagi perkembangan



pariwisata, penciptaan permintaan wisata dan urusan bisnis yang kegiatannya merupakan penunjang pariwisata.

Kebijaksanaan kepariwisataan menurut **Nyoman S. Pendit** (1990:135) dapat dirumuskan sebagai berikut: "Segala sesuatu tindakan instansi pemerintah dan badan atau organisasi masyarakat yang mempengaruhi kehidupan kepariwisataan itu sendiri".

Adapun langkah-langkah yang diambil pemerintah sehubungan dengan kebijaksanaan pariwisata menurut Nyoman S. Pendit (1990:145-148) diantaranya adalah dalam bidang politik meliputi: a). Politik kebudayaan, b). Politik sosial, c). Politik dalam negeri, d). Politik luar negeri

Kebijaksanaan pariwisata dalam bidang politik diatas adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dalam hal politik kebudayaan yang dihubungkan dengan industri pariwisata pada prinsipnya tiada lain adalah perlindungan, pemeliharaan, bimbingan serta dorongan terhadap kekayaan kebudayaan dan hasil cipta kesenian nasional yang ditonjolkan sebagai puncak karya peradaban bangsa.

Selanjutnya yang dimaksud politik sosial pemerintah dalam hubungannya dengan pariwisata adalah langkah-langkah pemerintah untuk mewujudkan peraturan-peraturan dan keadaan yang diarahkan kepada perbaikan sosial bagi rakyat pekerja, seperti jam kerja, gaji, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, hak berlibur dan memperoleh rekreasi serta hal lain yang kesemuanya itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal kepariwisataan, terlebih pariwisata domestik.

Hubungannya dengan pariwisata, dua faktor penting yang harus mendapat perhatian pemerintah dalam bidang sosial politik yaitu :

a) Faktor yang menyangkut undang-undang dan peraturan yang ada hubungannya dengan jam kerja dan gaji bagi kaum pekerja dalam negeri tersebut yang memberi efek terhadap industri pariwisata.



b) Faktor yang menyangkut pemberian libur dengan biaya perjalanan yang berarti pula dapat memajukan pariwisata.

Hubungan politik dalam negeri suatu pemerintah dilihat dari kaca mata pariwisata adalah adanya undang-undang dan peraturan yang menjamin tumbuhnya industri ini dan keamanan bergeraknya wisatawan. Sedangkan Peranan pariwisata dalam hubungan politik luar negeri suatu pemerintah adalah sangat penting, tidak saja di lihat dari segi ekonominya tetapi juga politis dan kulturalnya yang sumbangannya adalah positif bagi saling pengertian kerja sama dan perdamaian.

Hubungan politik luar negeri suatu pemerintah, hanya ada dua alternatif bagi pertumbuhan industri pariwisata di negeri itu, yaitu politik bersahabat atau politik bermusuhan dengan negara lainnya, lebih-lebih negara tetangga dari mana sebenarnya dapat diharapkan kunjungan persahabatan antara rakyat negara yang bertetangga.

Demikianlah bahwa intervensi negara dalam bidang pariwisata harus diperluas dan terus ditambah dengan harapan utama untuk memutuskan dan merencanakan pertumpuhan pariwisata dan membuka jalan untuk mencapai tujuan-tujuan utama dari kebijakan pariwisata nasional.

Perekonomian negara yang cenderung aktif berpartisipasi dalam bidang pariwisata secara normal dapat mengikuti setiap keuntungan nasional dari masing-masing proyek baik itu besar maupun kecil yang dicapai dari wisatawan.

Negara hendaknya memikirkan hasil-hasil ekonomis kebijakannya bagi industri pariwisata dengan tujuan pokok harus mendatangkan manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan atau perkembangan suatu daerah tertentu yang diperlukan untuk keserasian nasional dari pada hanya sekedar keuntungan cepat dari sesuatu proyek khusus atau bagi unsur-unsur tertentu.

Kebijakan peningkatan dan pengembangan pariwisata yang pada dasarnya kebijaksanaan ini lebih banyak diarahkan dan ditekankan dalam rangka



mengambil langkah-langkah penyelenggaraan beberapa kegiatan yang antara lain meliputi:

- a) Meningkatkan pemahaman seluruh lapisan masyarakat terhadap manfaat pariwisata dalam pembangunan.
- b) Meningkatkan citra dan mutu pelayanan pariwisata nasional.
- c) Meningkatkan penyelenggaraan promosi wisata pariwisata Indonesia di luar negeri.
- d) Memberi pengarahan dan petunjuk dalam pengembangan kepariwisataan dalam ruang lingkup nasional.
- e) Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait, lembaga-lembaga pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta nasional dan organisasi masyarakat untuk menyerasikan langkah dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata di Indonesia.

Fungsi lain yang penting bagi negara dalam pariwisata yaitu mengawasi standar dan kualitas jasa-jasa wisata baik melalui Organisasi Pariwisata Nasional maupun departemen yang lain. Hal ini berkaitan erat dengan tugas negara untuk mengamati bahwa citra pariwisata negaranya meningkat maju. Perluasan pengawasan yang demikian adalah sebagian dari kebijakan pariwisata nasional yang harus diungkapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum agar berbagai badan usaha pariwisata baik milik negara, swasta dan asing dapat melihat secara jelas tempat mereka berada dan memperbaiki mereka sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dua kata *eco* dan *tourism*, yang ketika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *eko* dan *turisme* atau *eko* dan *wisata*. Makna dasar dari 2 kata tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, *eko* yang dalam bahasa Greek (Yunani) berarti rumah, dan *tourism* yang berarti wisata atau perjalanan. Pengertian selanjutnya oleh beberapa ahli kata *Eco* dapat diartikan sebagai *Ecology* atau *Economy* sehingga dari kedua kata tersebut akan memunculkan makna Wisata ekologis (*Ecological Tourism*) atau Wisata Ekonomi



(*Economic Tourism*) dan hal ini masih terus diperdebatkan oleh para ahli mengenai makna dari kata dasar tersebut (Dirawan, 2003).

Ecotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment and improved the well being of local people (Hadi, 2007). Selanjutnya

Hadi (2007) menyatakan bahwa prinsip-prinsip ekowisata adalah meminimalkan dampak, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya, memberikan pengalaman positif baik kepada turis (*visitors*) maupun penerima (*host*) dan memberikan manfaat dan keberdayaan masyarakat lokal.

Untuk lebih jelas mengenai beberapa pendapat para ahli *ecotourisme*.

World Tourism Organisation (WTO) dan *United Nations Environment Program (UNEP)* menyatakan "*Ecotourism involves traveling to relatively undisturb natural areas with the specific objective of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plants and animals as well as any existing cultural aspect found in those area*"

Selanjutnya, Ziffer (1989) menyatakan "*a form of tourism inspired primary by the natural history of an area , including its indegeniouse cultures, the ecotourist visit underdeveloped areas in the spirit of the appreciation, participation and sensivity*". Namun, pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian alam (*natural area*), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhanbudava bagi masyarakat setempat. Pendekatan lain bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Maksud dari menjamin kelestarian ini seperti halnya tujuan konservasi (UNEP, 1980) sebagai berikut:

- 1) Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan.
- 2) Melindungi keanekaragaman hayati.
- 3) Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.



Menurut *The International Ecotourism Society* atau TIES (1991), ecotourism adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah alami dalam rangka mengkonservasi atau menyelamatkan lingkungan dan memberi penghidupan penduduk lokal. Menurut *World Conservation Union (WCU)*, ecotourism adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah yang lingkungan alamnya masih asli, dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya konservasi, tidak menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi serta menghargai partisipasi penduduk lokal.

Ecotourism adalah sebagian dari *sustainable tourism*. *Sustainable tourism* sektor ekonomi yang lebih luas dari *ecotourism* yang mencakup sektor-sektor pendukung kegiatan *tourism* secara umum. Menurut deklarasi Quebec (hasil pertemuan dari anggota TIES di Quebec, Canada tahun 2002), *Ecotourism* adalah *sustainable tourism* yang secara spesifik memuat upaya-upaya:

- 1) Kontribusi aktif dalam konservasi alam dan budaya
- 2) Partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan dan operasional kegiatan wisata serta meninkamti kesejahteraan.
- 3) Transfer pengetahuan tentang warisan budaya dan alam kepada pengunjung
- 4) Bentuk wisata independen atau kelompok wisata berukuran kecil

Sementara itu WCD (2000) menyatakan bahwa *ecotourism* adalah *sustainable tourism* yang dapat :

- 1) Menjamin partisipasi yang setara, efektif dan aktif dari seluruh stakeholder
- 2) Menjamin partisipasi penduduk lokal menyatakan yess atau no dalam kegiatan pengembangan masyarakat, lahan dan wilayah
- 3) Mengangkat mekanisme penduduk lokal dalam hal kontrol dan pemeliharaan sumberdaya.

Sementara itu Wood (2002) mendefinisikan *ecotourism* sebagai bentuk usaha atau sektor ekonomi wisata alam yang dirumuskan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.



Berdasarkan definisi, konsep atau pengertian di atas, maka dapat disusun definisi baru sebagai berikut: *Ecotourism* adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (Nugroho, 2004) Ekowisata merupakan sebuah istilah baru yang masih sangat sering dibicarakan diberbagai Negara saat ini karena melihat potensi untuk mengembangkan pariwisata baru dan mempromosikan konservasi alam disamping dapat memberikan keuntungan pada masyarakat lokal (Ziffer, 1989) menyatakan bahwa "*Ecotourism no seen as model of development in which natural areas are planned as part of the tourism base and biological resources are clearly liked to social economic sector*".

Pada saat ini ekowisata telah berkembang. Wisata ini tidak hanya sekedar untuk melakukan pengamatan burung, mengendarai kuda, penelusuran jejak hutan belantara, tetapi terkait dengan konsep pelestarian hutan dan penduduk lokal. Ekowisata ini kemudian merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Ekowisata tidak dapat dipisahkan dengan konservasi. Oleh karenanya, ekowisata disebut sebagai bentuk perjalanan wisata bertanggung jawab (Fandeli dan Mukhlison, 2000).

Ekowisata diberi batasan sebagai bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta bagi kelestarian sumberdaya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Lima aspek utama untuk berkembangnya ekowisata adalah: (1) adanya keaslian lingkungan alam dan budaya (2) keberadaan dan daya dukung masyarakat (3) pendidikan dan pengalaman (4) berkelanjutan dan (5) kemampuan manajemen dalam pengelolaan ekowisata (Choy, 1997).



Menurut Damanik dan Weber (2006), potensi kawasan ekowisata di Indonesia sangat besar. Objek tersebut tersebar di darat (dalam kawasan hutan konservasi) maupun di lau (dalam bentuk taman nasional laut). Potensi ekowisata terdiri dari beberapa elemen penawaran wisata yang sering disebut sebagai triple A's yang terdiri dari atraksi, aksesibilitas dan amenitas.

2.3. Lingkungan

Kamus besar Bahasa Indonesia istilah lingkungan dapat diartikan dalam beberapa yakni daerah kawasan; segala sesuatu yang berada diluar organisme, seperti tumbuhan, hewan dan manusia; lingkungan alam adalah (kondisi, kekuatan) sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme; dan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (KBBI,1991)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup adalah semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Borong, (1999) bahwa Lingkungan hidup, dimana lingkungan manusia dan di sekitarnya dan serta, lingkungan tempat organisme dan anorganisme saling berinteraksi dan berkembang.

2.3.1. Kerusakan Lingkungan

Sikap manusia yang memandang lingkungan sebagai bagian dari dirinya patut di apresiasi dengan baik. Dimana sikap tersebut memberi kontribusi yang positif terhadap lingkungan yakni dengan merasa cinta terhadap lingkungan yang memberi kehidupan nyata terhadap hidupnya di bumi. Kini manusia menyadari



bahwa dirinya sedang berada dalam proses kerusakan lingkungan hidupnya. Hutan-hutan yang ditebangnya mengakibatkan banjir, tanah longsor, punahnya berbagai jenis flora dan fauna, adanya hujan asam dan pemanasan global, penggunaan pestisida secara besar-besaran yang menyebabkan keseimbangan alam terganggu.

Masyarakat dunia masih mengandalkan alam dalam mencapai kesejahteraan dirinya. Meadow, et al (dalam Arifin.2001) bahwa "Pembangunan dengan tujuan mengejar pertumbuhan ekonomi telah berdampak pada kerusakan lingkungan dengan mengorbankan generasi mendatang". Lingkungan yang telah tercemar akan berdampak terhadap yakni kerusakan lingkungan. Lingkungan yang telah rusak akan berdampak terhadap kelestarian dan keberlangsungan.

Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam, jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memerhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar (Rahmadi, 2012:184).

Penyebab utama kerusakan lingkungan hidup menurut Emil Salim ada dua yaitu:

1) Pertumbuhan penduduk

Akibat adanya penambahan jumlah penduduk mengakibatkan terjadinya defersifikasi mata pencaharian penduduk dan penambahan kebutuhan penduduknya, maka hal ini berakibat semakin sulitnya pengontrolan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di dalam lingkungan. Salah satu dampak langsung dari pertumbuhan penduduk ini adalah terjadinya kemiskinan.

Adanya kemiskinan ini secara tidak langsung juga memberi sumbangan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Beberapa masalah yang berkaitan antara tingkat kemiskinan dan tingkat kerusakan lingkungan hidup antara lain:

(a) Lahan tempat tinggal penduduk.



Penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan-lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan.

(b) Lapangan pekerjaan

Penduduk miskin tanpa mata pencaharian akan memanfaatkan lingkungan sekitar, sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku. Karena desakan ekonomi, banyak penduduk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memasuki kawasan-kawasan yang sebenarnya dilindungi, apabila tidak dicegah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama menyebabkan kawasan lindung akan berkurang bahkan hilang sama sekali, yang berdampak pada hilangnya fungsi lingkungan (sebagai pemberi jasa lingkungan).

(c) Rendahnya kesadaran lingkungan

Penduduk miskin yang mempunyai tingkat pendidikan rendah akan cenderung mempunyai tingkat pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang juga rendah. Ada kaitan yang erat dan bersifat timbal-balik antara kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Biasanya, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan sebaliknya kemiskinan menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang dapat diraih. Bila pendidikan penduduk rendah maka pemahaman terhadap masalah-masalah lingkungan juga rendah. Dampak selanjutnya, bila pemahaman terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan rendah maka tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang sehat juga rendah bahkan tidak ada.

Soerjani, (1997) Kontek lingkungan adalah sebagai suatu sistem, artinya adalah lingkungan hidup, terdiri atas *sociosystem*, *techosystem* serta



ecosystem yakni bahwa lingkungan terdiri dari lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan. Subsistem lingkungan tersebut memiliki hubungan saling keterkaitan satu sama lain dalam satu kesatuan. Menurut Ramly (2007), bahwa dalam ekosistem atau lingkungan alami yakni keadaan lingkungan, dimana kondisinya tidak terlalu di tempati dominasi manusia secara dominan yang apada akhirnya makhluk hidup yang ada didalamnya, mempunyai ruang untuk hidup wajar dan kesempatan untuk berkembang.

2.3.2. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan

Kaplan dan Manner (2000), menyatakan bahwa lingkungan memberi berpengaruh, terutama terhadap budaya atau sebaliknya budaya, berpengaruh terhadap kondisi lingkungan ini dapat diartikan bahwa keduanya memiliki hubungan kausalitas timbal balik dalam istilah modern disebut *reciprocal causality*.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) adalah penyebab kerusakan lingkungan terbesar. Semakin maju peradaban manusia seiring dengan majunya IPTEK sangat mengubah pandangan manusia. Manusia memandang bahwa lingkungan hidup sebagai obyek, dan bukan bagian dari dirinya secara menyeluruh. Lingkungan tidak lagi dipandang sejajar dengan kehidupan sosial akan tetapi dipandang bahwa lingkungan memiliki fungsional yang lain dan bahwa lingkungan dipandang sebagai objek yang harus di *eksploitasi*.

Pada hal lingkungan harus dipandang sebagai sesuatu yang menjadi subordinasi dari kepentingan kehidupan manusia. Berdasarkan padangan yang demikian perlu kendali lingkungan berdasarkan kehendak untuk bahwa lingkungan alam dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Alam harus dimanfaatkan seoptimal serta semaksimal mungkin, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. IPTEK juga turut berkontribusi mengubah tingkah laku manusia dan pola pikir.

Terjadi pergeseran nilai hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Tingkah



laku yang dipengaruhi kemajuan IPTEK tersebut, memberikan tekanan yang semakin berat pada daya dukung lingkungan.

Wahyuningsih. (2017) yakni hakikat pembangunan pada dasarnya suatu proses yang berkesinambungan, berkesinambungan dari berbagai aspek yang dipandang dari berbagai dimensi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yakni dimensi ekonomi serta sosial dan lingkungan. Menurut Isbandi, (2005) bahwa "Pembangunan yang dilaksanakan selama ini cenderung memanfaatkan sumber daya alam dengan semena-mena, tanpa memperhatikan aspek lingkungan yang ada, akibatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin sering terjadi".

Konsep tentang kawasan-kawasan dilindungi secara keseluruhan telah berkembang secara paralel dengan cagar biosfer. Yang terpenting, hubungan antara konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat lokal-komponen utama pendekatan cagar biosfer-saat ini dikenal sebagai kunci keberhasilan pengelolaan sebagian besar taman nasional, cagar alam dan kawasan konservasi lainnya. Pada Kongres Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Sedunia Ke Empat di Caracas, Venezuela pada bulan Februari 1992, para perencana dan pengelola kawasan konservasi dunia mengadopsi gagasan-gagasan (keterlibatan masyarakat, perpaduan antara konservasi dan pembangunan, pentingnya menjalin kerjasama internasional) yang merupakan aspek penting dari cagar biosfer.

Wahyuningsih. (2017) bahwa "*Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah kelanjutan dari global goals *Millenium Development Goals (MDGs)* yang akan berakhir tahun 2015. Secara formal, SDGs didiskusikan pertama kali pada *United Nations Conference on Sustainable Development* yang diadakan di Rio de Janeiro bulan Juni 2012. Dokumen SDGs disahkan pada KTT Pembangunan berkelanjutan PBB yang berlangsung di New York tanggal 25-27 September 2015. Dalam KTT tersebut ditetapkan bahwa SDGs akan mulai diberlakukan



melalui lembaga kemasyarakatan yang ada. Pendidikan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fakta kerusakan lingkungan yang sudah terjadi dan pentingnya menjaga lingkungan yang ada agar tidak terjadi kerusakan yang serupa, karena kerusakan lingkungan ini juga akan berdampak pada manusia itu sendiri. Kepada para pengusaha juga perlu diberikan pengertian tentang lingkungan hidup, agar mereka tidak membuang limbah sisa industri yang berbahaya di lingkungan. Limbah industri yang berbahaya dapat mencemari tanah, air, bahkan udara jika industri tersebut menghasilkan asap. Untuk itu kepada para pengusaha itu perlu diberikan pembinaan tentang cara mengolah atau menyaring limbah sisa produksi mereka, sebelum dibuang ke lingkungan. Dalam pemilihan tempat industri pun juga harus memperhatikan etika lingkungan agar tidak mencemari air tanah, udara sekitar perkampungan, maupun tanah pertanian penduduk.

Upaya pendekatan melalui pendidikan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperoleh pengertian dasar tentang lingkungan hidup, permasalahannya serta peran dan tanggung jawab manusia dalam upaya melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup.
- 2) Membantu individu dan masyarakat mengembangkan ketrampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan memecahkan permasalahan lingkungan.
- 3) Memupuk kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan hidup dan permasalahannya, melalui penyuluhan terhadap individu atau masyarakat tentang sistem nilai yang sesuai, kepekaan yang kuat atas keperdulian tentang lingkungan dan motivasi untuk secara aktif berpartisipasi terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Selain dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat, hal yang perlu diperhatikan adalah masalah penegakan hukum. Seperti kasus *illegal logging*



(penebangan hutan secara liar) yang memerlukan hukum yang tegas, agar para pelaku jera dan tidak melakukan penebangan lagi. Penegakan hukum juga perlu dilakukan pada kasus-kasus pembangunan yang menyalahi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Di Indonesia masih banyak pembangunan yang menyalahi aturan dalam AMDAL, seperti pembangunan mall-mall, kompleks perumahan, maupun kawasan industri.

Untuk melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat setempat, pengelolaan ini dikenal dengan Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM). PBM ini merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan disuatu tempat dimana masyarakat lokal ditempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa adanya nilai-nilai dasar yang harus dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan yakni ada usaha untuk keberlangsungan dari lingkungan itu bagi pemanfaatan makhluk hidup. Oleh karena itu lingkungan harus dikelola secara arif dan bijaksana berdasarkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesejahteraan, keterbukaan, dan partisipasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 1 butir 14 pengertian perusakan lingkungan merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sehubungan dengan perubahan yang terjadi pada kawasan wisata lingkaran kelayan yakni adanya Pemecahan bongkahan-bongkahan batu pada kawasan ini, penebangan dan ijin perkebunan jelas terjadi perubahan sifat fisik baik langsung maupun tidak langsung dari kawasan lingkaran bukit tersebut yang telah ditetapkan menjadi kawasan wisata alam. Kajian strategis dari tinjauan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan jelas bahwa perlindungan dan pengelolaan



lingkungan hidup haruslah dapat tertata dengan baik sehingga tidak memberi dampak yang merugikan manusia. Oleh karena pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi; (a) perencanaan, (b) pemanfaatan, (c) pengendalian, (d) pemeliharaan, (e) pengawasan, (f) penegakan hukum.

Menjaga keaslian kawasan adalah upaya untuk tidak merubah sifat fisik adalah hal yang harus dilakukan sebagai bentuk pelestarian dan kelangsungan.

Dalam hal ini pelestarian fungsi lingkungan hidup juga dirumuskan pada pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selanjutnya konsep daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Serta konsep daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerat zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk dan dimasukkan kedalamnya, konsep daya tampung berguna dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata, pasal (5), menyatakan bahwa Pembangunan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat obyek-obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata, kemudian pada pasal (6) dinyatakan bahwa, pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan: 1). Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya. 2). Nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3). Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup. 4). Keberlangsungan dari pada usaha pariwisata itu sendiri.



Kebijakan yang ada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sintang pada bagian kelima pasal 18 butir (1) bahwa pengembangan lingkungan pariwisata diarahkan sebagai perencanaan pengembangan RTOW (Rencana Teknis Objek Wisata) yang memperhatikan kelestarian lingkungan, serta menghasilkan produk wisata yang ramah lingkungan sehingga aslinya tetap lestari sesuai dengan budaya lokal yang dimiliki. Sedangkan butir (2) strategi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut: a) mengadakan inventarisasi, analisis dan evaluasi kesesuaian sumber daya kepariwisataan, b) melakukan prakiraan dampak pengembangan kepariwisataan terhadap kelestarian lingkungan, c) meningkatkan sanitasi lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan bagi wisatawan.

2.4. Kerangka Konseptual

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata, dimana kebijakan tersebut memuat sembilan bab dan memuat 37 pasal. Kebijakan tersebut juga dilaksanakan atau di implementasi di kawasan Taman Wisata Bukit Kelam sejak kawasn Bukit Kelam ditetapkan menjadi Taman Wisata Bukit Kelam. Kebijakan tersebut tentunya diimplementasikan dengan melihat pertama siapa Implementornya atau aktor sebagai pelaksana teknis implementasi kebijakan tersebut (*Actors of Policy*), kedua melihat sasaran atau tujuan kebijakan (*Targets of Policy/Determination*) serta melihat dari isi dari kebijakan tersebut (*Contents of Policy*).

Implementasi dari kebijakan dengan memperhatikan aktor kebijakan, Tujuan Kebijakan serta Isi dari Kebijakan tidak mudah, proses implementasi tentunya ada faktor-faktor yang ada berada di sekitar pelaksanaan kebijakan tersebut, dapat berupa faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor



penghambat dan faktor pendukung dalam proses implementasi dapat berupa dari pemerintah sebagai aktor dan masyarakat kawasan yang menjadi target atau sasaran kebijakan tersebut.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan yang dipengaruhi faktor penghambat dan faktor pendukung jelaslah harus menemukan titik kesepaham bersama arti ada kelompok yang puas dan ada kelompok yang tentu dapat menjalankan kebijakan tersebut. Oleh karena itu harus dapat dipahami bersama. Untuk dapat menemukan pemahaman bersama masyarakat harus mengetahui dari kebijakan secara utuh dapat melalui sosialisasi, dukungan kesadaran masyarakat atau partisipasi serta bisa dapat dipengaruhi sumber daya manusia untuk mempersepsi dari aspek kepentingan kebijakan tersebut. Tidak kalah penting komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan baik secara umum maupun secara khusus pada kawasan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan ada.

Oleh karena itu kebijakan hendaknya dapat mengakomodasi semua komponen yang ada dalam lingkungan kebijakan terlebih pada yang menjadi sasaran atau objek kebijakan. Sehubungan dengan ini tentu masyarakat kawasan yang menjadi bagian wilayah kebijakan harus dapat diperhatikan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat tersebut. Kerangka Konsep Penelitian Implementasi Kebijakan Kepariwisata Kabupaten Sintang, untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikut:



implementasi kebijakan *top down* yang memungkinkan implementasi kebijakan kepariwisataan dilakukan hanya prosedural (kaku).

Orisinilitas disertasi ini terletak pada aspek kajian implementasi yang memperhatikan contents teksual atau isi, pelaku dan tujuan kebijakan serta konteksual dari Peraturan Daerah tentang keparisataan Kabupaten Sintang. Oleh karena itu dalam penelitian ini kawasan TWABK dan masyarakat yang berada dikawasan serta konteksual kebijakan dipandang sebagai objek dari penelitian.

Pada aspek penelitian adalah pelestarian sekaligus mengembangkan penelitian Ceballos dan Lascurain (1996), Scheyvens (1996), Tojeiro (2011) dan Nizar (2014) yang memperhatikan terminologi ekowisata dan dampak terhadap lingkungan, pelestarian ini diteliti untuk melihat pengaruh implementasi terhadap lingkungan alam dan sosial di kawasan TWABK.

Penelitian disertasi ini cukup berargumentasi. Dengan hasil penelitian disertasi ini dapat memperkaya hasil-hasil penelitian terdahulu tentang implementasi kebijakan kepariwisataan yang belum menjadi fokus penelitian lain, terutama pada aspek pelestarian.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk mengatur masalah-masalah yang didalam kehidup berbangsa dan bernegara haruslah terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu penelitian ini lebih pada studi proses implementasi kebijakan pemerintah, yakni pemaknaan aparaturnya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan perhatiannya terhadap pelestarian lingkungan. Pengkajian permasalahan ini Peneliti merasa lebih tepat dan lebih cocok menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Melalui penggunaan pendekatan penelitian kualitatif diharapkan peneliti mampu menggambarkan secara utuh dan komprehensif fenomena yang diteliti sebagaimana yang telah dijabarkan dalam fokus penelitian, sehingga pada akhirnya dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan dan dengan demikian tujuan penelitian dapat tercapai.

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penyajian secara menyeluruh dalam pemaknaan suatu fenomena serta dapat memberikan informasi kualitatif yang dideskripsi dengan tidak mengabaikan keaslian (mempertahankan keutuhan) dari objek penelitian artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif berupaya mengembangkan ranah penelitian dengan terus menerus memperluas pertanyaan penelitian, dan bahkan memunculkan pemikiran dan hipotesis baru serta isu baru bagi penelitian terkait dan penelitian selanjutnya (Alwasilah, 2002).

Pendekatan penelitian kualitatif ini digunakan karena proses Implementasi Kebijakan Kawasan TWABK, melibatkan relatif banyak sebagai *Stakeholder*, pemangku kebijakan dan penguasa, dan oleh karena itu proses tersebut tidak hanya sekelompok aktor tertentu, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan budaya



masyarakat di kawasan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana peran masing-masing aktor dalam proses implementasi tersebut, persepsi aparaturnya dan juga masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat kawasan taman wisata alam.

Pendekatan kualitatif ini dapat dimaknai bahwa kegiatan peneliti adalah berinteraksi langsung dengan para informan, antara lain dengan menginterview dan mengobservasi dalam latar alamiah permasalahan yang diteliti, yaitu dalam proses menjaga keberlangsungan ekosistem lingkungan yang dimanfaatkan sebagai taman wisata alam.

3.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada Kecamatan Kelam Permai memiliki luas wilayah terkecil setelah Kecamatan Sintang dan Kecamatan Binjai Hulu, dengan luas wilayah 52.380 Ha atau 2,42 persen dari luas wilayah Kabupaten Sintang. Dari luas tersebut, 28.088 Ha merupakan lahan pertanian, sedangkan sisanya 22.927 Ha merupakan lahan bukan pertanian. Kecamatan Kelam Permai sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa:

- a) Kecamatan Kelam Permai merupakan salah satu target kunjungan wisata di Kabupaten Sintang baik Lokal, Domestik dan Mancanegara.
- b) Kecamatan Kelam Permai merupakan Kecamatan yang memiliki luas 523.80 Km² dengan jumlah Desa sebanyak 17 Desa dan Jumlah Dusun sebanyak 60 Dusun serta jumlah penduduk sebanyak 17.238 Jiwa/3.811KK.
- c) Kecamatan Kelam Permai merupakan kawasan perencanaan pengembangan Wisata Alam dengan 3 buah bukit menjadi satu lintasan yakni mulai dikenal dengan kawasan Kelam, Luit dan Rentap (KELUTAP) dengan posisi keadaan Bukit Kelam di desa Kebong, Bukit Luit di desa Merpak dan Bukit Retap di desa Ensaid Panjang.



d) Penelitian di Kecamatan Kelam Permai tidak bermaksud menggeneralisasikan temuan yang lingkupnya lebih luas, melainkan untuk mempelajari realita Implementasi Kebijakan Kepariwisata dengan tetap melestarikan keaslian alam kawasan.

Situs penelitian ini adalah Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang, KSDA Kabupaten Sintang dan Masyarakat kawasan lingkaran bukit kelam yang direncanakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian, baik melalui wawancara maupun observasi.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, sehingga peneliti menetapkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi: kawasan taman wisata alam Bukit Kelam, para *stakeholders* yang terlibat dalam menjalankan kebijakan seperti Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BKSDA Wilayah Sintang, Camat Kelam Permai, Usaha Pariwisata, Pengunjung dan Masyarakat, karena dalam kegiatan terjadi interaksi secara sinergis. Peneliti akan mengumpulkan data dan membatasi ruang gerak penelitian yang disebut batasan penelitian, maka peneliti menetapkan fokus penelitian ini sebagai berikut:

1) Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Sintang yang dilihat dari aspek Pelaku Kebijakan, Tujuan Kebijakan serta isi kebijakan, yang berhubungan dengan daya tarik dan pengelolaan objek wisata kawasan TWABK dengan memperhatikan mutu lingkungan hidup dan kelestariannya. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta adanya partisipasi atau peran masyarakat yakni masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk



berpartisipasi serta dalam rangka proses pengambilan keputusan pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

2) Faktor yang mendukung dan Faktor menghambat implementasi kebijakan dilihat dari Kehidupan masyarakat kawasan yang masih berpola pada kearifan lokal, Koordinasi oleh Instansi teknis yang dilakukan melalui SOPD yang sudah tersedia kepada *multistakeholder* serta komitmen pejabat instansi teknis yang berperan mengembangkan dan pengelolaan kawasan tersebut. Faktor yang menghambat pelaksanaan melalui kebijakan masih ada konflik kepentingan pada tataran masyarakat lokal pada kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam serta belum adanya kesadaran masyarakat untuk dapat memaksimalkan Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam.

3) Model kebijakan yang ideal kepariwisataan Taman Wisata Alam Bukit Kelam yakni memelihara nilai kearifan lokal masyarakat kawasan; mengurangi konflik dengan lingkungan yang menjadi potensi sumber pendapatan sektor pariwisata serta membangun pola pikir (*mindset*) masyarakat yang berlandaskan pada nilai tradisi kearifan lokal.

3.4 Sumber Data

Kegiatan pengumpulan data penelitian ini dilakukan pada beberapa sumber, yaitu: informan, peristiwa dan dokumen. Proses pengumpulan data pada setiap sumber menggunakan “arahan” fokus penelitian, sehingga dapat dipisahkan antara data yang betul-betul dibutuhkan dan relevan (memenuhi kriteria inklusi) dan data yang harus disisihkan karena tidak relevan (memenuhi kriteria eksklusi).

1) Informan

Pada penelitian ini, informan kunci ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan *criterion based selection*, yaitu penentuan jumlah



informan ditetapkan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan utama penentuan informan adalah penguasaan informasi dan data

yang diperlukan. Pemilihan informan ini didasarkan atas subyek yang banyak

memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan

bersedia memberikan informasi. Berdasarkan kriteria ini maka peneliti memilih

semua lembaga atau instansi yang terlibat dalam proses Implementasi Kebijakan

Kawasan TWABK, khususnya aktor yang terlibat secara langsung dalam proses

implementasi kebijakan tersebut. Subyek utamanya adalah yang terlibat secara

langsung dalam proses implementasi, antara lain: Dinas Pemuda Olahraga

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang, KSDA Kabupaten Sintang,

Masyarakat Kawasan.

Informan selanjutnya dipilih berdasarkan teknik *snowball sampling*, berdasarkan

informasi tentang sumber data yang diberikan oleh informan kunci. Informan

kunci penelitian ini, yaitu Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Sintang, KSDA Wilayah II Sintang. Proses *snowball sampling* berhenti

pada saat peneliti merasa bahwa informasi yang diperoleh sudah memadai yang

ditandai dengan adanya kejenuhan data, yaitu kondisi dimana tidak ada lagi variasi

data yang diberikan oleh informan.

2) Peristiwa

Sumber informasi lain dalam penelitian ini adalah peristiwa yang mencakup

segala sesuatu yang terjadi dan berhubungan dengan aktivitas proses Implementasi

Kebijakan Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam Dalam Rangka Pelestarian

Lingkungan Hidup. Peristiwa yang diobservasi, antara lain: Penyuluhan, sosialisasi

kesadaran lingkungan, pelaksanaan kegiatan di kawasan yang berhubungan

dengan lingkungan.

3) Dokumen

Sumber informasi ketiga dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang

relevan dengan penelitian yang didapatkan melalui sekretariat Pemerintahan



Kabupaten Sintang melalui bidang hukum dan informasi, dokumen-dokumen kebijakan, dokumen rapat, dokumen dalam bentuk laporan hasil penilaian kinerja, dan sebagainya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk suatu karya ilmiah yang baik dan dapat memperoleh hasil yang baik pula hendaknya data-data haruslah lengkap dan jelas pula, pengumpulan data merupakan pengadaan data untuk suatu penelitian. Menurut Nasir (1988:211) "pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan". Dengan demikian penelitian harus menggunakan teknik-teknik tertentu dalam pengumpulan data, oleh karena itu penelitian ini menggunakan tehnik-tehnik sebagai berikut :

- 1) Pengamatan/*Observasi*: yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada objek-objek dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah Implementasi Kebijakan Kawasan Wisata Alam Bukit Kelam Kajian Aspek Pelestarian. Obyek observasi dalam penelitian kualitatif ialah: (a) Tempat (*place*), dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung; (b) *Actor* (pelaku), atau orang-orang yang sedang memainkan peranan tertentu; (c) *Activity* atau kegiatan yang dilakukan aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Sedangkan tahapan observasi dapat dilakukan sebagai berikut
(1) Observasi deskriptif, dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai obyek penelitian; (2) Observasi terfokus, yaitu observasi yang dilakukan peneliti dengan mempersempit observasi yang difokuskan pada suatu aspek tertentu. Di sini sudah dilakukan analisis taksonomi sehingga dapat ditemukan fokus; (3) Observasi terseleksi. Pada tahap ini peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci. Dengan melakukan analisis komponensial terhadap fokus, maka pada tahap ini peneliti telah melakukan berbagai pengamatan yakni;



Observasi/Pengamatan dilakukan di wilayah Kawasan TWABK yang meliputi kondisi kawasan yang rusak, dengan mengamati secara langsung pada 4 desa yang ada di lingkaran kelam sejak april 2017 hingga februari 2018.

- (a) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas kebijakan atau program kepariwisataan yang dilakukan oleh Disporaparekraf.
- (b) Melakukan pengamatan kegiatan dan aktivitas pemangku wilayah terhadap pengawasan kondisi TWABK.
- (c) Melakukan pengamatan perilaku masyarakat dan pola hidup sehari-hari.
- (d) Melakukan pengamatan tatacara masyarakat kawasan dalam memperlakukan alam lingkungan akwasa tempat tinggal mereka.
- (e) Melakukan pengamatan pada kondisi jalan sebagai akses menuju objek-objek wisata.
- (f) Melakukan pengamatan pada titik kerusakan lingkungan kawasan TWABK.
- (g) Melakukan pengamatan pada kondisi-kondisi alam yang menjadi lahan perkebunan dan pertanian masyarakat yang ada dikawasan.
- (h) Melakukan pengamatan jumlah pengunjung baik pada waktu hari biasa dan hari-hari besar keagamaan dan tahun baru.
- (i) Melakukan pengamatan dan memperhatikan pelaku usaha penyedia makan dan minum di kawasan TWABK.

- 2) Wawancara adalah wawancara subjek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni Implementasi Kebijakan Kawasan Wisata Alam Bukit Kelam Kajian Aspek Pelestarian. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan data lapangan yang tidak bisa diakses melalui kegiatan observasi. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk memperdalam pengetahuan atau pemahaman tentang obyek yang di observasi. Langkah ini ditempuh untuk menghindari atau meminimalisir kesalahan dalam menginterpretasikan tentang makna simbol-simbol atau kegiatan subyek penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan



menggunakan teknik ini, diharapkan pengumpulan data lebih mendalam, lengkap dan akurat, sehingga dapat membantu usaha menganalisis permasalahan secara lebih fokus.

Data wawancara ini akan diperoleh melalui keterangan nara sumber yang menjadi informan penelitian, terutama mereka yang dianggap mengetahui secara pasti serta memahami terhadap berbagai hal yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Penentuan subyek informan pada penelitian ini sudah dilakukan sejak melakukan observasi, sehingga tidak terjadi salah-pilih. Sementara wawancara mendalam dilakukan terhadap informan untuk memberikan keleluasaan untuk menjelaskan dan menguraikan pendapatnya secara bebas, tidak dibatasi oleh pilih-pilih jawaban sebagaimana pada wawancara terstruktur. Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam yaitu wawancara tidak terstruktur yakni;

- (a) Melakukan wawancara dimulai dari key *informan* yakni Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Promi Kepariwisata serta Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kepariwisata, Disporaparekraf yang dilakukan berulang-ulang untuk melengkapi data.
- (b) Melakukan wawancara dengan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Sintang.
- (c) Melakukan wawancara dengan Camat Kelam Kecamatan Kelam Permai.
- (d) Melakukan wawancara dengan Kepala Desa yang ada di Kawasan yakni Desa Kebong, Desa Kelam Sejahtera, Desa Merpak serta Desa Samak.
- (e) Melakukan wawancara dengan Dewan Adat Dayak, Temenggung Dayak Desa serta tokoh masyarakat yang aktif dalam memperhatikan kawasan dan dianggap mengetahui kondisi kawasan TWABK.
- (f) Melakukan wawancara dengan pelaku usaha di dalam kawasan yang



berhubungan dengan menyediakan kebutuhan pengunjung objek wisata.

(g) Melakukan wawancara kepada masyarakat yang mendiami kawasan yang dianggap paham kondisi kawasan yang telah mendiami secara turum temurun di kawasan.

(h) Melakukan wawancara dengan pengunjung objek wisata di kawasan TWABK.

3) Studi Dokumentasi, yaitu mempelajari dan menggali data skunder yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini seperti tentang gambaran tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Wisata Alam Bukit Kelam Kajian Aspek Pelestarian, serta;

(a) Melakukan Studi dokumentasi pada Disporaparekraf yang berhubungan aktivitas kebijakan dan program kepariwisataan.

(b) Melakukan Studi dokumentasi di BKSDA wilayah II Sintang sehubungan dengan aktivitas menjaga lingkungan dan pelestarian alam.

(c) Melakukan Studi dokumentasi di Kantor Camat Kelam Permai sehubungan dengan data wilayah dan aktivitas memfasilitasi kepariwisataan di kawasan TWABK.

(d) Melakukan Studi dokumentasi di Desa yang ada di Kawasan yakni Desa Kebong, Desa Kelam Sejahtera, Desa Merpak serta Desa Samak sehubungan dengan data masyarakat kawasan.

3.6 Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data hasil penelitian telah sesuai sebagaimana yang diinformasikan oleh informan dalam wawancara, observasi maupun data dokumen, maka dilakukan triangulasi. Sebagaimana dikatakan oleh Denzin (1978), bahwa pelaksanaan triangulasi perlu dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori yang digunakan.



Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah menyangkut validitas dan reliabilitas data penelitian. Validitas (kesahihan) dalam penelitian kualitatif ialah data tersebut dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Di dalam penelitian kualitatif ini ada dua macam validitas, yaitu: (1) Validitas internal berkaitan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai; (2) Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sample tersebut diambil (Sugiyono, 2005). Reliabilitas (keterandalan) ialah konsistensi pengukuran suatu obyek secara berulang-ulang dan hasilnya dari pengukuran pertama sampai pengukuran terakhir haruslah tidak jauh berbeda.

Keabsahan data (*truthworthiness*) yang dikumpulkan dilihat dari kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan menggunakan teknik: perpanjangan keikutsertaan (*prolonged engagement*), ketekunan pengamatan (*persistent observation*), dan triangulasi (*triangulation*). Melalui perpanjangan pengamatan peneliti memiliki cukup banyak waktu untuk mempelajari "kebudayaan", dapat melakukan pengujian terhadap distorsi data, dan juga untuk membangun kepercayaan subyek terhadap peneliti. Kemudian dengan ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang menonjol dari setiap fokus yang diamati, untuk selanjutnya peneliti memusatkan diri pada ciri atau unsur tersebut.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara mengkonfirmasi data tersebut kepada informan lain (triangulasi sumber), sehingga jawaban mereka dapat dibandingkan satu dengan yang lainnya.

Triangulasi ini dilakukan terhadap lebih dari satu sumber untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran data penelitian.

Keabsahan data juga diuji melalui kriteria keteralihan (*transferability*). Untuk memenuhi kriteria ini maka peneliti berusaha untuk menyajikan hasil penelitian ini



dengan memperkaya wacana ilmiah serta membandingkan dengan penelitian yang sejenis atau yang relevan dengan fokus penelitian ini. Langkah yang terakhir menggunakan kriteria kepastian (*confirmability*), dan untuk mewujudkan kepastian atas hasil penelitian ini maka peneliti mendiskusikan dengan promotor dan ko-promotor.

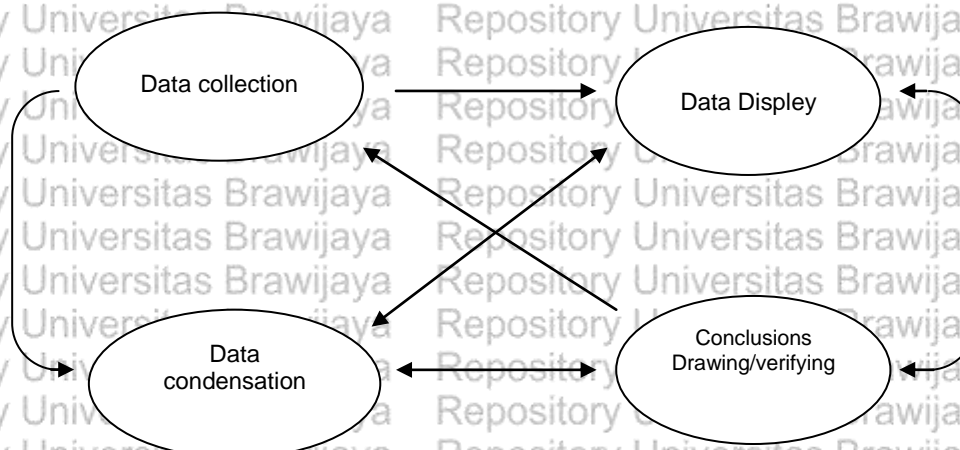
3.7 Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Miles, Huberman dan Saldana (2014) dalam analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: data *condensation*, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Teknik analisis juga mendasarkan pada ketiga alur kegiatan analisis tersebut, yang pada dasarnya dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi pada saat melakukan reduksi data boleh jadi pada saat itu sekaligus dilakukan pembuatan format penyajian data yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

Miles, Huberman dan Saldana (2014) menggambarkan model analisis datanya sebagai berikut;





Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana (2014)

Pertama *Condensation* data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis, melainkan merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana saja yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan yang analitis. Kode atau pengkodean merupakan singkatan atau simbol yang diterapkan pada sekelompok kata-kata, dapat berupa kalimat atau paragraf dari catatan-catatan lapangan yang ditulis. Kode-kode merupakan kategori-kategori, biasanya dikembangkan dari permasalahan penelitian, hipotesis, konsep-konsep kunci, atau tema-tema yang penting. Kode-kode adalah peralatan yang mengorganisasi dan menyusun kembali kata-kata sehingga memungkinkan penganalisis dapat menemukan dengan cepat, menarik kemudian menggolongkan seluruh bagian yang berhubungan dengan masalah khusus, hipotesis, konsep atau tema. Selanjutnya dalam reduksi data dapat berupa analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ia merupakan bagian dari analisis. Merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analisis.

Ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, analisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda,



mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Tahapan Analisis data ini mengumpulkan data yang berada dikawasan yang berhubungan dengan penelitian baik data sekunder yang tersedia mulai dari data penduduk yang diperoleh di Kantor Desa serta Kantor Camat Kelam Permai yang berada di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam maupun mengumpulkan data primer yang diperoleh dari wawancara obsevasi serta dokumen-dokumen yang ada.

Selanjut dalam pengolah data penelitian yang bersumber dari peroleh data sekunder dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Disporaparekraf, Masyarakat dan Dokumen-Dokumen pendukung dianalisis dengan mengguna akan analisis deskriptif. Serta dilakukan penarikan kesimpulan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sintang**

Kabupaten Sintang terletak dibagian Timur Propinsi Kalimantan Barat atau diantara $1^{\circ} 05'$ Lintang Utara serta $0^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur serta $113^{\circ} 20'$ Bujur Timur. Kabupaten Sintang dilalui garis Khatulistiwa. Kemudian batas wilayah administratif Kabupaten Sintang adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak), Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sanggau, Sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu, Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu dan kabupaten Melawi. Wilayah Sintang yang berbatasan langsung dengan negara malaysia adalah wilayah Kecamatan Ketungau Tengah (Marakai) dan Kecamatan Ketungau Hulu (Senaning).

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang ini adalah 21.635 Km^2 dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau, yaitu $6.386,40 \text{ Km}^2$ atau sebesar dua puluh sembilan koma lima puluh dua persen, sedangkan Kecamatan Sintang merupakan kecamatan terkecil luas wilayahnya, yaitu $277,05 \text{ Km}^2$ atau hanya sebesar satu koma dua puluh delapan persen. Luas wilayah Kabupaten Sintang ini, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.574 Km^2 .

Secara Administratif luas wilayah Kabupaten Sintang kurang lebih $21.638.20 \text{ Km}^2$, dari luas tersebut diketahui memiliki luas hutan taman nasional 68.603 ha ,



hutan lindung 446.799.9 ha, hutan produksi terbatas 623.505.1 ha, hutan produksi biasa 188.469,2 ha dan hutan pertanian lahan kering 834.808.8 ha.

Wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari 14 Kecamatan dan terdiri 391 Desa, serta terdiri dari 599 Dusun. Kabupaten Sintang memiliki perangkat kerja pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah dengan tiga Asisten Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 5 Dinas Cabang, 8 badan, dan 4 UPTD (RSUD, Puskesmas, UK-UKM dan SKB. Kondisi Pegawai Kabupaten pada tahun 2016 Sintang 6.028 orang dengan komposisi sebagai berikut: Golongan 1 sebanyak 205 orang, Golongan II sebanyak 2.448 orang, Golongan III sebanyak 3.996 orang dan Golongan IV sebanyak 354 orang.

Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar dan dua sungai kecil. Dua sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi dan dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau dan Sungai Kayan. Sungai Ketungau yang merupakan bagian dari anak Sungai Kapuas dan Sungai Kayan merupakan anak Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai Kecamatan Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai Kecamatan Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai Kayan Hilir, kemudian sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai Kecamatan Ketungau Hilir.

Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan obyek wisata namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.

Bahkan masyarakat diluar wilayah Kabupaten Sintang dan warga Sintang masih banyak yang belum mengetahui potensi alam tersebut. Potensi alam yang dimaksud adalah berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di lima kecamatan.

Kecamatan- kecamatan yang memiliki air terjun adalah: Kecamatan Sepauk, Kayan Hulu, Ambalau, Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Sintang, diarahkan pada pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia yang dapat



menunjang jalannya pembangunan daerah dan nasional. Berdasarkan angka proyeksi tahun 2017, penduduk kabupaten Sintang berjumlah 373.380 jiwa (95.266 kepala keluarga) atau rata-rata jumlah penduduk perdesa/kelurahan mengalami peningkatan sebanyak 60 orang. Dengan kepadatan penduduk tersebut, maka Kabupaten Sintang dikatakan mempunyai penduduk yang masih jarang.

4.2 Gambaran Umum Kawasan TWABK

4.2.1 Sejarah Kawasan

Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam ini ditetapkan sebagai kawasan lindung bersama dengan Hutan Lindung Merpak dan Hutan Lindung Kebong dengan nama Hutan Lindung Kelam Kompleks, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 155/Kpts-II/90 kompleks Gunung Kelam yang terdiri dari Bukit Luit, Bukit Rentap dan Bukit Kelam dengan luas 1.280 Ha merupakan kawasan dengan fungsi lindung.

Pada tahun 1992, Bupati Sintang merekomendasikan Bukit Kelam sebagai kawasan taman wisata alam, yang ditindaklanjuti SK Menteri Kehutanan Nomor 594/Kpts-II/1992 tanggal 6 Juni 1992 dengan menunjuk dan mengubah fungsi sebagian Kompleks Bukit Kelam menjadi Hutan Wisata Bukit Kelam dengan luas 520 ha. Selanjutnya kawasan ini ditetapkan dengan status hukum tetap berdasarkan SK No. 405/Kpts-II/1999 tanggal 14 Juni 1999 dengan luas 1.121 ha.

4.2.2 Karakteristik Kawasan

Taman Wisata Alam Bukit Kelam secara astronomi terletak pada koordinat antara $111^{\circ} 34'11''$ - $111^{\circ}24'11''$ BT dan $0^{\circ}05'25''$ - $0^{\circ}05'27''$ LS, secara administratif TWABK masuk wilayah Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. TWABK memiliki batas wilayah antara lain: a) Desa Kelam Sejahtera Kecamatan Kelam Permai (sebelah utara), b) Desa Samak, Kecamatan Dedai (sebelah selatan), c) Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai (sebelah barat) dan d) Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai (sebelah timur)



4.2.3 Kondisi Fisik Kawasan

4.2.3.1 Iklim

Letak kawasan yang berada tidak jauh dari kota Sintang menyebabkan iklim hutan wisata Bukit Kelam tidak jauh berbeda dengan iklim kota Sintang secara umum. Temperatur berkisar antara 20° C hingga 29° C dengan temperatur tertinggi 35° C dan terendah 21° C. Curah hujan mencapai 3.048 hingga 4.267mm per tahun atau rata-rata 3.569,6 mm per tahun dengan rerata harian 225,3 hari per tahun. Curah hujan terjadi tidak merata setiap bulannya namun tidak diketemukan bulan-bulan kering secara nyata. Bulan basah terjadi pada bulan September hingga April dengan curah hujan > 300 mm per bulan dan bulan kering terjadi pada bulan Mei hingga Agustus dengan curah hujan < 200 mm per bulan.

4.2.3.2 Geologi

Berdasarkan peta geologi Kabupaten Sintang dengan skala 1:250.000 Kawasan TWA Bukit Kelam terdiri dari batuan yang berumur miosen (5,3-23,7 juta tahun) dan berasal dari batuan terobosan sintang yang terdiri dari Andesit, Dasit, Diorit, Kuarsa, sedikit Riolit, Riodasit, Basal, Ganit berbutir halus, Sill dan gabro. Di Kawasan TWA Bukit Kelam sebaran batu andesit tersingkap di bagian puncak, sedangkan di bagian lereng tersebar batuan sedimen termalihkan. Secara umum Bukit Kelam mengandung mineral Pirit. Berdasarkan peta Geologi Provinsi Kalimantan Barat skala 1:500.000 yang bersumber pada Peta Geologi Indonesia skala 1:2.000.000 yang diterbitkan Direktorat Geologi Bandung skala 1:2.000.000, kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam terdiri dari batu Plistosen dan batuan Pliosen.

4.2.3.3 Tanah

Susunan jenis tanah yang terdapat di dalam Kawasan TWA Bukit Kelam berdasarkan Peta Tanah Eksplorasi Kabupaten Sintang Tahun 2000 dengan skala 1:400.000 adalah podsolik merah kuning dengan batuan induk bahan endapan.



Menurut Darma Wijaya dalam Managam (1995:30) tanah podsolik merah kuning mempunyai tekstur liat yang mengikat, strukturnya semakin ke bawah semakin teguh. Unsur hara rendah terutama N, P, K dan Ca dengan kejenuhan basa kurang dari 35% KTK tanah kurang dari 24 m.e/100 gram tanah. Keadaan hara miskin, permeabilitas lambat hingga baik dan peka terhadap erosi dan merupakan tanah mineral yang bereaksi masam dengan sumber utama kemasaman adalah unsur Al.

4.2.3.4 Topografi

Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam merupakan kawasan pegunungan dengan kemiringan sangat berat (terjal). Kawasan dengan luas 520 Ha ini, mempunyai topografi datar sampai langai (kelerengan $0 < 18\%$) sebesar 55,8%, kemudian daerah sedang atau agak curam (kelerengan $18 < 35\%$) sebesar 15,5% dan daerah curam (kelerengan $> 35\%$) sebesar 28,7%. Adapun ketinggian Puncak Bukit Kelam ± 900 m dpl. Dengan ketinggian tersebut, TWA. Bukit Kelam dapat dengan mudah dilihat dari segala penjuru dari Kota Sintang baik melalui jalan darat maupun jalur sungai.

4.2.3.5 Hidrologi

Kawasan TWA Bukit Kelam memainkan peran penting dalam pemenuhan sumber air bagi masyarakat sekitarnya dikarenakan: 1) posisi hidrologi TWA. Bukit Kelam secara umum berada diantara dua sungai besar yaitu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas yang termasuk dalam daerah aliran sungai (DAS) Kapuas, dan 2) ekosistem gunung batu dengan ketinggian 900 m dpl dengan hutan yang ada di bagian atas dan bagian kaki bukit berfungsi untuk menangkap air hujan maupun uap air berupa awan yang kemudian secara perlahan di alirkan ke wilayah yang lebih rendah.

Keberadaan TWA. Bukit Kelam sebagai pengatur hidrologis di Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai menjadikan kawasan ini vital bagi pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat sekitar maupun bagi masyarakat Kota



Sintang. Masyarakat juga menggunakan air untuk kebutuhan pemenuhan air bersih, irigasi, MCK dan lain sebagainya. Keberadaan air terjun di salah satu lereng gunung batu telah berfungsi sebagai obyek wisata yang dikunjungi banyak orang.

Kawasan ini berada dekat dengan Sungai Jemelak, Sungai Kelam, Sungai Maram, Sungai Lebang dan sungai yang lebih kecil lainnya yang menjadi satu kesatuan hidrologis. Beberapa sungai tersebut memiliki dasar sungai yang berpasir dan berbatu. Aliran air yang berasal dari kawasan ini terdiri dari aliran permukaan (sungai dan air terjun) dan aliran bawah (mata air), puncak aliran permukaan tertinggi terjadi pada bulan-bulan penghujan yaitu bulan September hingga April dan periode aliran permukaan terendah terjadi pada bulan Mei hingga Agustus.

4.2.3.6 Potensi

Di puncak bukitnya terdapat gua-gua alam yang eksotis dan bernuansa magis yang didalamnya terdapat burung walet. TWABK Kelam memiliki keistimewaan Panorama alamnya yang unik dan alami, serta udaranya yang sejuk dan segar. Terdapat juga berbagai flora langka, seperti meranti (*Shorea sp*), bangeris (*Koompassia sp*), tengkawang (*Dipterocarpus sp*), kebas-kebas (*podocarpusceae*), anggrek (*Archidaceae*), dan kantong semar raksasa. Berbagai fauna langka, seperti beruang madu (*Heralctus mayalanus*), trenggiling (*Manis javanica*), kelelawar (*Hiropteraphilie*), dan alap-alap (*Acciptiter badios*).

Ketinggian kawasan ini berkisar antara 1000 meter di atas permukaan laut (DPL) dengan kemiringan antara 15°-40°, tepat sekali dijadikan tempat untuk melakukan olahraga terbang layang dan panjat tebing. Selain hal itu sebagai daya tarik kawasan taman wisata bukit kelam, dari kontek Pemerintah Bukit Kelam sebagai ikon atau lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang. Bukit Kelam sebagai simbol kebanggaan dan keangungan daerah.



4.2.4 Keadaan Sosial Ekonom dan Budaya

Penduduk yang berada disekitar kawasan yang berjumlah 4.107 jiwa, yang secara administratif terdiri dari 4 desa yakni; 1) Desa kebong berjumlah 2.367 jiwa, 2) Desa Kelam Sejahtera berjumlah 661 Jiwa, 3) Merpak berjumlah 1.079 Jiwa, 3) Desa Samak berjumlah 403 Jiwa, dengan rata-rata penyebaran kepadatan penduduk yakni 48,27 jiwa per Km² (Kecamatan Kelam dalam Angka 2016). Serta penyebaran tingkat umur masyarakat kawasan yang sangat beragam dapat lihat pada tabel berikut;

Tabel 4.1 Tingkat Umur Penduduk di sekitar TWABK Tahun 2016

No.	Tingkatan Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk Pada Desa				Jumlah	%
		Kebong	Kelam Sejahtera	Merpak	Samak		
1.	< 7	267	99	132	52	550	12,20
2.	7 – 12	282	63	187	67	599	13,28
3.	13 – 18	393	79	196	156	824	18,27
4.	> 18	1.425	420	564	128	2.537	56,25
	TOTAL	2.367	661	1.079	403	4.510	100,00

Sumber: Dok. Kecamatan Kelam Permai dalam Angka 2016.

Tingkat pendidikan masyarakat Kawasan TWABK masih rata berpendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. Masih kurangnya masyarakat kawasan dalam melanjutkan pendidikan tinggi dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu membiayai pendidikan anak kejenjang yang lebih tinggi.

Masyarakat yang mendiami Kawasan TWABK sebagian besar bekerja di sektor pertanian diikuti dengan buruh dan karyawan perusahaan yang berada disekitar kawasan. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan sebagai mata pencaharian asli mereka sudah sangat berkurang. Invasi perkebunan sawit dan masuknya pendatang merubah mata pencaharian tradisional mereka yang dulunya sangat bergantung pada hasil hutan. Hal ini menyebabkan pandangan masyarakat terhadap hutan tidak lagi sebagai sumber kehidupan seperti yang diajarkan leluhur mereka.



Masyarakat yang berdiam di Desa Merpak, Desa Kebong dan Desa Kelam Sejahtera mayoritas berasal dari etnis Dayak Desa, sedangkan masyarakat Desa Samak mayoritas berasal dari etnis Dayak Lebang. Masyarakat etnis Dayak Desa yang berada disekitar kawasan ini masih memegang teguh adat istiadat serta budaya Dayak. Berbagai macam dan bentuk upaya adat istiadat dan budaya seperti antara lain adat perkawinan, kelahiran anak, kematian, upacara tanam dan panen padi. Selain upacara adat, masyarakat etnis dayak ini juga memiliki berbagai macam kesenian daerah berupa seni tari, seni musik, seni ukir. Masyarakat dayak juga masih memegang kepercayaan teguh kepercayaan dinamismenya, mereka percaya setiap tempat-tempat tertentu ada penguasanya yang mereka sebut: *Jubata, Petara, Alataala, penompa* dan lain-lain untuk sebutan Tuhan yang tertinggi. Potensi adat istiadat dan budaya serta kesenian yang berkembang di daerah ini merupakan potensi dan daya tarik wisata pada kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam.



BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Implementasi Kebijakan Kepariwisata Taman Wisata Alam Bukit Kelam dalam Rangka Pelestarian Kawasan

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sintang memiliki peran penting dalam kontribusi pembangunan yang bertujuan mendorong serta mengangkat potensi ekonomi sekaligus lapangan kerja, terutama yang bertujuan untuk mendorong bangkitnya pembangunan daerah. Membaiknya perekonomian pada tataran pemerintah daerah tentu akan memberi dampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan sebagai upaya untuk pelestari budaya dan lingkungan hidup di Kabupaten Sintang.

Pemerintah Kabupaten Sintang melalui pelaksanaan teknis bidang kepariwisataan yakni Disporaparekrif selalu memberi dukungan dalam mengembangkan kepariwisataan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Disporaparekrif mempunyai visi dan misi bidang kepariwisataan sebagai berikut Visi Pariwisata Kabupaten Sintang yakni “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat Berprestasi, Pariwisata yang Maju dan Berdaya Saing” dengan Misi Pariwisata Kabupaten Sintang yakni; a) Menciptakan Produk Pariwisata yang memiliki daya tarik dan menjadi pilihan tujuan secara elegan dan mantap, b) Meningkatkan pelayanan secara profesional dan memiliki daya saing antar daerah, c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pendapatan dari usaha pariwisata yang kreatif, inovatif sebagai modal pokok



pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara budaya dan sejahtera. d) Melindungi dan menjaga kemitraan secara terbuka bagi dunia usaha atau Investor yang dan menanamkan modalnya dibidang Pariwisata. d) Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan paket pilihan sebagai sektor andalan dalam memberikan adanya dukungan pendapatan asli daerah. e) Menciptakan insan pariwisata yang dapat memberikan nuansa karakter budaya daerah yang konsisten dan kondusif. f) Menjaga keutuhan budaya yang merupakan aset bangsa Indonesia yang berbagai ragam budaya adalah merupakan Kekayaan budaya yang dapat dikemas secara baik dan indah untuk dinikmati sebagai Paket Wisata Fisik atau Dinamika Masyarakat Budaya. g) Meningkatkan perawatan dan melestarikan barang museum dan cagar alam yang merupakan bukti fisik peninggalan sejarah, budaya di Kabupaten Sintang. h) Meningkatkan sumber daya aparatur pariwisata melalui pelatihan, sosialisasi teknis Kebudayaan dan pariwisata yang profesional.

Upaya pengembangan kepariwisataan tentunya melihat potensi wisata yang ada di Kabupaten Sintang dengan cermati secara teliti dan akurat, sehingga dibutuhkan langkah-langkah sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi dimaksud yang akan diklasifikasi sesuai dengan standar wisata yang akan dikembangkan.

Untuk lebih jelas potensi pariwisata Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Jumlah Data Potensi Obyek Daerah Tujuan Wisata Budaya, Alam Dan Taman Rekreasi di Kabupaten Sintang Tahun 2017

No	Kecamatan	Jenis ODTW	Jenis
1.	Sintang	1 Keraton Al Mukaromah	Wisata Sejarah
		2 Masjid Jami Sultan Nata	Wisata Sejarah
		3 Museum Kapuas Raya	Wisata Budaya
		4 Hutan Wisata Baning	Wisata Alam



		5	Danau Jemelak	Wisata Alam
		6	Kolam renang Serantung Waterpark	Taman Rekreasi
		7	Kolam renang Balioboro	Taman Rekreasi
2.	Sei Tebelian	1	Kolam Renang Tebelian Indah	Taman Rekreasi
3.	Kelam Permai	1	Taman Wisata Bukit kelam	Wisata Alam
		2	Goa Maria	Wisata Alam
		3	Kolam Renang Tirta Wisata Kelam	Taman Rekreasi
		4	Bukit Rentap	Wisata Alam
		5	Gua Antu Simpadik	Wisata Alam
		6	Gua Gemelat	Wisata Alam
		7	Hutan Tawang amersibung	Wisata Alam
		8	Telaga Rendang	Wisata Alam
		9	Telaga Surat	Wisata Alam
		10	Bukit Luit	Wisata Alam
4.	Binjai	1		
5.	Sepauk	1	Bukit Kujau	Wisata Alam
		2	Bukit Saran	Wisata Alam
		3	Air Terjun Sentarum	Wisata Alam
		4	Air Terju Tuja Pamak	Wisata Alam
		5	Air Terjun anak sungai sentarum	Wisata Alam
		6	Air Terjun Tuja Supit	Wisata Alam
		7	Air Terjun Tuja Tapang Tuai	Wisata Alam
		8	Sungai Silit	Wisata Alam
		9	Sungai Kiara	Wisata Alam
		10	Sungai Lubuk Kembang	Wisata Alam
6.	Tempunak	1	Air Terjun Bukit Kujau	Wisata Alam
		2	Sungai Kujau	Wisata Alam
		3	Sungai Senirah	Wisata Alam
		4	Air Terjun gurunng Jatuk	Wisata Alam
		5	Riam Capat Cunai	Wisata Alam
		6	Gurung Jeruk	Wisata Alam



7.	Dedai	1	Bukit Bang	Wisata Alam
8.	Kayan Hilir	1	Bukit Bang	Wisata Alam
		2	Bukit Ruyung	Wisata Alam
		3	Air Terjun Sarai Entemu	Wisata Alam
		4	Sungai Kura	Wisata Alam
		5	Sungai Beribijit	Wisata Alam
		6	Sungai Kelampai	Wisata Alam
		7	Bukit Gonik	Wisata Alam
		8	Goa Paleh Berani	Wisata Alam
		9	Goa Paleh pengolak	Wisata Alam
		10	Air terjun Sarai Nantai Bulung	Wisata Alam
9.	Kayan Hulu	1	Bukit Sahai Keladan	Wisata Alam
		2	Riam Mensabu	Wisata Alam
10.	Ketungau Hilir	1	Riam Setungkup	Wisata Alam
		2	Air Terjun Wong Tungku	Wisata Alam
11.	Ketungau Tengah	1	Air Terjun Wong Sepakat	Wisata Alam
		2	Rumah Adat Betang Panjang	Wisata Budaya
		3	Air Terjun Wong Tapah	Wisata Alam
		4	Air Terjun Tekop	Wisata Alam
12.	Ketungau Hulu	1	Bukit Bangau	Wisata Alam
		2	Butu Bejaku	Wisata Alam
		3	Telaga Kumang	Wisata Alam
		4	Air Terjun Sungai Jerup	Wisata Alam
		5	Air Terjun Sungai Udang	Wisata Alam
13.	Serawai	1	Riam pengundang	Wisata Alam
14.	Ambalau	1	Air Terjun Nokan Nayan	Wisata Alam
		2	Air Terjun Nokan Cecak	Wisata Alam
		3	Air Terjun Nokan Undak	Wisata Alam
		4	Air Terjun Nokan Jenggonoi	Wisata Alam

Sumber: Disporaparekraf, 2017



Berdasarkan tabel 5.1 Kabupaten Sintang memiliki 56 potensi objek daerah tujuan wisata. Oleh karena itu dalam pengembangannya perlu dukungan Pemerintah yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam dilakukan pemetaan pada kawasan daya tarik wisata unggulan. Berdasarkan Renstra Disporaparekraf tahun 2016, dari jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Sintang telah ditetapkan dan diusulkan daya tarik wisata unggulan pada masing-masing kecamatan sebagai skala prioritas yang harus dikelola lebih optimal.

Pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sintang tentunya tujuan akhir yang ingin dicapai adalah target mendatangkan wisatawan baik lokal maupun dari luar daerah ataupun internasional secara terus menerus dan keberlanjutan. Dengan demikian tentu ada wilayah yang menjadi unggulan yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya adalah Taman Wisata Alam Bukit Kelam.

Penetapan Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam diharapkan menjadi peluang besar dengan meningkatnya kunjungan wisata pada Kawasan Taman Wisata Bukit Kelam dapat memberi kontribusi bagi peningkatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena diharapkan dari Kawasan ini dapat memberikan kontribusi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sintang secara umum dan masyarakat kawasan secara khusus maka perlu selalu dijaga serta tetap harus mempertahankan keaslian kawasan, dengan tidak merubah struktur alam bahkan sama sekali tidak merusak. Berdasarkan data kunjungan wisata Kawasan Taman Wisata Bukit Kelam sejak tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2. Jumlah Wisatawan yang datang Kawasan Taman Wisata Bukit Kelam Kabupaten Sintang Kalimantan Barat tiga tahun sejak Tahun 2015

No.	Pengunjung	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Pelajar	3.836	4.231	4.829
2.	Mahasiswa	1249	2.229	2.783
3.	Peneliti	5	2	7
4.	Wisman	51	57	62



5.	Tamu Negara	-	-	-
6.	Dinas	20	32	41
7.	Umum	5.220	6.326	7.075
	Jumlah	10.704	12.662	14.797

Sumber: Dok. Disporaparekrak Kab.Sintang Sept. 2017

Berdasarkan tabel. 5.2 bahwa menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di kawasan TWABK perlu pemahaman peran pemerintah dan masyarakat menjaga kawasan sangat dibutuhkan. Peran pemerintah dan masyarakat tentu tidak asal muncul begitu saja, namun telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang kepariwisataan. Untuk dapat melaksanakan Peraturan Daerah tersebut agar dapat efektif dan maksimal maka didalam implementasinya harus ada sinergis antara pelaku kebijakan ataupun Implementor (*Policy of Actors*) kelanjutnya tujuan dari kebijakan (*Policy of Targets*) serta isi dari kebijakan (*Policy of Contents*).

5.1.1 Pelaku Kebijakan (*Policy of Actors*)

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan harus diketahui terlebih dahulu pelaku atau aktor yang mengimplentasikan suatu kebijakan sehingga dapat menyadari suatu peranan dari kebijakan. Pentingnya aktor dari suatu kebijakan adalah untuk tercapainya misi dari kebijakan yang berhasil guna secara maksimal. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Pariwisata dilaksanakan dengan secara bersama dan sinergi dengan melibatkan pihak pemerintah, swata dan masyarakat sebagai pelaku dari kebijakan.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang pada sektor kepariwisataan sangatlah penting dalam upaya memperkenalkan industri kepariwisata yang ada, oleh karena itu Disporaparekrak sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan Kepariwisataan yang diberi tanggungjawab dalam pelaksanaan teknis bidang kepariwisataan harus menjalankan amanat agar dapat mengimplementasikan kepariwisataan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Disporaparekrak (H. 52 thn) mengatakan bahwa;



secara teknis adalah sebagai tanggungjawab yang harus dilaksanakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan yang ada di Kabupaten Sintang terutama yang berhubungan dengan isi kebijakan kepariwisataan kabupaten sintang. (wawancara, Juli 2017)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut bahwa sebagai pelaksana teknis bidang kepariwisataan di Kabupaten Sintang terutama pada kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam selalu menyedia program kerja melalui tugas pokok dan fungsi yang mesti dijalankan.

Pada tataran wilayah kerja administrasi pemerintahan kawasan TWABK berada di Kecamatan Kelam Permai tentu pemerintahan wilayah memiliki andil atau peran sebagai aktor kebijakan dalam mengimplementasi kebijakan kepariwisataan di kawasan TWABK. Berdasarkan wawancara dengan Camat Kelam Permai (M. 50 thn) mengatakan bahwa;

Camat tidak memiliki peran langsung akan tetapi sebagai kepala administrasi wilayah untuk dapat mengimplementasi Peraturan Daerah kepariwisataan di kawasan TWABK yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kelam Permai Camat akan selalu memberi ruang untuk memfasilitasi agar dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Kelam Permai. (wawancara, Oktober 2017)

Berdasarkan kutipan wawancara dengan camat tersebut bahwa camat tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengimplementasi kebijakan kepariwisataan akan tetapi sebagai pemerintah wilayah tentu menjadi bertanggungjawab untuk memfasilitasi menjalankan program kebijakan tersebut agar dapat memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat yang ada didalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam.

Kebijakan Kepariwisataan pada kawasan konservasi yakni BKSDA sebagai pemangku wilayah hal ini, menjadi penting karena BKSDA merupakan Aktor yang berperan dalam penataan kawasan, tentu memberi dukung dalam kepariwisataan di kawasan konservasi dengan melakukan koordinasi yang cukup intensif dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana sehingga tidak terjadi kerusakan



lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala BKSDA Wilayah II Sintang (Bs.48thn) mengatakan bahwa:

Kawasan TWABK adalah merupakan kawasan konservasi yang diharapkan perencanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di kawasan ini selalu dilakukan koordinasi sehingga dapat disinkronkan dengan tata kebijakan dalam kawasan. (wawancara, Oktober 2017).

Berdasarkan petikan wawancara tersebut pihak bahwa, BKSDA memiliki peran penting sebagai aktor untuk menentukan titik letak pembangunan tiap sektor yang ada di dalam kawasan TWABK. Penentuan titik pembangunan dalam kawasan ini telah ada pembagian kawasan berdasarkan penataan blok kawasan.

Selanjutnya Kepala Desa memiliki peran dalam melakukan sosialisasi dalam implementasi kebijakan kepariwisataan di kawasan TWABK. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kebong (Dm. 42 thn) bahwa:

Sebagai Kepala Desa saya mendukung dan menjalankan kebijakan pemerintah (Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) terhadap implementasi kebijakan kepariwisataan dalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Namun kondisi kawasan wisata bukit kelam masih ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan, seperti tapal batas kawasan". (wawancara, oktober 2017)

Berdasarkan petikan wawancara dengan Kepala Desa Kebong terungkap bahwa, Pemerintahan Desa berada didalam kawasan, mengetahui Kawasan Bukit Kelam merupakan taman wisata alam. Akan tetapi belum ada sosialisasi, namun demikian pemerintahan desa akan tetap memberikan dukungan kepada pemerintah.

Kepala Desa Kebong juga menegaskan bahwa masih banyak permasalahan yang belum tuntas yang mesti harus dibenah yang berhubungan dengan tata batas. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Merpak (Kd. 42 thn) bahwa:

Saya selaku Kepala Desa mendukung dan siap menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang sehingga kepala desa yang berada dalam kawasan wisata alam bukit kelam dapat berperan dalam mengimplementasikan kebijakan kepariwisataan. Saya melihat bahwa kebijakan yang di implementasikan selama ini terutama untuk kawasan lingkaran kelam (Taman Wisata Bukit Kelam) belum sesuai dengan harapan, masih ada hal-hal yang perlu di lakukan perbaikan seperti Tapal Batas kawasan. (wawancara, oktober 2017)



Dari petikan wawancara kedua Kepala Desa tersebut bahwa masyarakat masih sangat berharap ada perhatian pemerintah dalam implementasi kebijakan yang menjadi tempat tinggal masyarakat, sehingga kebijakan kepariwisataan pada kawasan taman wisata alam dapat diketahui masyarakat secara menyeluruh dan pemerintah desa dapat secara langsung berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Kawasan wisata mesti didukung dengan kemudahan akses usaha sarana pariwisata yang meliputi penyediaan akomodasi dalam bentuk mudahnya mendapatkan dan memperoleh akses makan, minum dan oleh-oleh sebagai buah tangan para pengunjung. Pelaku dunia usaha yang memberi kontribusi kemudahan akses untuk memperoleh makan dan minuman dan oleh-oleh setiap pengunjung.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa pelaku usaha di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam yakni (N.40 thn) bahwa:

Saya telah membuka usaha makan minum di kawasan ini sejak 4 tahun terakhir, memang kunjung konsumen atau pembeli tidak selalu stabil pada hari biasa agak akan tetapi jika hari tertentu pada hari besar seperti hari besar keagamaan dan tahun baru kunjungan pembeli cukup ramai. (wawancara, Juni 2017)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut, dengan adanya kawasan wisata ini juga memberi kontribusi timbal balik yakni penyedia jasa makanan dan minuman juga merasa terbantu dengan banyaknya jumlah pengunjung. Hal yang nama juga diungkapkan oleh (Ar.44 thn) bahwa:

Usaha makan, minum dan sovenir atau assesoris yang di jual bahwa dengan dengan pengunjung yang banyak memberi penghasilan yang cukup baik bagi usaha yang dilakukannya. (wawancara, Juni 2017)

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan pelaku usaha rumah makan di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam yakni (An.38 thn) bahwa:

Dengan usaha rumah makan yang di lakukannya memberi dukungan untuk memudahkan pada pengunjung dalam mencari makan dan minuman dengan berbagai menu, pengunjung dalam dapat melihat pemandangan keindahan bukit kelam sambil menikmati makanan dan minum dirumah makan yang kita suguhkan. (wawancara, Juni 2017)



Masyarakat kawasan TWABK juga selalu memanfaatkan kesubuh tanah yang berada dikawasan sebagian dari mereka melakukan bercocok taman dengan bertaman buah-buah yang sering dijadikan oleh-oleh pengunjung. Pengunjung juga pada saat musim tertentu dapat membawa dan menikmati buah-buah musiman dan buah lokal. Durian, Pekawai, Mentawak dan lain sebagainya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan (Hr.56 thn) bahwa:

Usaha buah-buahan yang kami sedia merupakan usaha mendukung kebijakan pariwisata untuk memudahkan pengunjung untuk menikmati dan membawa oleh-oleh dalam bentuk buah-buah, saya telah menjadi pelaku usaha dengan berbagai macam buah-buahan sekarang saya memiliki penghasilan hingga Rp. 3.000.000,- setiap bulan dari penjualan pisang. (wawancara, Oktober 2017)

Selain dari pemerintah dan swasta sebagai aktor dari implementasi kebijakan yakni masyarakat, dalam hal ini masyarakat sangatlah penting karena hal ini dapat memberi manfaat dalam meningkatkan pendapatan dan untuk kesejahteraan masyarakat kawasan.

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupten Sintang tentang kepariwisataan memerlukan keterlibatan masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat kecamatan Kelam Permai (Sd.51 thn) mengatakan bahwa:

Untuk mempertahankan bentuk keaslian kawasan agar tidak menimbulkan perselisihan sesama masyarakat satu kampung dengan yang lainnya maka dalam hal ini peraturan daerah harus di optimalkan agar masyarakat dapat membantu menjaga kawasan (wawancara, Oktober 2017).

Akan tetapi berdasarkan wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat Kelam Permai Menurut (Ps.42 thn) mengatakan bahwa:

Saya hanya mengetahui bahwa bukit kelam sebagai objek wisata yang melalui kebijakan pemerintah kawasan bukit kelam merupakan daerah konservasi yang di tetapkan sebagai Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Akan tetapi tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan hal tersebut. Kami sebagai masyarakat juga tidak mengetahui batas-batas wilayah kawasan konservasi dan kawas Taman wisata Alam, karena hingga sekarang masyarakat tidak mengetahui dan melihat peta dari penetapan kawasan konservasi tersebut. Walaupun ditataran kebijakan semua komponen masyarakat haruslah secara sukarela menjaga lingkungan kawasan akan tetapi pihak pemerintah ataupun instansi



yang berkepentingan dikawasan ini secara teknis tidak pernah melibatkan masyarakat terhadap pemeliharaan kawasan Taman Wisata Alam (wawancara, Nopember 2017)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut bahwa masyarakat mengetahui bahwa kawasan lingkaran kelam merupakan kawasan yang dijadikan kawasan taman wisata alam akan tetapi masyarakat tidak mengetahui persis dimana letak tata batas yang menjadi kawasan tersebut, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat kawasan.

Masyarakat kawasan sebagai sasaran menerima dampak dari implementasi kebijakan kepariwisataan Taman Wisata Bukit Kelam, dimana mereka telah mendiami kawasan tersebut secara turun temurun. Kehidupan masyarakat yang masih memegang adat dan tradisi menjadi pedoman kehidupan sehari-hari menjadi potensi yang sangat pendukung dalam pelaksanaan kebijakan daerah tersebut. Masyarakat yang mendiami kawasan TWABK berperan secara langsung sebagai aktor agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara maksimal.

5.1.2 Tujuan Kebijakan (Policy of Targets/Determinations)

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang kepariwisataan pada kawasan TWABK, yang menjadi sasarannya adalah masyarakat dan lingkungan alam baik yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna, memiliki daya tarik tujuan wisata. Oleh karena itu masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu bahwa kawasan adalah kawasan kepariwisataan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Merpak (Kd.42 thn) mengatakan bahwa:

Ya, saya mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata yang mana juga melingkupi wilayah lingkaran kelam yang merupakan daerah tujuan wisata baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar. (wawancara, Nopember 2017)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut masyarakat mengetahui kawasan mereka merupakan pengembangan potensi kepariwisataan yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk menjadi objek kunjungan wisata, oleh karena itu potensi tersebut harus dapat dimaksimalkan oleh masyarakat. Agar membawa dampak yang positif



bagi mereka. Meningkatnya pendapatan masyarakat kawasan pada akhirnya berdampak pada meningkat pula pendapatan daerah. Meningkatnya pendapatan masyarakat TWABK akan berdampak kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, maka berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Disporaparekrif (Er.46 thn) bahwa:

Kunci suksesnya kawasan wisata adalah masyarakat setempat. Kita melakukan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan taman wisata bukit kelam untuk kepentingan semua kita ingin ada multi player effec bagi masyarakat setempat. (wawancara, Nopember 2017)

Selain kepada masyarakat kawasan target dari implementasi kebijakan yakni memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. Lingkungan menjadi target dari kebijakan yakni harus mampu mempertahankan kondisi kelestarian dan keunikan yang menjadi daya tarik. berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa kelam sejahtera (Hrm. 32 thn) bahwa:

Keterlibatan masyarakat yang berada didalam kawan Taman wisata alam bukit kelam kaitanya dengan implemantasi kebijakan kepariwisataan masih sangat kurang hal ini disebabkan belum adanya dorongan dari pemerintah daerah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi mengimplementasi kebijakan di maksud. (wawancara, Desember 2017)

Berdasarkan petikan wawancara diatas bahwa perlu ada pemahaman dari semua pihak terhadap tujuan dari implementasi kebijakan, artinya semua pelaku yang berhubungan dengan tujuan untuk tercapainya kebijakan harus dapat memahami dari isi tujuan kebijakan peraturan daerah kepariwisataan. Akan tetapi yang terjadi tidak semua pelaku kebijakan pada tataran implementasi kebijakan sudah dapat memahami implementasi dari kebijakan. Berdasarkan dari wawancara berbeberapa masyarakat kawasan tentang pengalihan batu dan penebangan pohon pada kawasan tidak memahami kebijakan kepariwisataan. Sehingga dalam pemikiran mereka bahwa lingkungan yang mereka tempati dan bebatuan adalah hak milik mereka. Serta masyarakat berpandangan bahwa bebatuan yang ada disekitar pekarangan rumah merupakan potensi yang bisa memberikan sumber penghasilan.



Tujuan dari implementasi dapat memperkenalkan kawasan TWABK adalah dengan melakukan promosi, berdasarkan wawancara Kepala Bidang Kepariwisata (Em.37 thn) bahwa;

Disporaparekraf telah melakukan langkah dalam bentuk promosi pengembangan kepariwisata Kabupaten Sintang sesuai program kerja dengan tujuan yang dikehendaki sesuai sasaran baik ekonomi, sosial serta lingkungan untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat kawasan. (wawancara, Mei 2017)

Berdasarkan petikan wawancara di atas Disporaparekraf telah melakukan promosi terhadap nilai-nilai kepariwisataan kawasan TWABK dengan melakukan pembuatan brosur, audio dan vidio untuk memperkenalkan objek-objek wisata di Bukit Kelam. Berdasarkan hasil observasi bahwa terdapat brosur promosi objek wisata TWABK dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar.5.1 Brosur promosi objek wisata TWABK yang diterbitkan Disporaparekraf Kabupaten Sintang
 Sumber: Dok. Disporaparekraf Kabupaten Sintang. 2017

Berdasarkan gambar 5.1 bahwa perlu diperkenalkan dan dilestarikan nilai budaya dan lingkungan yang menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional, dengan ini bahwa target dari implementasi yang meningkatkan kemampuan rasa



cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa dengan memperkenalkan keunikan nilai budaya, adat-istiadat, keramahan masyarakat, keindahan panorama alam dapat dilakukan.

Kondisi fisik kawasan TWABK juga menunjang untuk pengunjung dapat menikmati kawasan, kondisi jalan yang masih memadai untuk dilalui walaupun belum baik dan permanen, adanya restoran atau rumah makan yang dapat memberi nilai sendiri dengan sambil menikmati keindahan pada saat menikmati keindahan panorama bukit kelam.

Target implementasi kebijakan kepariwisataan ini juga menekankan memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat kawasan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat kawasan yang berpartisipasi dalam pengaturan parkir pada saat hari besar (J.23 thn dan K.25 thn) bahwa;

Pada hari libur seperti ini kami kesulitan mengatur parkir karena banyaknya pengunjung yang membawa kendara pribadi baik roda dua maupun roda empat tidak sesuai dengan kondisi lapangan parkir yang disedia oleh pemerintah yang hanya kurang lebih 600m² sehingga kami harus mengaturnya hingga kehalaman rumah penduduk. (Wawancara, 1 Januari 2017)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut target atau sasaran dari tujuan tercapainya suatu kebijakan juga harus memperhatikan akses dan daya dukung, nyaman serta kemudahan pengunjung seperti jalan yang memadai, tempat parkir dan fasilitas restoran dan penginapan.

5.1.3 Isi Kebijakan (Contents of Policy)

Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling terkait, bukanlah satuan-satuan komponen yang berdiri sendiri. Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil jika telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Proses implementasi kebijakan keberhasilannya juga dapat ditentukan oleh komponen isi program. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kepariwisataan



memuat isi (*Contents*) yang terdiri dari (10) Bab yang terdiri dari (37) Pasal dan diklasifikasikan menjadi (4) bagian yakni terdiri dari; bagian pertama (usaha Pariwisata); bagian kedua (usaha jasa pariwisata); bagian ketiga (pengusahaan objek dan daya tarik wisata); bagian keempat (usaha sarana pariwisata);

Isi kebijakan (*Contents of policy*) dari Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata, *contents* yang mengatur tentang objek wisata pada kawasan pada Bab III Objek dan Daya Tarik Wisata bahwa Pasal (4) Objek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari atas:(a) objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna; (b) objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala peninggalan bersejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta (wisata air), wisata batu, wisata pertualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan; *contents* kebijakan tersebut bahwa objek tersedia oleh alam dan objek yang bersumber buatan manusia, kedua hal tersebut memiliki kesamaan makna keindahan dan daya tarik yang dapat dinikmati manusia.

Objek daya tarik Bukit Kelam yang telah disediakan oleh alam harus mendapatkan perhatian secara khusus dari pemerintah sehingga dapat dimanfaatkan secara benar dan berkelanjutan oleh karena itu membutuhkan komitmen pemerintah, terutama pihak terkait yang secara teknis langsung menangani kepariwisata kabupaten sintang, berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris

Disporaparekrif (Er.51 thn) bahwa:

tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan kepariwisataan adalah komitmen pemerintah dalam melakukan perencanaan, pembangunan di kawasan, dan anggaran yang ditetapkan pemerintah adalah salah satu hal juga menjadi kendala dalam melakukan proses pembangunan kepariwisataan. (wawancara, Nopember 2017)

Contents of policy dari peraturan daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Sintang bahwa kegiatan pembangunan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata beserta parasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik yang telah ada. Dengan tegas bahwa *contents* ini mengisyaratkan (Bab III



Pasal 6) bahwa objek daya tarik yang ada didalam kawasan harus dapat dimanfaatkan, pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana telah dibangun juga harus mampu mendorong kehidupan ekonomi dan sosial budaya, nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup, Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri; oleh karena itu kawasan harus terjaga dengan baik dan dapat dilestarikan secara turun temurun, hasil wawancara peneliti dengan Temenggung Adat Dayak, Kecamatan Kelam Permai (Yk.61 thn) bahwa;

Sehubungan dengan kebijakan dari peraturan daerah kabupaten Sintang tentang Kepariwisataaan, dalam implementasinya yang berhubungan dengan pelestarian, masyarakat harus diberi pemahaman. Namun demikian, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sudah menjadi tradisi atau adat masyarakat secara turun temurun, karena secara adat masyarakat tidak boleh melakukan penebangan liar (sembarangan) dikawasan milik orang lain, Jika terjadi penebangan tanpa ijin dari masyarakat di kawasan orang lain, akan diberi sanksi adat yang berlaku. (wawancara, Juni 2017)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut bahwa kesadaran tradisional masih melekat pada masyarakat asli kawasan, kesadaran tradisional ini dalam kearifan lokal masyarakat dalam mengharga dan bersahabat dengan alam yakni tanah, air dan udara. Selanjutnya tegaskan lagi oleh Temenggungan Adat Dayak Desa Kecamatan Kelam Permai hasil dari wawancara tersebut (Yk.61 thn) bahwa;

hukum adat ini akan memback-up pemerintah, baik pemerintah desa mau pun pemerintah kabupaten, dengan demikian ada kesengkronan antara pemerintah dengan pemangku adat sebagai mitra kerja dalam melindungi kawasan dari kerusakan, hal ini dikarenakan masyarakat disini juga masih memiliki kesadaran tinggi tentang adat. Oleh karena itu perlu keputusan bersama di untuk menjaga kawasan lingkur Taman Wisata Bukit Kelam dalam hal mengaja dan melestari lingkungan kawasan. (wawancara, Juni 2017).

Kawasan objek wisata biasanya dilengkapi dengan pembangunan dan parasarana dan sarana yang diperlukan untuk menambah kegiatan daya tarik yang telah ada, berdasarkan data yang sarana dan prasarana yang di objek wisata bukit kelam meliputi: 1) Gapura; 2) Get Pintu Masuk Objek Wisata; 3) Pagar Depan; 4) Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua, Roda Empat dan kendaraan Lainnya; 5) Gazebo yang sangat terbatas; 6) Tempat permainan Anak-anak; 7) Tempat Mandi,



Cuci Kakus (MCK); 8) Pentas terbuka; 9) Tangga Besi menuju Jalan ke Puncak Bukit Kelam; 10) Kios Makan, Souvenir dan Lain-lain.



Foto 5.2 **Gapura Masuk Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam**
Sumber: Dok Peneliti, 2017

Gapura pintu masuk kawasan taman wisata Bukit kelam berada di jalan poros yang menghubungkan 2 kabupaten kawasan timur Kalimantan Barat yakni Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, kawasan TWABK terhubung dengan jalan melingkar bukit kelam sepanjang kurang lebih 10 Km. dengan akses jalan yang pengerasan dan sebagian aspal dengan lebar 4 Meter. Sedangkan akses menuju puncak Bukit Kelam Pengunjung dapat menggunakan tangga, seperti pada gambar berikut:



Foto 5.3. **Tangga menuju Puncak Bukit Kelam pada TWABK**



Sumber: Dok. Disporaparekrat

Berdasarkan gambar 5.3 tersebut bahwa pengunjung diberi kemudahan untuk dapat menikmati pemandangan dari puncak Bukit Kelam, dengan berada di puncak mengunjung dapat melihat pemandangan dan panorama keindahan. Implementasi kebijakan yang mengatur objek daya tarik wisata alam yang merupakan pemanfaatan sumber daya yang ada dikawasan bukit kelam harus terus dilakukan, berdasarkan observasi bahwa banyak potensi daya tarik yang belum dapat dimanfaatkan adalah pada Pasal 20 yang menyatakan “bahwa pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata”. Ada dua hal yang harus diperhatikan secara terpisah dari makna pasal tersebut yakni sumber daya alam dan pontensi seni budaya.

Daya tarik pada kawasan bukit kelam adalah bongkahan batu-batuan besar yang berada disekitar kaki bukit menjadi cirikhas. Bebatuan tersebut berdia meter hingga puluhan meter berikut gambar salah satu batu besar yang berada dikawasan bukit kelam:



Gambar 5.4 Salah satu bebatuan besar yang tersebar di kaki-kaki bukit kelam di kawasan TWABK.

Sumber: Dok. peneliti 2017

Bebatuan besar seperti pada gambar 5.4 tersebut adalah potensi yang dapat ditata sebagai daya tarik yang unik. Berdasarkan observasi peneliti bahwa bebatuan di kawasan bukit kelam ini bagi masyarakat ada yang memiliki nilai sejarah yang dipercayai sebagai yang memiliki makna sakral. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kelam Permai (Sd. 51 thn) menyatakan bahwa:

Untuk menjaga dan melindungi batu-batu yang dimiliki nilai sejarah seperti halnya Batu Bedilah, Batu Lalau, Batu Bediri, Batu Betangkap, Batu Kekurak dan Batu Muanyik yang ada di kawasan bukit kelam. Harus ada perlindungan dalam bentuk dipetakan dijadikan objek wisata sebagai bentuk perlindungan. Dengan demikian masyarakat berdekatan dengan objek tersebut bisa mendapatkan manfaat. (wawancara, Juni 2017).

Keunikan yang menjadi tarik dengan banyaknya bebatuan besar sejak tahun 2012 mulai terjadi pengalihan oleh beberapa masyarakat dalam kawasan dengan alasan ekonomi hal tersebut menjadi pembenaran untuk melakukan pengerusakan atau *exploitasi* batu secara besar-besaran di kawasan taman wisata bukit kelam tersebut, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar.5.5. Aktivitas pengalihan dan pemecahan batu dengan cara dibakar pada kawasan TWABK

Sumber: Dok. Peneliti 2017



Berdasarkan gambar 5.5. tersebut bahwa kerusakan telah terjadi pada kawasan Taman Wisata Bukit Kelam. Hal tersebut di perparah lagi dengan pembukaan lahan pertanian dan perkebun pada kawasan tersebut seperti pada gambar berikut;



Gambar.5.6. Aktivitas Perbukaaan Lahan Pertanian Masyarakat pada Kawasan TWABK

Sumber: Dok. Peneliti 2017



Berdasarkan gambar 5.6 bahwa isi kebijakan pada Pasal 21 bahwa perusahaan objek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan atau ketertiban dan ketentraman masyarakat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang di atur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Berdasarkan wawancara



peneliti dengan masyarakat di Kawasan TWA Bukit Kelam (H.32 thn) menyatakan bahwa:

Tidak ada melibatkan masyarakat menjaga kelestarian kawasan taman wisata alam bukit kelam bahkan banyak membuat perubahan kawasan bukit kelam tidak alami lagi seperti sebelumnya karena banyak pengerusakan hutan dan batu di sekitar dan terkesan adanya pembiaran dari pemerintah daerah itu sendiri. Serta tidak ada evaluasi terhadap aktivitas kepariwisataan di kawasan bukit kelam, hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada ditaman Wisata Alam Bukit Kelam selama ini hanya bersifat sekali-sekali dan tidak adanya perubahan pengembangan terhadap kawasan objek wisata alam bukit kelam itu sendiri. (wawancara, Juni 2017).

Berdasarkan petikan hasil wawancara tersebut bahwa perlu pengawasan berkala sehingga kerusakan tidak semakin parah, Kerusakan lingkungan yang terjadi dikawasan TWABK sangatlah memberi dampak bagi keaslian yang menimbulkan perubahan, hilangnya keunikan serta keindahan alam. Pada tahun 2017 saja kerusakan yang tercatat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 5.3. Rekapitulasi Kerusakan Kawasan TWABK pada Tahun 2017

No	Kawasan TWA	Volume Kerusakan (Ha)	Penyebab Kerusakan
1	Desa Kebong	3,5 (Ha)	a. Penebangan kayu b. Pengalihan batu c. Pemasangan Pipa Air Rakyat d. Perkebunan
2	Desa Merpak	2,5 (Ha)	a. Penebangan kayu b. Pemasangan Pipa Air Rakyat c. Perkebunan
3	Desa Kelam Sejahtera	1 (Ha)	a. Penebangan kayu b. Pengalihan batu c. Pemasangan Pipa Air Rakyat d. Perkebunan
4	Desa Samak	1,5 (Ha)	a. Penebangan kayu b. Pemasangan Pipa Air Rakyat c. Perkebunan

Sumber. BKSDA Wilayah II Sintang

Berdasarkan pada tabel 5.3. dapat dijelaskan bahwa rusak yang terjadi dikarenakan 4 hal yakni (1) pengalihan Batu, (2) Penebangan, (3) Perkebunan, (4)

Pemasangan pipa air rakyat, yang klasifikasi jumlah kerusakan di Desa Kebong yakni 3,5 Ha, Desa Merpak 2,5 Ha, Desa Kelam Sejahtera 1 Ha dan Desa Samak 1,5 Ha.

Pengalihan batu memberi dampak hilangnya keunikan yang banyak terjadi adalah di Desa Kebong dan Desa Kelam Sejahtera, pengalihan yang disertai pemecahan batu untuk di jual terjadi hampir sepanjang jalan lingkaran yang menjadi Kawasan



TWABK. Galian batu ditumpuk-tumpuk dipinggir jalan untuk selanjutnya akan dibeli dan diangkut oleh menggumpul. Penebangan dan perkebunan yang ada di Kawasan

TWABK juga mengakibatkan rusaknya lingkungan yang cukup parah dan perlu dilakukan pemulihan.

Berdasarkan wawancara dengan (Yt, 48 Thn) bahwa: "Wajar pengambilan atau pegalian batu, penebangan dan pembukaan lahan oleh penduduk karena dibawah penguasaan secara turun temurun". Dari petikan wawancara tersebut bahwa mereka berpikir atau berpandangan bahwa kawasan tersebut adalah boleh dilakukan seperti halnya hak milik peribadi.

Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama lintas sektor yaktu BKSDA Wilayah II Sintang, UPT Kehutanan Wilayah Utara Kalbar dan Perguruan Tinggi telah melakukan proses penghijauan kembali dengan melakukan penanaman pohon di Kawasan TWABK. Penanaman pohon kembali tersebut untuk memulihkan kawasan yang telah mengalami perubahan akibat kerusakan. Adapun jenis pohon ditanam adalah Sungkai (*Veromenna camessen*) dan kayu gaharu (*Aquilaria malaccensis*) yang berjumlah 8300 pokok pohon. Untuk lebih jelas penanaman pohon di Kawasan TWABK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.4. Rekapitulasi Penanaman Pohon di Kawasan TWABK

No	Tahun Kegiatan	Jumlah pohon	Aktor Pelaksana	Jenis Pohon
1	2012	4000 Pokok	Disporaparkraf, UPT Kehutanan Wilayah Utara	Sungkai



			Kalbar, BKASD Wilayah II (Veromenna camessen)
2	2014	1300 Pokok	Universitas Kapuas Sintang (Prodi Biologi FKIP), STKIP-PK Sintang (Veromenna camessen)
3	2015	3000 Pokok	UNTAN Pontinak (Mapala-UNTAN) Gaharu (Aquilaria malaccensis)

Sumber. Dok. BKSDA Wilayah II Sintang

Berdasarkan tabel.5.4. bahwa penanaman kembali pohon sebagai upaya memulihkan lingkungan yang hijau, penanaman dilakukan dengan dua jenis pohon yakni Sungkai sebanyak 5300 pokok pohon dan Gaharu sebanyak 3000 pokok pohon, yang dilakukan oleh berbagai komponen *stakeholder*.

Melihat kondisi berubahnya kondisi lingkungan pada kawasan perlunya pembinaan dari pihak pemerintah adalah sangat penting sesuai pasal 31 ayat (1) bahwa Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan. Akan tetapi hasil wawancara dengan Masyarakat di Kawasan TWA Bukit Kelam (Vk. 28 thn) menyatakan bahwa:

Ada pengawasan yang dilakukan pemerintahan namun tidak dilakukan secara rutin, warga tidak ambil peduli dari hasil pemantau oleh pemerintah untuk kelanjutan program pengembangan kepariwisataan. (Wawancara, Juni 2017)

Demikian juga hal yang sama diungkapkan Kepala Desa Merpak (K.42 thn) mengatakan bahwa:

Tidak ada teguran terhadap pengerusakan dan penebangan serta pengalihan dikawasan jikapun ada, ya kadang-kadang pada kondisi sekarang. (Wawancara, Juni 2017)

Kerusakan yang terjadi pada kawasan taman wisata alam bukit kelam pada bab VIII pada Peraturan Daerah Kabupten Sintang Nomor 5 Tahun 2008 jelas berisikan ketentuan pidana terutama pada Pasal 35 ayat (1) yakni;

Barang siapa melakukan perbuatan melawan hak, dengan sengaja merusak, mengurangi nilai, memisahkan, atau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsi secara sempurna suatu objek wisata dan daya tarik wisata atau bagian dari bangunan objek dan daya tarik wisata, di pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).



Berdasarkan pasal 35 ayat (1) sanksi yang diberikan sangatlah berat akan tetapi kini belum pernah diberikan penindakan yang tegas kepada pelaku pengerusakan. Banyaknya pelanggaran yang terjadi terkesan ada proses pembiaran hal ini sesuai yang diungkapkan Masyarakat Kecamatan Kelam Permai (Sd. 42 thn) tokoh menyatakan bahwa;

sejak dulu memang sudah dilarang akan tetapi sekarang tambah rusak karena banyaknya pengalihan batu. Memang ada pelarangan akan tetapi masyarakat tetap bekerja melakukan pengalihan secara liar. Karena saat upaya tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan penggalian sebatas kabarnya angin saja, sehingga batu terus menerus menumpuk dipinggir jalan untuk dijual. (Wawancara, Juni 2017)

Dari hasil wawancara tersebut hilangnya keaslian dan keunik bebatuan perlu pengelolaan secara serius hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Mepak (Kd.42 thn) dan Kepala Desa Kebung (Dm. 45 thn), bahwa;

Belum ada keseriusan pemerintah dalam mengelola Kawasan TWABK, Saya lihat ada teguran jika ada pelanggaran atau pengerusakan serta penebangan namun hanya sewaktu waktu saja tapi tidak ada tindak lanjut.sebaiknya melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan kawasan sehingga pihak ketiga akan berinvestasi dan melakukan pembangunan dengan lebih baik. (Wawancara, Juni 2017)

Dari pernyataan kedua Kepala Desa tersebut bahwa perlu perhatian secara serius terhadap Kawasan TWABK terhadap pelesatrian kawasan, banyak terjadi pelanggaran namun pelaku pengerusakan terus saja berlangsung, bahkan telah menimbulkan korban nyawa. Misalnya yang terjadi korban nyawa pada tanggal 20 Nopember 2017 sebagai bukti masih terjadi pengerusakan secara berkelanjutan,

dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar: 5.7 **Penggalian Liar di Kawasan TWABK mengakibatkan Korban**
Sumber: Koran Harian Kapuas Post Kalbar, 29 Nopember 2017.

Berdasarkan gambar 5.7 bahwa kejadian tersebut jika dilihat dari implementasi Perda Bab (V) Pembina Pasal (32) bahwa: ayat (1) Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan objek dan daya tarik wisata. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemilikan kawasan pariwisata.

5.2 Faktor Pendukung dan Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Kepariwisataannya ada berbagai faktor yang mempengaruhinya baik sebagai faktor pendukung maupun sekaligus sebagai faktor penghambat. Berikut ini disampaikan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang kepariwisataan dalam pelaksanaan di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

5.2.1 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Kepariwisataannya

5.2.1.1 Kearifan Lokal



Pelestarian di Kawasan TWBKA, melalui pemerintah daerah yang diturunkan pada instansi teknis untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan masyarakat lokal sangat memberi kontribusi. Kontribusi yang diberikan dalam bentuk tradisi dari pola kehidupan masyarakat setempat. Keunikan tradisional masyarakat dalam bentuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan alam yang dilakukan dengan cara adat-istiadat. Tradisional adat istiadat yakni dengan acara ritual adat mendukung pelestarian alam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Dewan Adat Dayak Desa (Bb.50 Thn) bahwa;

masyarakat dayak beranggapan bahwa tanah dan alam beserta isinya adalah milik Puyang Gana (pencipta) sehingga apapun yang dilakukan yang berhubungan dengan alam manusia wajib meminta, menghormati dan menjaga ciptaannya. (Wawancara, Juni 2017).

Dari petikan wawancara tersebut diatas bahwa masyarakat di kawasan sangat menghargai kehidupan alam dan lingkungan secara turun temurun sehingga pelestarian dapat dijaga dengan cara adat tradisi yang melekat pada kehidupan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Temenggung Adat Dayak Kelam Permai (Yk.61thn) bahwa;

Kami sebagai masyarakat dayak telah sangat menyatu dengan alam masyarakat kami sudah ada secara turun temurun, melakukan cara dengan menggunakan hak adat dan kebiasaan seperti rumah betang, berladang, bertanam tumbuh dan yang berhubungan dengan sesajin terhadap penguasa alam sebagai tata kerama dalam kehidupan adat. Menyatunya dengan telah menjadi semboyan masyarakat yakni "BETUNGKAT KE ADAT BASA BEPEGAI KE PENGATUR PEKARA" (Wawancara, Juni 2017)

Dari pernyataan Temenggung Adat Dayak Desa Kecamatan Kelam Permai tersebut bahwa pola kehidupan tradisional sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Berdasarkan hasil wawancara dengan (Ny. 60 Thn) bahwa;

Dalam hal ini karena tanah dan tanam tumbuh dilindungi dengan adat maka jelas secara adat siapa yang melakukan pengerusakan, menebang dan siapa yang berladang dalam wilayah milik orang lain akan dikena sanksi adat. (Wawancara, Juni 2017)

Pernyataan diatas menegaskan bahwa masyarakat kawasan tidaklah bebas untuk melakukan aktifitas terhadap lingkungan secara tidak bertanggungjawab dan



jika ada yang melakukan tentu akan dikenakan sanksi adat oleh lembaga adat.

Sanksi adat merupakan upaya penegakan hukum adat kampung yang berlaku pada masyarakat. Hal ini sebagai tatanan kehidupan sosial yang masih turun temurun bagi masyarakat dayak Kecamatan Kelam Permai khususnya pada Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Pola kehidupan tradisional ini sangat membantu dalam pelestarian dan sekaligus sebagai daya tarik wisata untuk Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Temenggung Adat Dayak Kelam permai, (Yk.61 thn) bahwa;

Masyarakat masih tetap menjaga pola tradisi lama seperti Temawai (Tembawang), Gupung (bekas Perkampungan lama yang sudah ditumbuhi tanaman buah) Tanah Mali, Rimbak Mali, Rimbak Adat, Kayu Mali/kayu yang di sakralkan. (Wawancara, Juni 2017)

Dari pernyataan diatas bahwa cara tradisional yang dilakukan masih sangat menjaga kelestarian untuk keberlangsungan hidup dikawasan sehingga dapat memberi kontribusi keindahan dan kerindangan pada kawasan Taman Wisata Bukit Kelam. Tradisi lama yang dipertahankan masyarakat tidak hanya dalam hal hubungan manusia dengan kehidupan lingkungan akan tetapi bahasa dan tradisi budaya juga masih melekat secara turun temurun pada masyarakat Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Anggota Dewan Adat Dayak Desa (B.50 Thn) bahwa;

Masyarakat masih sangat tunduk pada alam sehingga dalam melakukan aktivitas yang berhubungan alam baik penggalian, pembukaan lahan dan penebangan masih menggunakan atau dilakukan dengan prosesi adat sebagai ungkapan meminta petunjuk dan permissi kepada alam. Prosesi adat kami melakukan penebasan atau pembukaan lahan untuk ladang atau perkebunan menggunakan adat sengkelan Tanah. (Wawancara, Juni 2017)

Dari pernyataan diatas bahwa pelestarian lingkungan dengan menggunakan tradisi lama yang masih berlanjut sampai sekarang bentuk kepedulian yang telah melekat dan di jaga secara turun temurun.

Prosesi adat *Sengkelan Tanah* yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk permohonan izin untuk melakukan pembukaan lahan. Pelestarian lingkungan



masyarakat dayak desa masih banyak sekali larangan-larangan pengerusakan terhadap tanah (bumi) maupun lingkungan. Jika larangan-larangan tersebut dilanggar maka sanksi adat akan dikenakan. Berdasarkan wawancara dengan Temenggung Adat Dayak kelam Permai (Yk.61 Thn) bahwa;

Larangan-larangan yang berhubungan dengan pola pelestarian lingkungan yakni sebagai berikut; (1) Larangan Menebang/Mencuri Pohon di Hutan baik dikawasan adat maupun kawasan milik orang lain, (2) Larangan Mengambil atau Membunuh Satwa baik dikawasan Hutan adat maupun Hutan Milik Pemerintah, (3) Larangan Membuka lahan Untuk Berladang di kawasan yang di anggap kramat (hutan mali dan tanah mali) atau bernilai sejarah (asal usul). (Wawancara, Juni 2017)

Dari pernyataan diatas jelas bahwa Berbagai adat dan tradisi masyarakat yang berhubungan dengan pelestarian dan sekaligus menjadi daya tarik wisata pada Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Kepercayaan lama bagi masyarakat memberi kontribusi bagi mendukung pelestarian, yang mana masyarakat masih percaya dengan mitos bahwa tempat-tempat yang dianggap keramat yakni masih ada kayu tertentu yang menjadi tempat tinggal makhluk halus (*Kayu mali*) dan tanah yang tidak boleh ladang bahkan tidak dilalui/dilewat (*Tanah Mali*), batu yang tidak boleh disentuh (*Batu mali*), serta ada danau atau air yang tidak boleh dimandi dan didekati (*Lepung Mali*). Masyarakat beranggapan hal-hal seperti itu merupakan rumah atau tempat tinggalnya makhluk halus. Oleh karena itu jika barang siapa bagi masyarakat yang melanggar akan mendapatkan malapetaka. Berdasarkan hasil wawancara dengan (Yk) 61 Thn bahwa;

Sehubungan dengan kebijakan dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah masyarakat harus diberi pemahaman namun dengan demikian kesadaran adat masyarakat juga masih ada, karena secara adat juga tidak boleh melakukan penebangan sembarangan di kawasan adat. Dan jika terjadi juga dikawasan orang lain juga di beri sanksi adat berdasar aturan adat yang berlaku. (Wawancara, Juni 2017)

Dari pernyataan tersebut bahwa hukum adat masih tetap berlaku kepada siapa saja yang melakukan pengerusakan lingkungan, hal ini adalah sebagai bentuk dukungan untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan yang secara turun temurun secara adat. Jika ada masyarakat yang melakukan pengerusakan oleh Dewan Adat



Dayak yang berada di Kecamatan Kelam Permai maka akan di hukum adat pencurian. hukum adat diberikan kepada masyarakat yang melanggar dalam bentuk sanksi adat baik secara material maupun juga yang bersangkutan marasa malu jika dirinya di hukum adat oleh Dewan Adat Dayak. Hasil observasi peneliti bahwa; Sanksi adat yang diberikan jika masyarakat melakukan pelanggaran dalam bentuk mencuri dan merusak dikawasan yang bukan menjadi haknya yakni Sanksi Adat Kesupan Kampung dan Sanksi Adat Salah Basa.

Hukum Adat Kesupan kampung ini merupakan sanksi adat yang diberikan kepada masyarakat yang telah melanggar peraturan adat kampung, kepada yang melakukan pelanggaran di beri sanksi adat sebanyak 20 Rial (1 Rial identik dengan Tiga Puluh Ribu Rupiah(Rp. 30.000,-)) sedangkan Hukum Adat Salah Basa yakni sanksi adat yang diberikan kepada pelaku sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain, kepada yang bersangkutan disanksi bangku adat sebesar 20 Rial sebagai dasar hukum serta bagi pelaku juga dikenai sanksi batang adat. Sanksi batang adat ini pelaku harus menyediakan; (1) Satu ekor Ayam, (2) Semangkok Beras, (3) 1 Renti Babi (kurang lebih beratnya 25 Kg), (4) Sebatang besi, cukup di identikan dengan 1 paku diletakan di atas mangkok beras, (5) 6 Botol tuak. (Dok. Buku Hukum Adat Dayak Desa Ketemenggungan Sintang).Pernyataan diatas bahwa sanksi adat bagi masyarakat yang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan untuk dapat memberi efek takut dan jera untuk berlakukan semena-mena terhadap tumbuhan-tumbuhan dan binatang atau satwa serta air.

5.2.1.2 Koordinasi

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah sangat perlu dilakukan koordinasi, untuk dapat dipahami secara bersama oleh semua komponen yang bersinggungan dengan kebijakan tersebut. Dengan melakukan koordinasi dan mendapat pemahaman bersama akan lebih mudah untuk dapat menentukan sikap



dari sebuah institusi, hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Disporaparekrif (H. 52 thn) bahwa;

Institusi kami dalam menjalankan kewenangannya terhadap implementasi Perda kepariwisataan di Kawasan TWABK melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder. (Wawancara, Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa koordinasi telah dilakukan kepada pihak-pihak yang bersinggungan terhadap implementasi peraturan Daerah Kabupaten Sintang. Koordinasi mengimplementasi peraturan daerah kepada relasi kerja (*stakeholder*) untuk pengembangan Kepariwisata untuk menghindari munculnya masalah-masalah yang berhubungan dengan seluruh komponen yang ada di Kawasan TWABK, hasil wawancara dengan Sekretaris Disporaparekrif (Er. 51 thn) yakni;

Sejak di tetapkan sebagai kawasan konservasi, semua yang ada didalam kawasan jalan lingkaran (TWABK) tersebut adalah merupakan kawasan yang tidak boleh dilakukan penebangan dan pengerusakan oleh siapapun. Apalagi sekarang BKSDA telah melakukan penataan blok di kawasan tersebut. (Wawancara, Oktober 2017)

Dari hasil petikan wawancara tersebut sangat penting untuk menjalin relasi kepada seluruh *stakeholder* dalam mengimplementasi kebijakan keparwisata. Adapun *Stakeholder* dalam implementasi Kebijakan Kepariwisata di Kawasan TWABK oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5. Mitra Kerja (Stakeholder) Disporaparekrif dalam mengimple mentasikan Kepariwisata di Kawasan TWABK.

No	Mitra Kerja /Stakeholder	Keterlibatan dalam Implementasi Kebijakan
1.	BKSDA	1. Pemangku Kawasan 2. Merencanaan dan Pengelolaan Tata Blok kawasan. 3. Regulasi pengelolaan kawasan 4. Perlindungan, pengamanan tamanan dan satwa
2.	Dinas PUPR	1. Akses menuju kawasan 2. Jalan dan Jembatan
3.	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM	1. Wadah Untuk berjualan 2. Pembinaan Jasa Penjuala Sovenir
4.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	1. Pelestari 2. Mutu Lingkungan



5.	UPT Kehutanan Wilayah Utara Kalbar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Satwa 2. pengamanan kawasan 3. Pembinaan masyarakat Kawasan
6.	Kepolisian Sektor Kelam Permai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dan Kenyaman kawasan 2. Sengketa lingkungan 3. Sengketa sosial
7.	Camat Kelam Permai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan wilayah 2. memfasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan 3. Penyedia Data Administasi pemerintah
8.	Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Aparatur Pada Level Dasar di Kawasan 2. Aparatur yang bertempat tinggal di kawasan 3. Penyedia Data Administasi pemerintah
9.	Masyarakat Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduk yang menerima dampak kebijakan 2. Penduduk yang beraktivitasi di kawasan
10.	Perguruan Tinggi/Akademisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi banding 2. Penelitian 3. Pengembangan ilmu pengetahuan
11.	Pengunjung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai Pengguna atau konsumen 2. Penikmat Keunikan dan Keindahan Kawasan
12.	Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investor (Investasi Komersil) 2. Pengguna peluang Jasa pariwisata
13.	LSM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerhati 2. mediator dan katalisator (pengerak) 3. Penyelenggaraan pentas musik (Impresaria)
14.	Lembaga Adat, Dewan Adat (Ketemenggungan Adat Dayak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kearifan lokal 2. Menjaga tatanan sosial 3. Upacara Adat dan tradisi pelestarian lingkungan 4. Petunjukan Aktraski Kesenian daerah

Sumber: Hasil wawancara dan Observasi yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 5.5 bahwa *Stakeholder*/Mitra Kerja Disporaparekrاف dalam mengimplementasikan Kepariwisataan di Kawasan TWABK yakni (1) BKSDA



yang berperan sebagai pemangku kepentingan penguasaan wilayah konservasi Bukit Kelam, Bukit Luit dan Bukit Rentap, (2) Dinas PUPR sebagai penyedia akses menuju kawasan, (3) Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM sangat peran memberi daya dukung melalui Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti Pembinaan Koperasi terutama Para Pengerajin Candra Mata dan Sovenir, (4) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pengendalian mutu lingkungan dan pelestarian, (5) UPT Kehutanan Wilayah Utara Kalbar sebagai perlindungan satwa, pengamanan kawasan dari gejala bencana (Kebakaran, Penebangan, dll) serta pembinaan terhadap masyarakat dalam dan sekitar kawasan, (6) Kepolisian Sektor Kelam Permai memberi perlindungan kepada masyarakat yang berada di kawasan, (7) Camat Kelam Permai sebagai Kepala Administrasi wilayah, (8) Kepala Desa Pelaksana Administrasi Pemerintah yang terendah yang berada di kawasan, (9) Masyarakat Kawasan adalah Kelompok Masyarakat yang terdampak dari kebijakan, (10) Akademisi adalah yang berkepentingan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, (11) Pengunjung yakni sebagai pengguna dari keidahan dan keunikan dari kawasan TWABK, (12) swasta adalah pihak investor yang bisa memanfaatkan jasa kepariwisataan seperti; a) Warung/Restoran, b) Jasa trevel, c) transfortasi wisata, d) Penyedia/Penjual Suvenir, e) Hotel dan Penginapan. (13) LSM keberadaanya sebagai pemerhati, mediasi, katalisator dan penyelenggara pentas musik (*imprensaria*). (14) Lembaga Adat, Dewan Adat (Ketemenggungan Adat Dayak) yang memiliki kearifan lokal secara turun temurun, penjaga kelestarian dengan kecerdasan lokal, mengatur tatanan kehidupan sosial di kawasan TWABK serta menyelenggarakan petunjuk kesenian daerah (sanggar Tari).

5.2.1.3 Komitmen Pejabat

TWABK sebagai potensi daya tarik pariwisata yang dapat diandalkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Potensi daya tarik kawasan menambah keunikan tersendiri. Dengan keunikan-keunikan yang ada tersebut Disporaparekras



membangun fasilitas kepariwisataan sebagai daya dukung memberi kenyamanan kepada pengunjung, hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Kepala Disporaparekrif (H. 52 thn) bahwa;

infrastruktur dasar kepariwisataan telah di bangun dikawasan-kawasan objek wisata di kawasan tersebut, sebagai menunjang kenyamanan dan daya tarik pariwisata. (Wawancara, Nopember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Disporaparekrif selalu berkomitmen untuk dapat mengimplementasi kebijakan di kawasan TWABK, komitmen/keseriusan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Disporaparekrif (Er.51 thn) menyatakan bahwa:

tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan kepariwisataan adalah komitmen pemerintah dalam melakukan perencanaan, pembangunan di kawasan, dan anggaran yang ditetapkan pemerintah adalah salah satu hal juga menjadi kendala dalam melakukan proses pembangunan kepariwisataan. (Wawancara, Oktober 2017).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan TWABK sudah menjadi bagian tugas pokok dan fungsi Disporaparekrif. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kraetif. Mengacu pada Peraturan Bupati tersebut maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) yakni Rencana Kerja Disporaparekrif. RENJA merupakan dokumen perencanaan kerja yang disusun untuk satu tahun,yang memuat program kerja tahunan, merupakan *break down* dari Rencana Stragis (RENTRA).

Komitmen pejabat sebagai implementor dari perda kepariwisataan dalam merialisasikan Visi dan Misinya Disporaparekrif membuat tujuan dan sasaran kerja dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan dan dan sasarkan kerja ini dibuat dalam jangka 5 tahun kerja yang didasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah tertuang dalam visi dan misi. Dengan merujuk pada visi dan misi tujuan sasarkan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6. Indikator Tujuan dan Sasaran Kerja Disporaparekrif 2015-2021



No	Tujuan	Sasaran Kerja
1	Pengembangan Daya Tarik Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan data best daya tarik wisata dalam bentuk audio visual 2. Forum Komukasi (FOKKOM) pengembangan destinasi pariwisata. 3. Pengembangan fasilitas di objek dan daya tarik pariwisata unggulan. 4. Review desain penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah. 5. Penataan kawasan objek wisata yang ada di Kabupaten Sintang
2	Pengembangan Usaha Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Sertifikasi tenaga usaha pariwisata 2. Klasifikasi halal 3. Lomba toilet Bersih di usaha rumah makan 4. Lomba Foto daya tarik wisata
3	Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan masyarakat sadar wisata 2. Pelaksanaan aksi Sapta pesona Pariwisata 3. Pengembangan destinasi pariwisata
4	Promosi dan Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran potensi pariwisata 2. Paket khusus pesona budaya Sintang di TMII 3. Pengembangan Kesenian dan Budaya 4. Pameran dalam rangka Rakon WTW se-Kalimantan 5. Event-event promosi pariwisata luar Propinsi Kalbar 6. Pengadaan bahan promosi pariwisata 7. Pengadaan VCD Objek daerah tujuan wisata Kabupaten Sintang 8. Pembuatan sarana dan prasarana pendukung promosi pariwisata Kabupaten Sintang 9. Pembuatan profil pariwisata Kabupaten sintang
5	Analisis Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghimpunan Data Wisatawan 2. Survey Pasar Pariwisata 3. Pengolahan data pariwisata
6	Kerjasama Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi pariwisata dalam rangka kerja sama Sosek Malindo. 2. Rapat Koordinasi teknis (RAKORNIS) perencanaan bidang pariwisata.
7	Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Putra-Putri Pariwisata Kabupaten Sintang 2. Fasilitasi pertemuan duta wisata tingkat propinsi Kalbar 3. Fasilitasi hasil pemilihan putra-putri pariwisata tingkat provinsi 4. Gelar budaya terpadu Kabupaten Sintang 5. Pelatihan sumber daya manusia pelaku dan pengiat bidang pariwisata
8	Pengembangan Sistem Informasi pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi petugas media informasi pariwisata 2. Informasi Pesona pariwisata Kabupten Sintang di media cetak 3. pengembangan wawasan pariwisata 4. Sosialisasi dan Fasilitasi HKI
10	Pengembangan Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasaran pariwisata 2. Pemantapan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 3. pengembangan daerah tujuan wisata

Sumber: Dok. Restra Disporparekraf. 2018

Berdasarkan tabel 5.6 bahwa tujuan merupakan penjabaran program kebijakan dalam bentuk yang berisikan satu atau lebih kegiatan sedangkan sasaran kerja adalah kegiatan yang merupakan bagian dari satu kesatuan bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Sehubungan dengan komitmen pemerintah masyarakat kawasan TWABK sangat mendukung program Disporaparekraf dalam mengimplementasi kebijakan kepariwisataan, masyarakat berharap pengembangan kepariwisataan dapat memberi kontribusi kepada masyarakat yang berada di kawasan hal ini sesuai dengan masyarakat di kawasan TWABK (Hm.32 thn) bahwa;



Implementasi kebijakan kepariwisataan yang dituangkan dalam bentuk Perda harus mampu memberi kontribusi bagi masyarakat setempat, karena pengembangan yang telah dilaku pada objek wisata bukit kelam sangat seadanya dan perumahan tempat istirahat yang semi permanen sehingga belum mendatangkan kontribusi yang maksimal bagi masyarakat sekitar. (wawancara, Desember 2017)

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa Pejabat pelaksana teknis sebagai implementor harus memiliki komitmen nyata dalam pengembangan kepariwisataan di kawasan TWABK, komitmen nyata yang harus dilakukan adalah dengan dapat merealisasikan program yang tepat sasaran yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Pembangunan nyata yang telah dilakukan untuk sarana publik penunjang kepariwisataan antara lain; Kolam Renang, namun kondisi sekarang sangat tidak terawat dan tidak bisa difungsikan dan ini terkendala dana pemeliharaan yg tidak ada, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.8. **Sarana dan Prasarana Penunjang Kepariwisata di kawasan TWABK**

Sumber: Dok. Disporaparekrif.

Gambar 5.8. gambar diatas menunjukan pemanfaat dan pemeliharaan fasilitas kepariwisataan yang kurang dilakukan, menyebabkan tidak dapat difungsikan secara baik, dari aspek keindahan, kebersihan dan kenyamanan.

5.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Taman Wisata Alam Bukit Kelam

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat mendeskripsikan beberapa faktor penghambat, sebagaimana disajikan dibawah ini yakni;



5.2.2.1 Sengketa Tata Batas

Masalah tata batas sejak di ditetapkan sebagai kawasan Taman Wisata Alam tahun 1992 terus menjadi perdebatan yang ada di dalam masyarakat kawasan lingkaran kelam dan penduduk tidak mengetahui bahwa kawasan mereka menjadi kawasan taman wisata alam. Namun pembangunan berupa sarana dan prasarana pariwisata telah dibangun sejak lama dilakukan seperti tangga menuju puncak, telapak jalan menuju tangga, jalan rabat beton menuju air terjun yang telah beberapa kali diperbaharui atau perbaikan, serta beberapa tahun yang lalu (10) dibangunlah *resk area*, membangun kolam renang, taman-taman, serta membangun gedung serba guna. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelapa Disporaparekraf (H.52 Thn) bahwa;

pembangunan ini semua dilaksanakan sebelum kita menjalin komunikasi dengan BKSDA, namun pada tahun 2016 BKSDA melaporkan kepada kami bahwa kami tidak boleh melakukan aktifitas sebelum adanya PKS (Perjanjian Kerja sama). Selanjutnya diungkapkan PKS dengan BKSDA yang rencanakan akan di tandatangani pada tahun 2018.(wawancara, Februari 2018)

Isi perjanjian PKS yakni apa saja yang dikelola pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah selama 5 tahun dan setelah selesai akan diperpanjang, sehingga Pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun dan dipelihara. Selanjutnya Kelapa Disporaparekraf (H.52 Thn) mengatakan bahwa;

jadi yang sudah menjadi program kami tetap kami laksanakan karena bagi saya bukan keterlanjuran walau mereka menganggap itu merupakan keterlanjuran. Justu saya pikir itu keterlambatan mereka mengelola menangani sehingga pemerintah daerah melakukan pengembangan kepariwisataan untuk memanfaatkan potensi dan pemeliharaan yang ada karena bagian dari hidup juga masyarakat setempat yang berkaitan pembenahan sarana dan prasarana di Bukit Kelam kawasan itu agak bersih. (wawancara, Februari 2018)

Sehubungan dengan ditetapkan sebagai kawasan konservasi bahwa kawasan konservasi tidak boleh dirusak, dilain pihak masyarakat adalah secara turun temurun telah memiliki kedaulatan hukum adat yang mengatur tatanan kehidupan sosial mereka sehingga mereka telah lama memiliki kedaulatan mendiami kawasan



tersebut, sehingga mereka merasa perlu dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kepariwisataan di kawasan.

Keinginan masyarakat yang merasa berdaulat menginginkan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan, karena secara turun mereka merasa bahwa kawasan tersebut telah mereka jaga dan merupakan tempat tinggal mereka. Akan tetapi dengan adanya peraturan pemerintah atau undang-undang, masyarakat setempat yang pada dasarnya telah melakukan sejak belum ditetapkan kawasan berdasarkan undang-undang. Hal ini bagi mereka adalah suatu bentuk pembodohan dan tidak menghargai tatanan sosial kehidupan masyarakat yang mana pada dasarnya bahwa tradisi yang mereka lakukan selama ini adalah sama seperti yang diamanatkan peraturan tersebut.

Implementasi kebijakan kawasan wisata bukit kelam masih ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan, seperti tapal batas kawasan, Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kebong (Dm.42 th) mengatakan:

Kami menginginkan batas harus jelas, setelah penetapan kawasan konservasi sejak 1992, ada perintisan tapal batas kembali pada tahun 1997 yakni antara hutan konservasi dengan hutan masyarakat, bahkan perintisan itu sangat-sangat baik melibatkan semua komponen masyarakat, setelah dilakukan perintisan jalan setapak, selanjutnya pihak pemerintah tidak setuju dan mengatakan bukan dari yang dirintis tersebut batas dari batas tersebut. Sejak itu tidak pernah ada kejelasan tentang tapal batas hingga sekarang. (wawancara, Juni 2017)

Selanjutnya menurut Anggota Dewan Adat Dayak Desa Kecamatan Kelam Permai (Ny.65 Thn) menyatakan bahwa:

Sebenarnya pak permasalahan dari aspek adat tentang kawasan sudah lama masyarakat meminta atau menginginkan batas-batas kawasan konservasi dimulai dari hak taman tumbuh masyarakat sejak dari dulu. Sehubungan hal ini sampai sekarang pun belum terjawab, pada tahun 1990 ada patok putih yang ditancap di pinggir jalan, hal ini terpertanyakan oleh masyarakat. Karena bersama dengan hal tersebut ada himbau bahwa kawasan ini tidak boleh ditebang, tidak boleh diladang, namun demikian masyarakat tetap sadar dengan kondisi itu karena pola hidup masyarakat disini juga selalu melindungi dan menjauhi pengerusakan hutan dikarena adat dan tradisi kehidupan kami yang masih terpelihara hingga sekarang. (wawancara, Juni 2017)

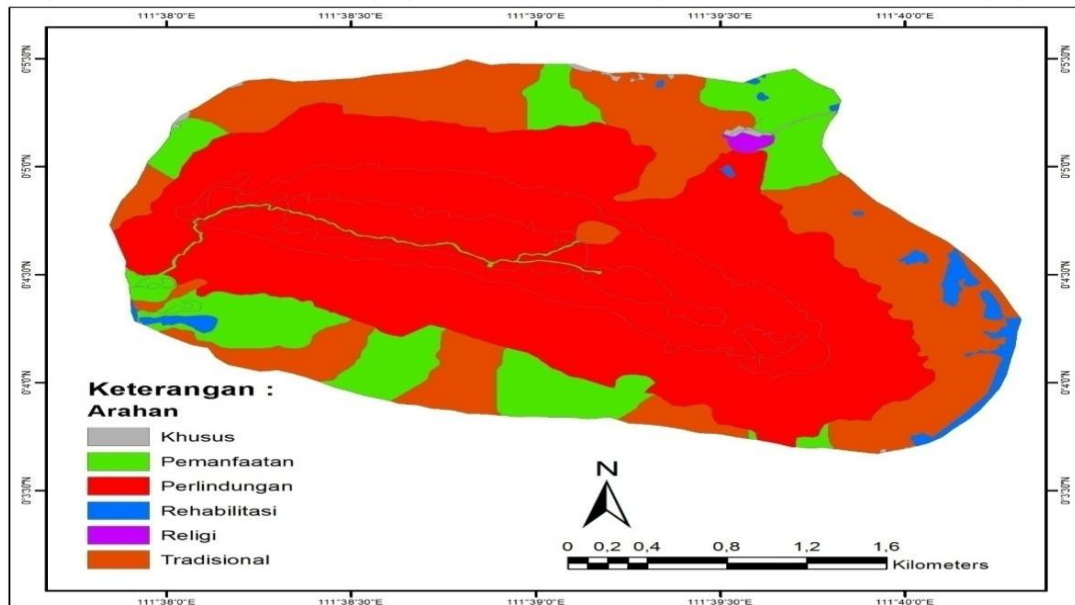


Berdasarkan petikan hasil wawancara peneliti tersebut kawasan lingkaran kelam bahwa pengukuran tata batas baru dilaksanakan pada sekitar tahun 1998 dan tata batas kawasan adalah pada tanam tumbuh milik masyarakat. Selanjutnya sehubungan dengan permasalahan dengan penetapan tata batas kondisi sekarang yang masyarakat ketahui adalah mengikuti poros jalan lingkaran kelam. Akan tetapi sekarang terus menjadi polemik tentang tata batas yang menurut masyarakat bahwa tata batas belum tuntas atau tidak ada kesepakatan bersama hingga sekarang. Akan tetapi tapal batas wilayah tetap menjadi harapan yang harus diselesaikan bersama masyarakat.

Sehubungan dengan penetapan tata batas yang terus menjadi polemik maka BKSDA Wilayah II Sintang telah melakukan menata kembali. Penataan blok bertujuan menyamakan persepsi dalam masyarakat kawasan serta untuk dapat membangun harmonisasi fungsi kawasan. Berdasarkan studi dokumentasi yang bersumber dari BKSDA wilayah II Sintang bahwa prinsip pendekatan didalam penetapan Blok TWA Bukit Kelam ditentukan berdasarkan pada tiga pertimbangan utama yakni: (1) potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (2) tingkat interaksi dengan masyarakat setempat; (3) kepentingan efektifitas pengelolaan kawasan TWA Bukit Kelam yang harus dilakukan. Selain dari tiga prinsip dasar tersebut, didalam penetapan blok tersebut juga harus mempertimbangkan 3 hal penting yang terkait dengan penentuan atau pembagian blok, yaitu: (a) jenis blok yang dibutuhkan; (b) luas masing-masing blok; dan (c) letak/lokasi blok. Untuk dapat merumuskan hal tersebut, maka pengkajian dan pemahaman terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem kawasan taman wisata alam dengan seluruh unsur yang ada didalamnya mutlak diperlukan.

Penyelesaian sengketa tata batas dengan masyarakat belum menemukan titik terang didalam kawasan akan tetapi dasar yang digunakan oleh pemerintah dalam penentuan penataan blok kawasan yakni Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.76/Menlhk-

Setjen/2015 tentang kriteria zona pengelolaan taman nasional dan blok pengelolaan cagar alam, suaka marga satwa, taman hutan raya dan taman wisata alam, telah dibuat pembagian blok pengelolaan untuk taman wisata alam. Pembagian blok dapat dilihat pada gambar/peta blok berikut:



Gambar 5.9 Peta Pembagian Blok kawasan Konservasi TWABK

Sumber: BKSDA Wilayah-II Sintang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tersebut dalam penataan blok konservasi kawas terbagi atas; 1) Blok Perlindungan dengan luas 650,75 Ha. 2) Blok Pemanfaatan dengan luas 157,65 Ha. 3) Blok Rehabilitasi dengan luas 20,56 Ha. 4) Blok Religi dengan luas 2,99 Ha. 5) Blok Tradisional dengan luas 292,37 Ha. 6) Blok Khusus dengan luas 3,10 Ha.

5.2.2.2 Kesadaran Masyarakat



Masyarakat Kabupaten Sintang merasa sintang adalah miliknya sejak kabupaten sintang berdiri sehingga pengelolaan bukit kelam ini juga sudah menyentuh masyarakat sejak lama dikelola secara tradisional yakni dengan memanfaatkan air dan tanam-tanaman serta ekosistem yang ada didalam, ini merupakan bagian dari hidup daripada masyarakat Kecamatan Kelam permai sejak jaman dahulu.

Kemudian perkembangan jaman bahwa pada akhirnya pemerintah pusat menetapkan bahwa Bukit Kelam adalah wilayah konservasi alam, sehingga sudah ada pengelolaan sudah adanya aktivitas masyarakat baru adanya aturan, tentu saja pengelolaan pembenahan terjadi setelah aturan ditetapkan kemudian keluaran aturan-aturan yang ditetapkan oleh perintah pusat mungkin hanya sebatas asumsi pemerintah pusat tetapi belum terjalinan komunikasi karena bukit kelam itu sendiri belum tersentuh oleh KSDA itu sendiri.

Kesadaran masyarakat tidak bisa muncul begitu saja jika tidak ada yang mendorong mereka, peran Disporaparekraf dalam merubah dan mengirim pola berpikir mereka bahwa mereka mengetahui mereka berada dikawasan TWA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelapa Disporaparkraf (H. 52Thn) mengatakan bahwa;

Berkaitan dengan kesadaran masyarakat kami bersama dengan BKSDA akan berkerja sama melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, kami ada pembuat program Bina Kawasan Bukit Kelam (BKBK), dan akan kami masukan dalam program RKA (Rencana Kerja Anggaran) pada tahun anggaran 2018 ini, salah satu program adalah sosialisasi pembinaan untuk mencintai kawasan bukit kelam sebagai kawasan wisata kita. (wawancara, Februari 2018)

Harapannya keberhasilan Program BKBK ini bertujuan agar mereka tidak sembarang membuang sampah, tidak merusak fasilitas yang ada didalam kawasan, memberi pemahaman agar mereka bisa juga ambil bagian dalam rangka peningkatan ekonomi, misal dengan menjual alat-alat/kerajinan yang berada dalam kawasan TWABK. Arah yang kearifan lokal merupakan salah satu prgram yag akan dilaksanakan oleh Disporaparekraf.



Pembinaan masyarakat kawasan untuk dapat memahami rasa kesadaran masih harus dilakukan, hal ini yang diungkapkan oleh Sekretaris Disporaparekraf (E.51Th) menyatakan bahwa:

Belum ada kelompok sadar wisata, masyarakat di kawasan belum memiliki kesadaran wisata, kita (disporaparekraf) tahun depan akan merencana membentuk kelompok-kelompok sadar wisata, kita akan terus melakukan pembinaan terhadap kepariwisataan kepada masyarakat setempat, pada saat ini kami hanya melaksanakan program pimpinan dan perencanaan tahun yang lalu. Kunci suksesnya kawasan wisata adalah masyarakat setempat. Kita melakukan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan taman wisata bukit kelam untuk kepentingan semua kita ingin ada multi player effect bagi masyarakat setempat. Sehingga anggapan masyarakat kawasan "pemerintah datang kesini mengambil hasil akan tetapi kami dapat apa" dapat kita tepis. (wawancara Oktober 2017)

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa kesadaran masyarakat perlu dibangun dari semua komponen yang berkepentingan dalam kawasan TWABK, kesadaran masyarakat ini sangat penting karena mereka hidup dalam kawasan Konservasi Taman Wisata Alam yang merupakan daerah yang menjadi perlindungan terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut dipertegas lagi oleh Sekretaris Disporaparekraf (Er.51Th) mengatakan bahwa:

menjalan tugas pokok dan fungsi banyak permasalahan yang ada di kawasan, sejak di tetapkan sebagai kawasan konservasi BKSDA masyarakat sudah melarang untuk melakukan aktivitas apapun di kawasan bukit kelam, di karenakan Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak mempunyai MOU dengan ke dengan pengelolaan kawasan sementara perda retribusi sudah ada, Target yang harus dicapai sudah ada sehingga Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus melakukan perencana dan pengembangan pembagunan bidang kepariwisataan .(wawancara Oktober 2017)

Kesadaran terhadap kawasan menjadi sangat penting sehingga dibutuhkan pengawasan oleh pihak yang berkepenting dalam pelestarian kawasan, tidak ada pengawasan secara rutin seperti yang disampaikan oleh masyarakat dalam Kawasan TWABK (Hm 30 Th) mengatakan bahwa:

Tidak ada pengawasan atau monitoring secara rutin karena fokus pembangunan kepariwisataan kabupaten sintang belum maksimal sehingga pengelolaan dan pemanfaatan terhadap kawasan wisata bukit kelam hanya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah pada saat hari besar saja serta Tidak ada melibatkan masyarakat dalam menjaga kelesatrian kawasan taman wisata alam bukit kelam bahkan banyak yang membuat perubahan



kawasan bukit kelam tidak alami lagi seperti sebelumnya karena banyak pengerusakan hutan dan batu di sekitar dan terkesan adanya pembiaran dari pemerintah daerah itu sendiri. (wawancara Januari, 2018)

Masih lemah kesadaran masyarakat juga di buktikan lingkungan yang tersekan kumuh tidak ada penataan serta petunjuk bagi masyarakat, tong sampah yang tidak tampak, sampah yang berserakan apalagi pada saat-saat hari libur tahun baru dan hari besar keagamaan. Selain itu tidak adanya toilet yang layak juga sangat membuat pengunjung tidak nyaman. Seperti yang diungkapkan pengunjung TWABK (Drm 46 Thn) dan (Ls 29Th) mengatakan bahwa;

Sarana dan prasarana yang dibangun dikawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam belum cukup baik, belum ada kenyamanan yang ada cuma sampah yang berserakan. Akses jalan di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam sangat kurang, terutama jalan banyak yang rusak dan berlubang-lubang, kami hanya datang sekali sekali pada saat hari-hari besar dan hari libur saja. (wawancara Oktober, 2018)

Berdasarkan petikan wawancara diatas bahwa kebersihan kawasan sangatlah harus diperhatikan. Kesadaran masyarakat akan kesebersih dikawasan TWABK sangatlah penting, tidak ada kesan semberaut dan kotor. Di dalam kawasan dan yang menjadi objek-objek tujuan pengunjung sarana penunjang kebersihan masih sangat kurang, belum tersedianya kamar mandi, kakus atau wc umum yang memadai, pada hal hal tersebut adalah merupakan hal sangat sangat penting, serta sangat mutlak untuk kenyamanan bagi pengunjung.

Di Kawasan TWABK adanya penghancuran batu-batuan yang besar dan unik yang berada di sekitar rumah, di pecah-pecah oleh sebagian masyarakat beranggapan bahwa itu adalah hak mereka, hasil wawancara dengan masyarakat (My.47 thn) bahwa;

Wajar pengambilan atau pegalian batu, penebangan dan pembukaan lahan oleh penduduk karena secara turun temurun kawasan bukit kelam adalah dibawah penguasaan kami. (Wawancara, September 2017).

Berdasarkan petikan wawancara tersebut masyarakat berpandangan kawasan adalah hak mereka yang dapat mereka olah dan di ambil untuk diperjual belikan. Pandangan atau anggapan mereka bahwa bebatuan yang berada di



perkarangan rumah mereka atau berada di lahan pertanian adalah bebas untuk diambil. Serta anggapan ini diperkuat juga bahwa tuntutan ekonomi menjadi pembedaan bagi mereka untuk melakukan pengalihan secara besar-besaran.

5.3 Model Empirik Implementasi Kebijakan Kepariwisata Taman Wisata Alam Bukit Kelam

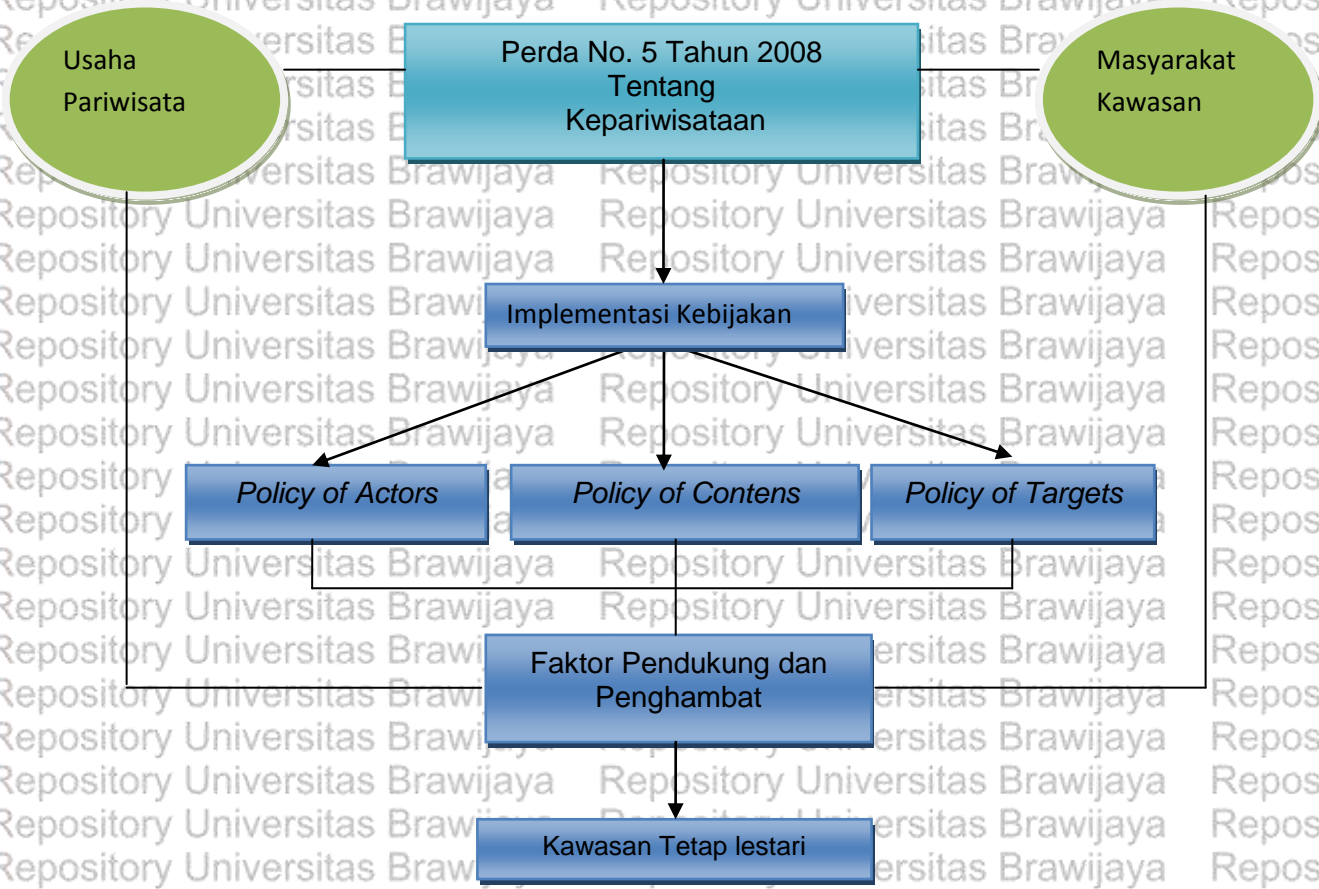
Implementasi kebijakan kepariwisataan secara umum telah diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip: a). menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; b). menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; c). memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; d). memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; e). memberdayakan masyarakat setempat; f). menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; g). mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; h). memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Kepariwisata di Kabupaten Sintang dalam implementasinya menggunakan instrumen kebijakan daerah terutama bagi instansi pelaksana teknis melalui lima aspek, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepemudaan



olahraga, kepariwisataan dan ekonomi kreatif guna mendukung sinergisitas pembangunan kepemudaan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif. (2) Terjaganya kelestarian lingkungan, meningkatnya daya tarik wisata, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan serta meningkatnya pendapatan masyarakat. (3) Mengembangkan dunia usaha jasa Pariwisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. (4) Meningkatkan Ekonomi Kreatif berbasis Seni Budaya, Media, desain ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersih dan berwibawa. Dengan pelaksanaan kebijakan selama ini sangatlah kaku. Sehingga hanya pelaksanaan program saja di lakukan untuk tercapainya tujuan. Secara diagramatik, model implementasi kebijakan Kepariwisata Kabupaten Sintang sebagaimana disajikan dalam uraian di atas, dapat digambarkan berikut:



Gambar 5.11. Model Empirik Implementasi Kepariwisataaan/Perda Kabupaten Sintang



HASIL PENELITIAN

5.1 Implementasi Kebijakan Kepariwisata Taman Wisata Alam Bukit Kelam dalam Rangka Pelestarian Kawasan

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sintang memiliki peran penting dalam kontribusi pembangunan yang bertujuan mendorong serta mengangkat potensi ekonomi sekaligus lapangan kerja, terutama yang bertujuan untuk mendorong bangkitnya pembangunan daerah. Membaiknya perekonomian pada tataran pemerintah daerah tentu akan memberi dampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan sebagai upaya untuk pelestari budaya dan lingkungan hidup di Kabupaten Sintang.

Pemerintah Kabupaten Sintang melalui pelaksanaan teknis bidang kepariwisataan yakni Disporaparekrif selalu memberi dukungan dalam mengembangkan kepariwisataan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Disporaparekrif mempunyai visi dan misi bidang kepariwisataan sebagai berikut Visi Pariwisata Kabupaten Sintang yakni "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat Berprestasi, Pariwisata yang Maju dan Berdaya Saing" dengan Misi Pariwisata Kabupaten Sintang yakni; a) Menciptakan Produk Pariwisata yang memiliki daya tarik dan menjadi pilihan tujuan secara elegan dan mantap, b) Meningkatkan pelayanan secara profesional dan memiliki daya saing antar daerah. c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pendapatan dari usaha pariwisata yang kreatif, inovatif sebagai modal pokok pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara budaya dan sejahtera. d) Melindungi dan menjaga kemitraan secara terbuka bagi dunia usaha atau Investor yang dan menanamkan modalnya dibidang Pariwisata. d) Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk mewujudkan paket pilihan sebagai sektor andalan dalam memberikan adanya dukungan pendapatan asli daerah. e) Menciptakan insan pariwisata yang dapat memberikan nuansa karakter budaya daerah yang konsisten dan kondusif. f)



Menjaga keutuhan budaya yang merupakan aset bangsa Indonesia yang berbagai ragam budaya adalah merupakan Kekayaan budaya yang dapat dikemas secara baik dan indah untuk dinikmati sebagai Paket Wisata Fisik atau Dinamika Masyarakat Budaya. g) Meningkatkan perawatan dan melestarikan barang museum dan cagar alam yang merupakan bukti fisik peninggalan sejarah, budaya di Kabupaten Sintang. h) Meningkatkan sumber daya aparatur pariwisata melalui pelatihan, sosialisasi teknis Kebudayaan dan pariwisata yang profesional.

Upaya pengembangan kepariwisataan tentunya melihat potensi wisata yang ada di Kabupaten Sintang dengan cermati secara teliti dan akurat, sehingga dibutuhkan langkah-langkah sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi dimaksud yang akan diklasifikasi sesuai dengan standar wisata yang akan dikembangkan. Untuk lebih jelas potensi pariwisata Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. **Jumlah Data Potensi Obyek Daerah Tujuan Wisata Budaya, Alam Dan Taman Rekreasi di Kabupaten Sintang Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jenis ODTW		Jenis
1.	Sintang	1	Keraton Al Mukaromah	Wisata Sejarah
		2	Masjid Jami Sultan Nata	Wisata Sejarah
		3	Museum Kapuas Raya	Wisata Budaya
		4	Hutan Wisata Baning	Wisata Alam
		5	Danau Jemelak	Wisata Alam
		6	Kolam renang Serantung Waterpark	Taman Rekreasi
		7	Kolam renang Balioboro	Taman Rekreasi
2.	Sei Tebelian	1	Kolam Renang Tebelian Indah	Taman Rekreasi
3.	Kelam Permai	1	Taman Wisata Bukit kelam	Wisata Alam
		2	Goa Maria	Wisata Alam
		3	Kolam Renang Tirta Wisata Kelam	Taman Rekreasi
		4	Bukit Rentap	Wisata Alam
		5	Gua Antu Simpadi	Wisata Alam
		6	Gua Gemelat	Wisata Alam
		7	Hutan Tawang amersibung	Wisata Alam
		8	Telaga Rendang	Wisata Alam
		9	Telaga Surat	Wisata Alam
		10	Bukit Luit	Wisata Alam
4.	Binjai	-	-	-
5.	Sepauk	1	Bukit Kujau	Wisata Alam
		2	Bukit Saran	Wisata Alam
		3	Air Terjun Sentarum	Wisata Alam
		4	Air Terju Tuja Pamak	Wisata Alam
		5	Air Terjun anak sungai sentarum	Wisata Alam
		6	Air Terjun Tuja Supit	Wisata Alam
		7	Air Terjun Tuja Tapang Tuai	Wisata Alam
		8	Sungai Silit	Wisata Alam
		9	Sungai Kiara	Wisata Alam



6.	Tempunak	10	Sungai Lubuk Kembang	Wisata Alam
		1	Air Terjun Bukit Kujau	Wisata Alam
		2	Sungai Kujau	Wisata Alam
		3	Sungai Senirah	Wisata Alam
		4	Air Terjun guruh Jatuk	Wisata Alam
		5	Riam Capat Cunai	Wisata Alam
6	Gurung Jeruk	Wisata Alam		
7.	Dedai		-	
8.	Kayan Hilir	1	Bukit Bang	Wisata Alam
		2	Bukit Ruyung	Wisata Alam
		3	Air Terjun Sarai Entemu	Wisata Alam
		4	Sungai Kura	Wisata Alam
		5	Sungai Beribijit	Wisata Alam
		6	Sungai Kelampai	Wisata Alam
		7	Bukit Gonik	Wisata Alam
		8	Goa Paleh Berani	Wisata Alam
		9	Goa Paleh pengolak	Wisata Alam
		10	Air terjun Sarai Nantai Bulung	Wisata Alam
9.	Kayan Hulu	1	Bukit Sahai Keladan	Wisata Alam
		2	Riam Mensabu	Wisata Alam
10.	Ketungau Hilir	1	Riam Setungkup	Wisata Alam
		2	Air Terjun Wong Tungku	Wisata Alam
11.	Ketungau Tengah	1	Air Terjun Wong Sepakat	Wisata Alam
		2	Rumah Adat Betang Panjang	Wisata Budaya
		3	Air Terjun Wong Tapah	Wisata Alam
		4	Air Terjun Tekop	Wisata Alam
12.	Ketungau Hulu	1	Bukit Bangau	Wisata Alam
		2	Butu Bejaku	Wisata Alam
		3	Telaga Kumang	Wisata Alam
		4	Air Terjun Sungai Jerup	Wisata Alam
		5	Air Terjun Sungai Udang	Wisata Alam
13.	Serawai	1	Riam pengundang	Wisata Alam
14.	Ambalau	1	Air Terjun Nokan Nayan	Wisata Alam
		2	Air Terjun Nokan Cecak	Wisata Alam
		3	Air Terjun Nokan Undak	Wisata Alam
		4	Air Terjun Nokan Jenggonoi	Wisata Alam

Sumber: Disporaparekraf, 2017

Berdasarkan tabel 5.1 Kabupaten Sintang memiliki 56 potensi objek daerah tujuan wisata. Oleh karena itu dalam pengembangannya perlu dukungan Pemerintah yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam dilakukan pemetaan pada kawasan daya tarik wisata unggulan. Berdasarkan Renstra Disporaparekraf tahun 2016, dari jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Sintang telah ditetapkan dan diusulkan daya tarik wisata unggulan pada masing-masing kecamatan sebagai skala prioritas yang harus dikelola lebih optimal.

Pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sintang tentunya tujuan akhir yang ingin dicapai adalah target mendatangkan wisatawan baik lokal maupun dari luar daerah ataupun internasional secara terus menerus dan

keberlanjutan. Dengan demikian tentu ada wilayah yang menjadi unggulan yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya adalah Taman Wisata Alam Bukit Kelam.

Penetapan Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam diharapkan menjadi peluang besar dengan meningkatnya kunjungan wisata pada Kawasan Taman Wisata Bukit Kelam dapat memberi kontribusi bagi peningkatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena diharapkan dari Kawasan ini dapat memberikan kontribusi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sintang secara umum dan masyarakat kawasan secara khusus maka perlu selalu dijaga serta tetap harus mempertahankan keaslian kawasan, dengan tidak merubah struktur alam bahkan sama sekali tidak merusak. Berdasarkan data kunjungan wisata Kawasan Taman Wisata Bukit Kelam sejak tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2. Jumlah Wisatawan yang datang Kawasan Taman Wisata Bukit Kelam Kabupaten Sintang Kalimantan Barat tiga tahun sejak Tahun 2015

No.	Pengunjung	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Pelajar	3.836	4.231	4.829
2.	Mahasiswa	1249	2.229	2.783
3.	Peneliti	5	2	7
4.	Wisman	51	57	62
5.	Tamu Negara	-	-	-
6.	Dinas	20	32	41
7.	Umum	5.220	6.326	7.075
	Jumlah	10.704	12.662	14.797

Sumber: Dok. Disporaparekraf Kab.Sintang Sept. 2017

Berdasarkan tabel. 5.2 bahwa menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di kawasan TWABK perlu pemahaman peran pemerintah dan masyarakat menjaga kawasan sangat dibutuhkan. Peran pemerintah dan masyarakat tentu tidak asal muncul begitu saja, namun telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang kepariwisataan. Untuk dapat melaksanakan Peraturan Daerah tersebut agar dapat efektif dan maksimal maka didalam implementasinya harus ada sinergis antara



pelaku kebijakan ataupun Implementor (*Policy of Actors*) kelanjutnya tujuan dari kebijakan (*Policy of Targets*) serta isi dari kebijakan (*Policy of Contents*).

5.1.1 Pelaku Kebijakan (*Policy of Actors*)

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan harus diketahui terlebih dahulu pelaku atau aktor yang mengimplentasikan suatu kebijakan sehingga dapat menyadari suatu peranan dari kebijakan. Pentingnya aktor dari suatu kebijakan adalah untuk tercapainya misi dari kebijakan yang berhasil guna secara maksimal. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Pariwisata dilaksanakan dengan secara bersama dan sinergi dengan melibatkan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai pelaku dari kebijakan.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang pada sektor kepariwisataan sangatlah penting dalam upaya memperkenalkan industri kepariwisataan yang ada, oleh karena itu Disporaparekraf sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan. Kepariwisataan yang diberi tanggungjawab dalam pelaksanaan teknis bidang kepariwisataan harus menjalankan amanat agar dapat mengimplementasikan kepariwisataan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Disporaparekraf (H. 52 thn) mengatakan bahwa;

secara teknis adalah sebagai tanggungjawab yang harus dilaksanakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan yang ada di Kabupaten Sintang terutama yang berhubungan dengan isi kebijakan kepariwisataan kabupaten sintang. (wawancara, Juli 2017)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut bahwa sebagai pelaksana teknis bidang kepariwisataan di Kabupaten Sintang terutama pada kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam selalu menyedia program kerja melalui tugas pokok dan fungsi yang mesti dijalankan.

Pada tataran wilayah kerja administrasi pemerintahan kawasan TWABK berada di Kecamatan Kelam Permai tentu pemerintahan wilayah memiliki andil atau peran sebagai aktor kebijakan dalam mengimplementasi kebijakan kepariwisataan di



kawasan TWABK. Berdasarkan wawancara dengan Camat Kelam Permai (M. 50 thn) mengatakan bahwa;

Camat tidak memiliki peran langsung akan tetapi sebagai kepala administrasi wilayah untuk dapat mengimplementasi Peraturan Daerah kepariwisataan di kawasan TWABK yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kelam Permai Camat akan selalu memberi ruang untuk memfasilitasi agar dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Kelam Permai. (wawancara, Oktober 2017)

Berdasarkan kutipan wawancara dengan camat tersebut bahwa camat tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengimplementasi kebijakan kepariwisataan akan tetapi sebagai pemerintah wilayah tentu menjadi bertanggungjawab untuk memfasilitasi menjalankan program kebijakan tersebut agar dapat memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat yang ada didalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam.

Kebijakan Kepariwisataan pada kawasan konservasi yakni BKSDA sebagai pemangku wilayah hal ini, menjadi penting karena BKSDA merupakan Aktor yang berperan dalam penataan kawasan, tentu memberi dukung dalam kepariwisataan di kawasan konservasi dengan melakukan koordinasi yang cukup intensif dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala BKSDA Wilayah II Sintang (Bs.48thn) mengatakan bahwa:

Kawasan TWABK adalah merupakan kawasan konservasi yang diharapkan perencanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di kawasi ini selalu dilakukan koordinasi sehingga dapat disinkronkan dengan tata kebijakan dalam kawasan. (wawancara, Oktober 2017).

Berdasarkan petikan wawancara tersebut pihak bahwa, BKSDA memiliki peran penting sebagai aktor untuk menentukan titik letak pembangunan tiap sektor yang ada di dalam kawasan TWABK. Penentuan titik pembangunan dalam kawasan ini telah ada pembagian kawasan berdasarkan penataan blok kawasan.

Selanjutnya Kepala Desa memiliki peran dalam melakukan sosialisasi dalam implementasi kebijakan kepariwisataan di kawasan TWABK. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kebong (Dm. 42 thn) bahwa:



Sebagai Kepala Desa saya mendukung dan menjalankan kebijakan pemerintah (Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) terhadap implementasi kebijakan kepariwisataan dalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Namun kondisi kawasan wisata bukit kelam masih ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan, seperti tapal batas kawasan". (wawancara, oktober 2017)

Berdasarkan petikan wawancara dengan Kepala Desa Kebong terungkap bahwa, Pemerintahan Desa berada didalam kawasan, mengetahui Kawasan Bukit Kelam merupakan taman wisata alam. Akan tetapi belum ada sosialisasi, namun demikian pemerintahan desa akan tetap memberikan dukungan kepada pemerintah. Kepala Desa Kebong juga menegaskan bahwa masih banyak permasalahan yang belum tuntas yang mesti harus dibenah yang berhubungan dengan tata batas. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Merpak (Kd. 42 thn) bahwa:

Saya selaku Kepala Desa mendukung dan siap menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang sehingga kepala desa yang berada dalam kawasan wisata alam bukit kelam dapat berperan dalam mengimplentasikan kebijakan kepariwisataan. Saya melihat bahwa kebijakan yang di implementasikan selama ini terutama untuk kawasan lingkur kelam (Taman Wisata Bukit Kelam) belum sesuai dengan harapan, masih ada hal-hal yang perlu di lakukan perbaikan seperti Tapal Batas kawasan. (wawancara, oktober 2017)

Dari petikan wawancara kedua Kepala Desa tersebut bahwa masyarakat masih sangat berharap ada perhatian pemerintah dalam implementasi kebijakan yang menjadi tempat tinggal masyarakat, sehingga kebijakan kepariwisataan pada kawasan taman wisata alam dapat diketahui masyarakat secara menyeluruh dan pemerintah desa dapat secara langsung berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Kawasan wisata mesti didukung dengan kemudahan akses usaha sarana pariwisata yang meliputi penyediaan akomodasi dalam bentuk mudahnya mendapatkan dan memperoleh akses makan, minum dan oleh-oleh sebagai buah tangan para pengunjung. Pelaku dunia usaha yang memberi kontribusi kemudahan akses untuk memperoleh makan dan minuman dan oleh-oleh setiap pengunjung.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa pelaku usaha di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam yakni (N.40 thn) bahwa:



Saya telah membuka usaha makan minum di kawasan ini sejak 4 tahun terakhir, memang kunjung konsumen atau pembeli tidak selalu stabil pada hari biasa agak akan tetapi jika hari tertentu pada hari besar seperti hari besar keagamaan dan tahun baru kunjungan pembeli cukup ramai. (wawancara, Juni 2017)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut, dengan adanya kawasan wisata ini juga memberi kontribusi timbal balik yakni penyedia jasa makanan dan minuman juga merasa terbantu dengan banyaknya jumlah pengunjung. Hal yang nama juga diungkapkan oleh (Ar.44 thn) bahwa:

Usaha makan, minum dan sovenir atau assesoris yang di jual bahwa dengan dengan pengunjung yang banyak memberi penghasilan yang cukup baik bagi usaha yang dilakukannya. (wawancara, Juni 2017)

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan pelaku usaha rumah makan di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam yakni (An.38 thn) bahwa:

Dengan usaha rumah makan yang di lakukannya memberi dukungan untuk memudahkan pada pengunjung dalam mencari makan dan minuman dengan berbagai menu, pengunjung dalam dapat melihat pemandangan keindahan bukit kelam sambil menikmati makanan dan minum dirumah makan yang kita suguhkan. (wawancara, Juni 2017)

Masyarakat kawasan TWABK juga selalu memanfaatkan kesubuh tanah yang barada dikawasan sebagian dari mereka melakukan bercocok taman dengan bertaman buah-buah yang sering dijadikan oleh-oleh pengunjung. Pengunjung juga pada saat musim tertentu dapat membawa dan menikmati buah-buah musiman dan buah lokal. Durian, Pekawai, Mentawak dan lain sebagainya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan (Hr.56 thn) bahwa:

Usaha buah-buahan yang kami sedia merupakan usaha mendukung kebijakan pariwisata untuk memudahkan pengunjung untuk menikmati dan membawa oleh-oleh dalam bentuk buah-buah, saya telah menjadi pelaku usaha dengan berbagai macam buah-buahan sekarang saya memiliki penghasilan hingga Rp. 3.000.000,- setiap bulan dari penjualan pisang. (wawancara, Oktober 2017)

Selain dari pemerintah dan swasta sebagai aktor dari implementasi kebijakan yakni masyarakat, dalam hal ini masyarakat sangatlah penting karena hal ini dapat memberi manfaat dalam meningkatkan pendapatan dan untuk kesejahteraan masyarakat kawasan.



Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupten Sintang tentang kepariwisataan memerlukan keterlibatan masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat kecamatan Kelam Permai (Sd.51 thn) mengatakan bahwa:

Untuk mempertahankan bentuk keaslian kawasan agar tidak menimbulkan perselisihan sesama masyarakat satu kampung dengan yang lainya maka dalam hal ini peraturan daerah harus di optimalkan agar masyarakat dapat membantu menjaga kawasan (wawancara, Oktober 2017).

Akan tetapi berdasarkan wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat Kelam Permai Menurut (Ps.42 thn) mengatakan bahwa:

Saya hanya mengetahui bahwa bukit kelam sebagai objek wisata yang melalui kebijakan pemerintah kawasan bukit kelam merupakan daerah konservasi yang di tetapkan sebagai Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Akan tetapi tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan hal tersebut. Kami sebagai masyarakat juga tidak mengetahui batas-batas wilayah kawasan konservasi dan kawas Taman wisata Alam, karena hingga sekarang masyarakat tidak mengetahui dan melihat peta dari penetapan kawasan konservasi tersebut. Walaupun ditataran kebijakan semua kompomen masyarakat haruslah secara sukarela menjaga lingkungan kawasan akan tetapi pihak pemerintah ataupun instansi yang berkepentingan dikawasan ini secara teknis tidak pernah melibatkan masyarakat terhadap pemeliharaan kawasan Taman Wisata Alam (wawancara, Nopember 2017)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut bahwa masyarakat mengetahui bahwa kawasan lingkaran kelam merupakan kawasan yang dijadikan kawasan taman wisata alam akan tetapi masyarakat tidak mengetahui persis dimana letak tata batas yang menjadi kawasan tersebut, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat kawasan.

Masyarakat kawasan sebagai sasaran menerima dampak dari implementasi kebijakan kepariwisataan Taman Wisata Bukit Kelam, dimana mereka telah mendiami kawasan tersebut secara turun temurun. Kehidupan masyarakat yang masih memengang adat dan tradisi menjadi pedoman kehidupan sehari-hari menjadi potensi yang sangat pendukung dalam pelaksanaan kebijakan daerah tersebut. Masyarakat yang mendiami kawasan TWABK berperan secara langsung sebagai aktor agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara maksimal.



5.1.2 Tujuan Kebijakan (*Policy of Targets/Determinations*)

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang kepariwisataan pada kawasan TWABK, yang menjadi sasarannya adalah masyarakat dan lingkungan alam baik yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna, memiliki daya tarik tujuan wisata.

Oleh karena itu masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu bahwa kawasan adalah kawasan kepariwisataan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Mepak (Kd.42 thn) mengatakan bahwa:

Ya, saya mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata yang mana juga melingkupi wilayah lingkaran kelam yang merupakan daerah tujuan wisata baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar. (wawancara, Nopember 2017)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut masyarakat mengetahui kawasan mereka merupakan pengembangan potensi kepariwisataan yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk menjadi objek kunjungan wisatawan, oleh karena itu potensi tersebut harus dapat dimaksimalkan oleh masyarakat. Agar membawa dampak yang positif bagi mereka. Meningkatnya pendapatan masyarakat kawasan pada akhirnya berdampak pada meningkat pula pendapatan daerah. Meningkatnya pendapatan masyarakat TWABK akan berdampak kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, maka berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Disporaparekrif (Er.46 thn) bahwa:

Kunci suksesnya kawasan wisata adalah masyarakat setempat. Kita melakukan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan taman wisata bukit kelam untuk kepentingan semua kita ingin ada multi player effec bagi masyarakat setempat. (wawancara, Nopember 2017)

Selain kepada masyarakat kawasan target dari implementasi kebijakan yakni memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. Lingkungan menjadi target dari kebijakan yakni harus mampu mempertahankan kondisi kelestarian dan keunikan yang menjadi daya tarik. berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa kelam sejahtera (Hrm. 32 thn) bahwa:



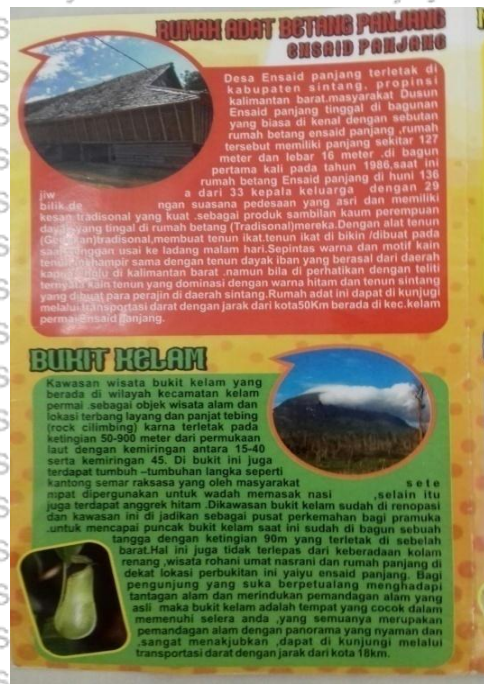
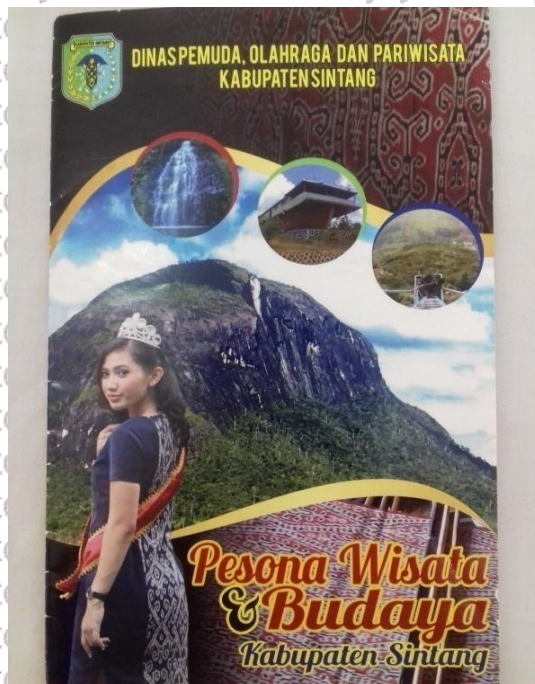
Keterlibatan masyarakat yang berada didalam kawan Taman wisata alam bukit kelam kaitanya dengan implemantasi kebijakan kepariwisataan masih sangat kurang hal ini disebabkan belum adanya dorongan dari pemerintah daerah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi mengimplementasi kebijakan di maksud. (wawancara, Desember 2017)

Berdasarkan petikan wawancara diatas bahwa perlu ada pemahaman dari semua pihak terhadap tujuan dari implementasi kebijakan, artinya semua pelaku yang berhubungan dengan tujuan untuk tercapainya kebijakan harus dapat memahami dari isi tujuan kebijakan peraturan daerah kepariwisataan. Akan tetapi yang terjadi tidak semua pelaku kebijakan pada tataran implementasi kebijakan sudah dapat memahami implementasi dari kebijakan. Berdasarkan dari wawancara berbeberapa masyarakat kawasan tentang pengalihan batu dan penebangan pohon pada kawasan tidak memahami kebijakan kepariwisataan. Sehingga dalam pemikiran mereka bahwa lingkungan yang mereka tempati dan bebatuan adalah hak milik mereka. Serta masyarakat berpandangan bahwa bebatuan yang ada disekitar pekarangan rumah merupakan potensi yang bisa memberikan sumber penghasilan.

Tujuan dari implementasi dapat memperkenalkan kawasan TWABK adalah dengan melakukan promosi, berdasarkan wawancara Kepala Bidang Kepariwisata (Em.37 thn) bahwa;

Disporaparekraf telah melakukan langkah dalam bentuk promosi pengembangan kepariwisata Kabupaten Sintang sesuai program kerja dengan tujuan yang dikehendaki sesuai sasaran baik ekonomi, sosial serta lingkungan untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat kawasan. (wawancara, Mei 2017)

Berdasarkan petikan wawancara di atas Disporaparekraf telah melakukan promosi terhadap nilai-nilai kepariwisataan kawasan TWABK dengan melakukan pembuatan brosur, audio dan vidio untuk memperkenalkan objek-objek wisata di Bukit Kelam. Berdasarkan hasil observasi bahwa terdapat brosur promosi objek wisata TWABK dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar.5.1 Brosur promosi objek wisata TWABK yang diterbitkan Disporaparekrak Kabupaten Sintang

Sumber: Dok. Disporaparekrak Kabupaten Sintang, 2017

Berdasarkan gambar 5.1 bahwa perlu diperkenalkan dan dilestarikan nilai budaya dan lingkungan yang menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional, dengan ini bahwa target dari implementasi yang meningkatkan kemampuan rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa dengan memperkenalkan keunikan nilai budaya, adat-istiadat, keramahan masyarakat, keindahan panorama alam dapat dilakukan.

Kondisi fisik kawasan TWABK juga menunjang untuk pengunjung dapat menikmati kawasan, kondisi jalan yang masih memadai untuk dilalui walaupun belum baik dan permanen, adanya restoran atau rumah makan yang dapat memberi nilai sendiri dengan sambil menikmati keindahan pada saat menikmati keindahan panorama bukit kelam.

Target implementasi kebijakan kepariwisataan ini juga menekankan memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat kawasan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat kawasan yang berpartisipasi dalam pengaturan parkir pada saat hari besar (J.23 thn dan K.25 thn) bahwa;



Pada hari libur seperti ini kami kesulitan mengatur parkir karena banyaknya pengunjung yang membawa kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat tidak sesuai dengan kondisi lapangan parkir yang disediakan oleh pemerintah yang hanya kurang lebih 600m² sehingga kami harus mengaturnya hingga kehalaman rumah penduduk. (Wawancara, 1 Januari 2017)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut target atau sasaran dari tujuan tercapainya suatu kebijakan juga harus memperhatikan akses dan daya dukung, kenyamanan serta kemudahan pengunjung seperti jalan yang memadai, tempat parkir dan fasilitas restoran dan penginapan.

5.1.3 Isi Kebijakan (*Contents of Policy*)

Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling terkait, bukanlah satuan-satuan komponen yang berdiri sendiri. Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil jika telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Proses implementasi kebijakan keberhasilannya juga dapat ditentukan oleh komponen isi program.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata memuat isi (*Contents*) yang terdiri dari (10) Bab yang terdiri dari (37) Pasal dan diklasifikasikan menjadi (4) bagian yakni terdiri dari; bagian pertama (usaha Pariwisata); bagian kedua (usaha jasa pariwisata); bagian ketiga (pengusahaan objek dan daya tarik wisata); bagian keempat (usaha sarana pariwisata);

Isi kebijakan (*Contents of policy*) dari Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata, *contents* yang mengatur tentang objek wisata pada kawasan pada Bab III Objek dan Daya Tarik Wisata bahwa Pasal (4) Objek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari atas; (a) objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna; (b) objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala peninggalan bersejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta (wisata air), wisata batu, wisata pertualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan; *contents* kebijakan tersebut bahwa objek tersedia oleh alam dan objek yang



bersumber buatan manusia, kedua hal tersebut memiliki kesamaan makna keindahan dan daya tarik yang dapat dinikmati manusia.

Objek daya tarik Bukit Kelam yang telah disediakan oleh alam harus mendapatkan perhatian secara khusus dari pemerintah sehingga dapat dimanfaatkan secara benar dan berkelanjutan oleh karena itu membutuhkan komitmen pemerintah terutama pihak terkait yang secara teknis langsung menangani kepariwisataan kabupaten sintang, berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Disporaparekraf (Er.51 thn) bahwa:

tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan kepariwisataan adalah komitmen pemerintah dalam melakukan perencanaan, pembangunan di kawasan, dan anggaran yang ditetapkan pemerintah adalah salah satu hal juga menjadi kendala dalam melakukan proses pembangunan kepariwisataan. (wawancara, Nopember 2017)

Contents of policy dari peraturan daerah tentang Kepariwisataan Kabupaten Sintang bahwa kegiatan pembangunan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata beserta parasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik yang telah ada. Dengan tegas bahwa *contents* ini mengisyaratkan (Bab III Pasal 6) bahwa objek daya tarik yang ada didalam kawasan harus dapat dimanfaatkan, pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana telah dibangun juga harus mampu mendorong kehidupan ekonomi dan sosial budaya, nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup, Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri; oleh karena itu kawasan harus terjaga dengan baik dan dapat dilestarikan secara turun temurun, hasil wawancara peneliti dengan Temenggung Adat Dayak, Kecamatan Kelam Permai (Yk.61 thn) bahwa;

Sehubungan dengan kebijakan dari peraturan daerah kabupaten Sintang tentang Kepariwisataan, dalam implementasinya yang berhubungan dengan pelestarian, masyarakat harus diberi pemahaman. Namun demikian, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sudah menjadi tradisi atau adat masyarakat secara turun temurun, karena secara adat masyarakat tidak boleh melakukan penebangan liar (sembarangan) dikawasan milik orang lain, Jika terjadi penebangan tanpa ijin dari masyarakat di kawasan orang lain, akan diberi sanksi adat yang berlaku. (wawancara, Juni 2017)



Berdasarkan kutipan wawancara tersebut bahwa kesadaran tradisional masih melekat pada masyarakat asli kawasan, kesadaran tradisional ini dalam kearifan lokal masyarakat dalam mengharga dan bersahabat dengan alam yakni tanah, air dan udara. Selanjutnya tegaskan lagi oleh Temenggungan Adat Dayak Desa Kecamatan

Kelam Permai hasil dari wawancara tersebut (Yk.61 thn) bahwa;

hukum adat ini akan memback-up pemerintah, baik pemerintah desa mau pun pemerintah kabupaten, dengan demikian ada kesengkronan antara pemerintah dengan pemangku adat sebagai mitra kerja dalam melindungi kawasan dari kerusakan, hal ini dikarenakan masyarakat disini juga masih memiliki kesadaran tinggi tentang adat. Oleh karena itu perlu keputusan bersama di untuk menjaga kawasan lingkaran Taman Wisata Bukit Kelam dalam hal menjaga dan melestarikan lingkungan kawasan. (wawancara, Juni 2017).

Kawasan objek wisata biasanya dilengkapi dengan pembangunan dan parasarana dan sarana yang diperlukan untuk menambah kegiatan daya tarik yang telah ada, berdasarkan data yang sarana dan prasarana yang di objek wisata bukit kelam meliputi: 1) Gapura; 2) Get Pintu Masuk Objek Wisata; 3) Pagar Depan; 4) Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua, Roda Empat dan kendaraan Lainnya; 5) Gazebo yang sangat terbatas; 6) Tempat permainan Anak-anak; 7) Tempat Mandi, Cuci Kakus (MCK); 8). Pentas terbuka; 9) Tangga Besi menuju Jalan ke Puncak Bukit Kelam; 10).Kios Makan, Souvenir dan Lain-lain.



Foto 5.2 Gapura Masuk Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam
Sumber: Dok Peneliti, 2017



Gapura pintu masuk kawasan taman wisata Bukit kelam berada di jalan poros yang menghubungkan 2 kabupaten kawasan timur Kalimantan Barat yakni Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, kawasan TWABK terhubung dengan jalan melingkar bukit kelam sepanjang kurang lebih 10 Km. dengan akses jalan yang pengerasan dan sebagian aspal dengan lebar 4 Meter. Sedangkan akses menuju puncak Bukit Kelam Pengunjung dapat menggunakan tangga, seperti pada gambar berikut:



Foto 5.3. Tangga menuju Puncak Bukit Kelam pada TWABK

Sumber: Dok. Disporaparekraf

Berdasarkan gambar 5.3 tersebut bahwa pengunjung diberi kemudahan untuk dapat menikmati pemandangan dari puncak Bukit Kelam, dengan berada di puncak mengunjung dapat melihat pemandangan dan panorama keindahan. Implementasi kebijakan yang mengatur objek daya tarik wisata alam yang merupakan pemanfaatan sumber daya yang ada dikawasan bukit kelam harus terus dilakukan, berdasarkan observasi bahwa banyak potensi daya tarik yang belum dapat dimanfaatkan adalah pada Pasal 20 yang menyatakan “bahwa perusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata” Ada dua hal yang harus diperhatikan secara terpisah dari makna pasal tersebut yakni sumber daya alam dan pontensi seni budaya.



Daya tarik pada kawasan bukit kelam adalah bongkahan batu-batuan besar yang berada disekitar kaki bukit menjadi cirikhas. Bebatuan tersebut berdia meter hingga puluhan meter berikut gambar salah satu batu besar yang berada dikawasan bukit kelam:



Gambar 5.4 **Salah satu bebatuan besar yang tersebar di kaki-kaki bukit kelam di kawasan TWABK.**

Sumber. Dok peneliti 2017

Bebatuan besar seperti pada gambar 5.4 tersebut adalah potensi yang dapat ditata sebagai daya tarik yang unik. Berdasarkan observasi peneliti bahwa bebatuan di kawasan bukit kelam ini bagi masyarakat ada yang memiliki nilai sejarah yang dipercayai sebagai yang memiliki makna sakral. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kelam Permai (Sd. 51 thn) menyatakan bahwa:

Untuk menjaga dan melindungi batu-batu yang dimiliki nilai sejarah seperti halnya Batu Bedilah, Batu Lalau, Batu Bediri, Batu Betangkap, Batu Kekurak dan Batu Muanyik yang ada di kawasan bukit kelam. Harus ada perlindungan dalam bentuk dipetakan dijadikan objek wisata sebagai bentuk perlindungan. Dengan demikian masyarakat berdekatan dengan objek tersebut bisa mendapatkan manfaat. (wawancara, Juni 2017).

Keunikan yang menjadi tarik dengan banyaknya bebatuan besar sejak tahun 2012 mulai terjadi pengalihan oleh bebarapa masyarakat dalam kawasan dengan alasan ekonomi hal tersebut menjadi pembenaran untuk melakukan pengerusakan



atau *exploitasi* batu secara besar-besaran di kawasan taman wisata bukit kelam tersebut, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar.5.5. Aktivitas pengalihan dan pemecahan batu dengan cara dibakar pada kawasan TWABK

Sumber. Dok. Peneliti 2017

Berdasarkan gambar 5.5. tersebut bahwa kerusakan telah terjadi pada kawasan Taman Wisata Bukit Kelam. Hal tersebut di perparah lagi dengan pembukaan lahan pertanian dan perkebun pada kawasan tersebut seperti pada gambar berikut;



Gambar.5.6. Aktivitas Perbukaan Lahan Pertanian Masyarakat pada Kawasan TWABK

Sumber. Dok. Peneliti 2017

Berdasarkan gambar 5.6 bahwa isi kebijakan pada Pasal 21 bahwa perusahaan objek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan atau ketertiban dan ketentraman masyarakat diselenggarakan sesuai dengan



ketentuan yang di atur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat di Kawasan TWA Bukit Kelam (H.32 thn) menyatakan bahwa:

Tidak ada melibatkan masyarakat menjaga kelestarian kawasan taman wisata alam bukit kelam bahkan banyak membuat perubahan kawasan bukit kelam tidak alami lagi seperti sebelumnya karena banyak pengerusakan hutan dan batu di sekitar dan terkesan adanya pembiaran dari pemerintah daerah itu sendiri. Serta tidak ada evaluasi terhadap aktivitas kepariwisataan di kawasan bukit kelam, hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada ditaman Wisata Alam Bukit Kelam selama ini hanya bersifat sekali-sekali dan tidak adanya perubahan pengembangan terhadap kawasan objek wisata alam bukit kelam itu sendiri. (wawancara, Juni 2017).

Berdasarkan petikan hasil wawancara tersebut bahwa perlu pengawasan berkala sehingga kerusakan tidak semakin parah, Kerusakan lingkungan yang terjadi dikawasan TWABK sangatlah memberi dampak bagi keaslian yang menimbulkan perubahan, hilangnya keunikan serta keindahan alam. Pada tahun 2017 saja kerusakan yang tercatat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 5.3. Rekapitulasi Kerusakan Kawasan TWABK pada Tahun 2017

No	Kawasan TWA	Voume Kerusakan (Ha)	Penyebab Kerusakan
1	Desa Kebong	3.5 (Ha)	a. Penebangan kayu b. Pengalihan batu c. Pemasangan Pipa Air Rakyat d. Perkebunan
2	Desa Merpak	2,5 (Ha)	a. Penebangan kayu b. Pemasangan Pipa Air Rakyat c. Perkebunan
3	Desa Kelam Sejahtera	1 (Ha)	a. Penebangan kayu b. Pengalihan batu c. Pemasangan Pipa Air Rakyat d. Perkebunan
4	Desa Samak	1,5 (Ha)	a. Penebangan kayu b. Pemasangan Pipa Air Rakyat c. Perkebunan

Sumber. BKSDA Wilayah II Sintang

Berdasarkan pada tabel 5.3. dapat dijelaskan bahwa berusak yang terjadi dikarena 4 hal yakni (1) pengalihan Batu, (2) Penebangan, (3) Perkebunan, (4) Pemasangan pipa air rakyat, yang klasifikasi jumlah kerusakan di Desa Kebong yakni 3.5 Ha, Desa Merpak 2,5 Ha, Desa Kelam Sejahtera 1 Ha dan Desa Samak 1,5 Ha. Pengalihan batu memberi dampak hilangnya keunikan yang banyak terjadi adalah di Desa Kebong dan Desa Kelam Sejahtera, pengalihan yang disertai pemecahan batu



untuk di jual terjadi hampir sepanjang jalan lingkaran kelam yang menjadi Kawasan TWABK. Galian batu ditumpuk-tumpuk dipinggir jalan untuk selanjutnya akan dibeli dan diangkut oleh menggumpul. Penebangan dan perkebunan yang ada di Kawasan TWABK juga mengakibatkan rusaknya lingkungan yang cukup parah dan perlu dilakukan pemulihan.

Berdasarkan wawancara dengan (Yt, 48 Thn) bahwa: "Wajar pengambilan atau pegalian batu, penebangan dan pembukaan lahan oleh penduduk karena dibawah penguasaan secara turun temurun". Dari petikan wawancara tersebut bahwa mereka berpikir atau berpandangan bahwa kawasan tersebut adalah boleh dilakukan seperti halnya hak milik pribadi.

Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama lintas sektor yaitu BKSDA Wilayah II Sintang, UPT Kehutanan Wilayah Utara Kalbar dan Perguruan Tinggi telah melakukan proses penghijauan kembali dengan melakukan penanaman pohon di Kawasan TWABK. Penanaman pohon kembali tersebut untuk memulihkan kawasan yang telah mengalami perubahan akibat kerusakan. Adapun jenis pohon ditanam adalah Sungkai (*Veromenna camessen*) dan kayu gaharu (*Aquilaria malaccensis*) yang berjumlah 8300 pokok pohon. Untuk lebih jelas penanaman pohon di Kawasan TWABK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.4. Rekapitulasi Penanaman Pohon di Kawasan TWABK

No	Tahun Kegiatan	Jumlah pohon	Aktor Pelaksana	Jenis Pohon
1	2012	4000 Pokok	Disporaparkraf, UPT Kehutanan Wilayah Utara Kalbar, BKASD Wilayah II Sintang	Sungkai (<i>Veromenna camessen</i>)
2	2014	1300 Pokok	Universitas Kapuas Sintang (Prodi Biologi FKIP), STKIP-PK Sintang	Sungkai (<i>Veromenna camessen</i>)
3	2015	3000 Pokok	UNTAN Pontinak (Mapala-UNTAN)	Gaharu (<i>Aquilaria malaccensis</i>)

Sumber. Dok. BKSDA Wilayah II Sintang

Berdasarkan tabel.5.4. bahwa penanaman kembali pohon sebagai upaya memulihkan lingkungan yang hijau, penanaman dilakukan dengan dua jenis pohon



yakni Sungkai sebanyak 5300 pokok pohon dan Gaharu sebanyak 3000 pokok pohon, yang dilakukan oleh berbagai komponen *stakeholder*.

Melihat kondisi berubahnya kondisi lingkungan pada kawasan perlunya pembinaan dari pihak pemerintah adalah sangat penting sesuai pasal 31 ayat (1) bahwa Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan. Akan tetapi hasil wawancara dengan Masyarakat di Kawasan TWA Bukit Kelam (Vk. 28 thn) menyatakan bahwa:

Ada pengawasan yang dilakukan pemerintahan namun tidak dilakukan secara rutin, warga tidak ambil peduli dari hasil pemantau oleh pemerintah untuk kelanjutan program pengembangan kepariwisataan. (Wawancara, Juni 2017)

Demikian juga hal yang sama diungkapkan Kepala Desa Merpak (K.42 thn) mengatakan bahwa:

Tidak ada teguran terhadap pengerusakan dan penebangan serta pengalihan dikawasan jikapun ada, ya kadang-kadang pada kondisi sekarang. (Wawancara, Juni 2017)

Kerusakan yang terjadi pada kawasan taman wisata alam bukit kelam pada bab VIII pada Peraturan Daerah Kabupten Sintang Nomor 5 Tahun 2008 jelas berisikan ketentuan pidana terutama pada Pasal 35 ayat (1) yakni;

Barang siapa melakukan perbuatan melawan hak, dengan sengaja merusak, mengurangi nilai, memisahkan, atau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsi secara sempurna suatu objek wisata dan daya tarik wisata atau bagian dari bangunan objek dan daya tarik wisata, di pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan pasal 35 ayat (1) sanksi yang diberikan sangatlah berat akan tetapi kini belum pernah diberikan penindakan yang tegas kepada pelaku pengerusakan. Banyaknya pelanggaran yang terjadi terkesan ada peroses pembiaran hal ini sesuai yang diungkapkan Masyarakat Kecamatan Kelam Permai (Sd. 42 thn) tokoh menyatakan bahwa,

sejak dulu memang sudah dilarang akan tetapi sekarang tambah rusak karena banyaknya pengalihan batu. Memang ada pelarangan akan tetapi masyarakat tetap bekerja melakukan pengalihan secara liar. Karena saat upaya tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan penggalan



sebatas kabarnya angin saja, sehingga batu terus menerus menumpuk dipinggir jalan untuk dijual. (Wawancara, Juni 2017)

Dari hasil wawancara tersebut hilangnya keaslian dan keunik bebatuan perlu pengelolaan secara serius hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Merpak (Kd.42 thn) dan Kepala Desa Kebung (Dm. 45 thn), bahwa;

Belum ada keseriusan pemerintah dalam mengelola Kawasan TWABK, Saya lihat ada teguran jika ada pelanggaran atau pengerusakan serta penebangan namun hanya sewaktu waktu saja tapi tidak ada tindak lanjut.sebaiknya melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan kawasan sehingga pihak ketiga akan berinvestasi dan melakukan pembangunan dengan lebih baik. (Wawancara, Juni 2017)

Dari pernyataan kedua Kepala Desa tersebut bahwa perlu perhatian secara serius terhadap Kawasan TWABK terhadap pelesatrian kawasan, banyak terjadi pelanggaran namun pelaku pengerusakan terus saja berlangsung, bahkan telah menimbulkan korban nyawa. Misalnya yang terjadi korban nyawa pada tanggal 20 Nopember 2017 sebagai bukti masih terjadi pengerusakan secara berkelanjutan, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar: 5.7 **Penggalian Liar di Kawasan TWABK mengakibatkan Korban**
Sumber: Koran Harian Kapuas Post Kalbar,29 Nopember 2017.

Berdasarkan gambar 5.7 bahwa kejadian tersebut jika dilihat dari implementasi Perda Bab (V) Pembina Pasal (32) bahwa: ayat (1) Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mengwujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan objek dan daya tarik wisata. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan



kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemilikan kawasan pariwisata.

5.2 Faktor Pendukung dan Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Kepariwisataannya implementasinya ada berbagai faktor yang mempengaruhinya baik sebagai faktor pendukung maupun sekaligus sebagai faktor penghambat. Berikut ini disampaikan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang kepariwisataan dalam pelaksanaan di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam berdasarkan hasil penelitian lapangan.

5.2.1 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Kepariwisataannya

5.2.1.1 Kearifan Lokal

Pelestarian di Kawasan TWBKA, melalui pemerintah daerah yang diturunkan pada instansi teknis untuk meningkatkan kualitas kepariwisataannya masyarakat lokal sangat memberi kontribusi. Kontribusi yang diberikan dalam bentuk tradisi dari pola kehidupan masyarakat setempat. Keunikan tradisional masyarakat dalam bentuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan alam yang dilakukan dengan cara adat-istiadat. Tradisional adat istiadat yakni dengan acara ritual adat mendukung pelestarian alam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Dewan Adat Dayak Desa (Bb.50 Thn) bahwa;

masyarakat dayak beranggapan bahwa tanah dan alam beserta isinya adalah milik Puyang Gana (pencipta) sehingga apapun yang dilakukan yang berhubungan dengan alam manusia wajib meminta, menghormati dan menjaga ciptaannya. (Wawancara, Juni 2017).

Dari petikan wawancara tersebut diatas bahwa masyarakat di kawasan sangat menghargai kehidupan alam dan lingkungan secara turun temurun sehingga pelestarian dapat dijaga dengan cara adat tradisi yang melekat pada kehidupan



mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Temenggung Adat Dayak Kelam Permai (Yk.61thn) bahwa;

Kami sebagai masyarakat dayak telah sangat menyatu dengan alam masyarakat kami sudah ada secara turun temurun, melakukan cara dengan menggunakan hak adat dan kebiasaan seperti rumah betang, berladang, bertanam tumbuh dan yang berhubungan dengan sesajin terhadap penguasa alam sebagai tata kerama dalam kehidupan adat. Menyatunya dengan telah menjadi semboyan masyarakat yakni "BETUNGKAT KE ADAT BASA BEPEGAI KE PENGATUR PEKARA" (Wawancara, Juni 2017)

Dari pernyataan Temenggung Adat Dayak Desa Kecamatan Kelam Permai Tersebut bahwa pola kehidupan tradisonal sangat melekat dalam kehidupan masyarakat dikawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Berdasarkan hasil wawancara dengan (Ny. 60 Thn) bahwa;

Dalam hal ini karena tanah dan tanam tumbuh dilindungi dengan adat maka jelas secara adat siapa yang melakukan pengerusakan, menebang dan siapa yang berladang dalam wilayah milik orang lain akan dikenai sanksi adat. (Wawancara, Juni 2017)

Pernyataan diatas menegaskan bahwa masyarakat kawasan tidaklah bebas untuk melakukan aktifitas terhadap lingkungan secara tidak bertanggungjawab dan jika ada yang melakukan tentu akan dikenakan sanksi adat oleh lembaga adat.

Sanksi adat merupakan upaya penegakan hukum adat kampung yang berlaku pada masyarakat. Hal ini sebagai tatanan kehidupan sosial yang masih turun temurun bagi masyarakat dayak Kecamatan Kelam Permai khususnya pada Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Pola kehidupan tradisional ini sangat membantu dalam pelestarian dan sekaligus sebagai daya tarik wisata untuk Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Temenggung Adat Dayak Kelam permai, (Yk.61 thn) bahwa;

Masyarakat masih tetap menjaga pola tradisi lama seperti Temawai (Tembawang), Gupung (bekas Perkampungan lama yang sudah ditumbuhi tanaman buah) Tanah Mali, Rimbak Mali, Rimbak Adat, Kayu Mali/kayu yang di sakralkan. (Wawancara, Juni 2017)

Dari pernyataan diatas bahwa cara tradisional yang dilakukan masih sangat menjaga kelestarian untuk keberlangsungan hidup dikawasan sehingga dapat



memberi kontribusi keindahan dan kerindangan pada kawasan Taman Wisata Bukit Kelam. Tradisi lama yang dipertahankan masyarakat tidak hanya dalam hal hubungan manusia dengan kehidupan lingkungan akan tetapi bahasa dan tradisi budaya juga masih melekat secara turun temurun pada masyarakat Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Anggota Dewan Adat Dayak Desa (B.50 Thn) bahwa;

Masyarakat masih sangat tunduk pada alam sehingga dalam melakukan aktivitas yang berhubungan alam baik penggalian, pembukaan lahan dan penebangan masih menggunakan atau dilakukan dengan prosesi adat sebagai ungkapan meminta petunjuk dan permissi kepada alam. Prosesi adat kami melakukan penebasan atau pembukaan lahan untuk ladang atau perkebunan menggunakan adat sengkelan Tanah. (Wawancara, Juni 2017)

Dari pernyataan diatas bahwa pelestarian lingkungan dengan menggunakan tradisi lama yang masih berlanjut sampai sekarang bentuk kepedulian yang telah melekat dan di jaga secara turun temurun.

Prosesi adat *Sengkelan Tanah* yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk permohonan izin untuk melakukan pembukaan lahan. Pelestarian lingkungan masyarakat dayak desa masih banyak sekali larangan-larangan pengerusakan terhadap tanah (bumi) maupun lingkungan. Jika larangan-larangan tersebut di langgar maka sanksi adat akan dikenakan. Berdasarkan wawancara dengan Temenggung Adat Dayak kelam Permai (Yk.61 Thn) bahwa;

Larangan-larangan yang berhubungan dengan pola pelestarian lingkungan yakni sebagai berikut; (1) Larangan Menebang/Mencuri Pohon di Hutan baik dikawasan adat maupun kawasan milik orang lain, (2) Larangan Mengambil atau Membunuh Satwa baik dikawasan Hutan adat maupun Hutan Milik Pemerintah, (3) Larangan Membuka lahan Untuk Berladang di kawasan yang di anggap kramat (hutan mali dan tanah mali) atau bernilai sejarah (asal usul). (Wawancara, Juni 2017)

Dari pernyataan diatas jelas bahwa Berbagai adat dan tradisi masyarakat yang berhubungan dengan pelestarian dan sekaligus menjadi daya tarik wisata pada Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Kepercayaan lama bagi masyarakat memberi kontribusi bagi mendukung pelestarian, yang mana masyarakat masih percaya dengan mitos bahwa tempat-tempat yang dianggap keramat yakni masih



ada kayu tertentu yang menjadi tempat tinggal makhluk halus (*Kayu mali*) dan tanah yang tidak boleh ladang bahkan tidak dilalui/dilewat (*Tanah Mali*), batu yang tidak boleh disentuh (*Batu mali*), serta ada danau atau air yang tidak boleh dimandi dan didekati (*Lepung Mali*). Masyarakat beranggapan hal-hal seperti itu merupakan rumah atau tempat tinggalnya makhluk halus. Oleh karena itu jika barang siapa bagi masyarakat yang melanggar akan mendapatkan malapetaka. Berdasarkan hasil wawancara dengan (Yk) 61 Th bahwa;

Sehubungan dengan kebijakan dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah masyarakat harus diberi pemahaman namun dengan demikian kesadaran adat masyarakat juga masih ada, karena secara adat juga tidak boleh melakukan penebangan sembarangan di kawasan adat. Dan jika terjadi juga dikawasan orang lain juga di beri sanksi adat berdasar aturan adat yang berlaku. (Wawancara, Juni 2017)

Dari pernyataan tersebut bahwa hukum adat masih tetap berlaku kepada siapa saja yang melakukan pengerusakan lingkungan, hal ini adalah sebagai bentuk dukungan untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan yang secara turun temurun secara adat. Jika ada masyarakat yang melakukan pengerusakan oleh Dewan Adat Dayak yang berada di Kecamatan Kelam Permai maka akan di hukum adat pencurian. hukum adat diberikan kepada masyarakat yang melanggar dalam bentuk sanksi adat baik secara material maupun juga yang bersangkutan merasa malu jika dirinya di hukum adat oleh Dewan Adat Dayak. Hasil observasi peneliti bahwa; Sanksi adat yang diberikan jika masyarakat melakukan pelanggaran dalam bentuk mencuri dan merusak dikawasan yang bukan menjadi haknya yakni Sanksi Adat Kesupan Kampung dan Sanksi Adat Salah Basa.

Hukum Adat Kesupan kampung ini merupakan sanksi adat yang diberikan kepada masyarakat yang telah melanggar peraturan adat kampung, kepada yang melakukan pelanggaran di beri sanksi adat sebanyak 20 Rial (1 Rial identik dengan Tiga Puluh Ribu Rupiah(Rp. 30.000,-)) sedangkan Hukum Adat Salah Basa yakni sanksi adat yang diberikan kepada pelaku sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain, kepada yang bersangkutan disanksi bangku adat sebesar 20 Rial sebagai



dasar hukum serta bagi pelaku juga dikenai sanksi batang adat. Sanksi batang adat ini pelaku harus menyediakan; (1) Satu ekor Ayam, (2) Semangkok Beras, (3) 1 Renti Babi (kurang lebih beratnya 25 Kg), (4) Sebatang besi, cukup di identikan dengan 1 paku diletakan di atas mangkok beras, (5) 6 Botol tuak. (Dok. Buku Hukum Adat Dayak Desa Ketemenggungan Sintang). Pernyataan diatas bahwa sanksi adat bagi masyarakat yang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan untuk dapat memberi efek takut dan jera untuk berlakukan semena-mena terhadap tumbuhan-tumbuhan dan binatang atau satwa serta air.

5.2.1.2 Koordinasi

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah sangat perlu dilakukan koordinasi, untuk dapat dipahami secara bersama oleh semua komponen yang bersinggungan dengan kebijakan tersebut. Dengan melakukan koordinasi dan mendapat pemahaman bersama akan lebih mudah untuk dapat menentukan sikap dari sebuah institusi, hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Disporaparekraf (H. 52 thn) bahwa;

Institusi kami dalam menjalankan kewenangannya terhadap implementasi Perda kepariwisataan di Kawasan TWABK melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder. (Wawancara, Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa koordinasi telah dilakukan kepada pihak-pihak yang bersinggungan terhadap implementasi peraturan Daerah Kabupaten Sintang. Koordinasi mengimplementasi peraturan daerah kepada relasi kerja (*stakeholder*) untuk pengembangan Kepariwisataan untuk menghindari munculnya masalah-masalah yang berhubungan dengan seluruh komponen yang ada di Kawasan TWABK, hasil wawancara dengan Sekretaris Disporaparekraf (Er. 51 thn) yakni;

Sejak di tetapkan sebagai kawasan konservasi, semua yang ada didalam kawasan jalan lingkaran (TWABK) tersebut adalah merupakan kawasan yang tidak boleh dilakukan penebangan dan pengerusakan oleh siapapun. Apalagi sekarang BKSDA telah melakukan penataan blok di kawasan tersebut. (Wawancara, Oktober 2017)



Dari hasil petikan wawancara tersebut sangat penting untuk menjalin relasi kepada seluruh *stakeholder* dalam mengimplementasi kebijakan keparwisataaan.

Adapun *Stakeholder* dalam implementasi Kebijakan Kepariwisataaan di Kawasan TWABK oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5. **Mitra Kerja (Stakeholder) Disporaparekrif dalam mengimple mentasikan Kepariwisataaan di Kawasan TWABK.**

No	Mitra Kerja /Stakeholder	Keterlibatan dalam Implementasi Kebijakan
1.	BKSDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku Kawasan 2. Merencanakan dan Pengelolaan Tata Blok kawasan. 3. Regulasi pengelolaan kawasan 4. Perlindungan, pengamanan tamanan dan satwa
2.	Dinas PUPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses menuju kawasan 2. Jalan dan Jembatan
3.	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadah Untuk berjualan 2. Pembinaan Jasa Penjuala Sovenir
4.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestari 2. Mutu Lingkungan
5.	UPT Kehutanan Wilayah Utara Kalbar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Satwa 2. pengamanan kawasan 3. Pembinaan masyarakat Kawasan
6	Kepolisian Sektor Kelam Permai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dan Kenyaman kawasan 2. Sengketa lingkungan 3. Sengketa sosial
7	Camat Kelam Permai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan wilayah 2. memfasiliatsi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan 3. Penyedia Data Administasi pemerintah
8	Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Aparatur Pada Level Dasar di Kawasan 2. Aparatur yang bertempat tingga di kawasan 3. Penyedia Data Administasi pemerintah
9	Masyarakat Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduk yang menerima dampak kebijakan 2. Penduduk yang beraktivitasi di kawasan
10	Perguruan Tinggi/Akademisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi banding 2. Penelitian 3. Pengembangan ilmu pengetahuan
11	Pengunjung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai Pengguna atau konsumen 2. Penikmat Keunikan dan Keindahan Kawasan
12	Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investor (Investasi Komersil) 2. Pengguna peluang Jasa pariwisata
13	LSM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerhati. 2. mediator dan katalisator (pengerak) 3. Penyelenggaraan pentas musik (Impresaria)
14	Lembaga Adat,Dewan Adat (Ketemenggunaan Adat Dayak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kearifan lokal 2. Menjaga tatanan sosial 3. Upacara Adat dan tradisi pelestarian lingkungan 4. Petunjukan Aktraski Kesenian daerah

Sumber: Hasil wawancara dan Observasi yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 5.5 bahwa *Stakeholder*/Mitra Kerja Disporaparekrif dalam mengimplementasikan Kepariwisataaan di Kawasan TWABK yakni (1) BKSDA yang berperan sebagai pemangku kepentingan penguasaan wilayah konservasi Bukit



Kelam, Bukit Luit dan Bukit Rentap, (2) Dinas PUPR sebagai penyedia akses menuju kawasan, (3) Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM sangat peran memberi daya dukung melalui Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti Pembinaan Koperasi terutama Para Pengerajin Candra Mata dan Souvenir, (4) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pengendalian mutu lingkungan dan pelestarian, (5) UPT Kehutanan Wilayah Utara Kalbar sebagai perlindungan satwa, pengamanan kawasan dari gejala bencana (Kebakaran, Penebangan, dll) serta pembinaan terhadap masyarakat dalam dan sekitar kawasan, (6) Kepolisian Sektor Kelam Permai memberi perlindungan kepada masyarakat yang berada di kawasan, (7) Camat Kelam Permai sebagai Kepala Administrasi wilayah, (8) Kepala Desa Pelaksana Administrasi Pemerintah yang terendah yang berada di kawasan, (9) Masyarakat Kawasan adalah Kelompok Masyarakat yang terdampak dari kebijakan, (10) Akademisi adalah yang berkepentingan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, (11) Pengunjung yakni sebagai pengguna dari keindahan dan keunikan dari kawasan TWABK, (12) swasta adalah pihak investor yang bisa memanfaatkan jasa kepariwisataan seperti; a) Warung/Restoran, b) Jasa travel, c) transportasi wisata, d) Penyedia/Penjual Souvenir, e) Hotel dan Penginapan. (13) LSM keberadaannya sebagai pemerhati, mediasi, katalisator dan penyelenggara pentas musik (*imprensaria*). (14) Lembaga Adat, Dewan Adat (Ketemenggungan Adat Dayak) yang memiliki kearifan lokal secara turun temurun, penjaga kelestarian dengan kecerdasan lokal, mengatur tatanan kehidupan sosial di kawasan TWABK serta menyelenggarakan petunjuk kesenian daerah (sanggar Tari).

5.2.1.3 Komitmen Pejabat

TWABK sebagai potensi daya tarik pariwisata yang dapat diandalkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Potensi daya tarik kawasan menambah keunikan tersendiri. Dengan keunikan-keunikan yang ada tersebut Disporaparekras membangun fasilitas kepariwisataan sebagai daya dukung memberi kenyamanan kepada



pengunjung, hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Kepala Disporaparekraf (H. 52 thn) bahwa;

infrastruktur dasar kepariwisataan telah di bangun dikawasan-kawasan objek wisata di kawasan tersebut, sebagai menunjang kenyamanan dan daya tarik pariwisata. (Wawancara, Nopember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Disporaparekraf selalu berkomitmen untuk dapat mengimplementasi kebijakan di kawasan TWABK, komitmen/keseriusan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Disporaparekraf (Er.51 thn) menyatakan bahwa:

tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan kepariwisataan adalah komitmen pemerintah dalam melakukan perencanaan, pembangunan di kawasan, dan anggaran yang ditetapkan pemerintah adalah salah satu hal juga menjadi kendala dalam melakukan proses pembangunan kepariwisataan. (Wawancara, Oktober 2017).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan TWABK sudah menjadi bagian tugas pokok dan fungsi Disporaparekraf. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kraetif. Mengacu pada Peraturan Bupati tersebut maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) yakni Rencana Kerja Disporaparekraf. RENJA merupakan dokumen perencanaan kerja yang disusun untuk satu tahun, yang memuat program kerja tahunan, merupakan *break down* dari Rencana Stragis (RENTRA).

Komitmen pejabat sebagai implementor dari perda kepariwisataan dalam merialisasikan Visi dan Misinya Disporaparekraf membuat tujuan dan sasaran kerja dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan dan dan sasarkan kerja ini dibuat dalam jangka 5 tahun kerja yang didasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah tertuang dalam visi dan misi. Dengan merujuk pada visi dan misi tujuan sasarkan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6. **Indikator Tujuan dan Sasaran Kerja Disporaparekraf 2015-2021**

No	Tujuan	Sasaran Kerja
1	Pengembangan Daya Tarik Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan data best daya tarik wisata dalam bentuk audio visual 2. Forum Komikasi (FOKKOM) pengembangan destinasi pariwisata. 3. Pengembangan fasilitas di objek dan daya tarik pariwisata unggulan. 4. Review desain penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah. 5. Penataan kawasan objek wisata yang ada di Kabupaten Sintang
2	Pengembangan Usaha Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Sertifikasi tenaga usaha pariwisata 2. Klasifikasi halal 3. Lomba toilet Bersih diusaha rumah makan 4. Lomba Foto daya tarik wisata
3	Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan masyarakat sadar wisata 2. Pelaksanaan aksi Sapta pesona Pariwisata 3. Pengembangan destinasi pariwisata
4	Promosi dan Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran potensi pariwisata 2. Paket khusus pesona budaya Sintang di TMII 3. Pengembangan Kesenian dan Budaya 4. Pameran dalam rangka Rakon WTW se-Kalimantan 5. Event-event promosi pariwisata luar Propinsi Kalbar 6. Pengadaan bahan promosi pariwisata 7. Pengadaan VCD Objek daerah tujuan wisata Kabupaten Sintang 8. Pembuatan sarana dan prasarana pendukung promosi pariwisata Kabupaten Sintang 9. Pembuatan profil pariwisata Kabupaten sintang
5	Analisis Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghimpunan Data Wisatawan 2. Survei Pasar Pariwisata 3. Pengolahan data pariwisata
6	Kerjasama Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi pariwisata dalam rangka kerja sama Sosek Malindo. 2. Rapat Koordinasi teknis (RAKORNIS) perencanaan bidang pariwisata.
7	Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Putra-Putri Pariwisata Kabupaten Sintang 2. Fasilitas pertemuan duta wisata tingkat propinsi Kalbar 3. Fasilitas hasil pemilihan putra-putri pariwisata tingkat provinsi 4. Gelar budaya terpadu Kabupaten Sintang 5. Pelatihan sumber daya manusia pelaku dan pengiat bidang pariwisata
8	Pengembangan Sistem Informasi pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas petugas media informasi pariwisata 2. Informasi Pesona pariwisata Kabupten Sintang di media cetak 3. pengembangan wawasan pariwisata 4. Sosialisasi dan Fasilitasi HKI
10	Pengembangan Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2. Pemantapan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 3. pengembangan daerah tujuan wisata

Sumber: Dok. Restra Disporparekraf. 2018

Berdasarkan tabel 5.6 bahwa tujuan merupakan penjabaran program kebijakan dalam bentuk yang berisikan satu atau lebih kegiatan sedangkan sasaran kerja adalah kegiatan yang merupakan bagian dari satu kesatuan bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Sehubungan dengan komitmen pemerintah masyarakat kawasan TWABK sangat mendukung program Disporaparekraf dalam mengimplementasi kebijakan kepariwisataan, masyarakat berharap pengembangan kepariwisataan dapat memberi kontribusi kepada masyarakat yang berada di kawasan hal ini sesuai dengan masyarakat di kawasan TWABK (Hm.32 thn) bahwa,



Implementasi kebijakan kepariwisataan yang dituangkan dalam bentuk Perda harus mampu memberi kontribusi bagi masyarakat setempat, karena pengembangan yang telah dilaku pada objek wisata bukit kelam sangat seadanya dan perumahan tempat istirahat yang semi permanen sehingga belum mendatangkan kontribusi yang maksimal bagi masyarakat sekitar. (wawancara, Desember 2017)

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa Pejabat pelaksana teknis sebagai implementor harus memiliki komitmen nyata dalam pengembangan kepariwisataan di kawasan TWABK, komitmen nyata yang harus dilakukan adalah dengan dapat merealisasikan program yang tepat sasaran yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Pembangunan nyata yang telah dilakukan untuk sarana publik penunjang kepariwisataan antara lain; Kolam Renang, namun kondisi sekarang sangat tidak terawat dan tidak bisa difungsikan dan ini terkendala dana pemeliharaan yg tidak ada, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.8. **Sarana dan Prasarana Penunjang Kepariwisata di kawasan TWABK**

Sumber: Dok. Disporaparekrif.

Gambar 5.8. gambar diatas menunjukan pemanfaat dan pemeliharaan fasilitas kepariwisataan yang kurang dilakukan, menyebabkan tidak dapat difungsikan secara baik, dari aspek keindahan, kebersihan dan kenyamanan.

5.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Taman Wisata Alam Bukit Kelam

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat mendeskripsikan beberapa faktor penghambat, sebagaimana disajikan dibawah ini yakni;



5.2.2.1 Sengketa Tata Batas

Masalah tata batas sejak di tetapkan sebagai kawasan Taman Wisata Alam tahun 1992 terus menjadi perdebatan yang ada di dalam masyarakat kawasan lingkaran kelam dan penduduk tidak mengetahui bahwa kawasan mereka menjadi kawasan taman wisata alam. Namun pembangunan berupa sarana dan prasana pariwisata telah dibangun sejak lama dilakukan seperti tangga menuju puncak, telapak jalan menuju tangga, jalan rabat beton menuju air terjun yang telah beberapa kali diperbaharui atau perbaikan, serta beberapa tahun yang lalu (10) dibangunlah *resk area*, membangun kolam renang, taman-taman, serta membangun gedung serba guna. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelapa Disporaparekraf (H.52 Thn) bahwa;

pembangunan ini semua dilaksanakan sebelum kita menjalin komunikasi dengan BKSDA, namun pada tahun 2016 BKSDA melaporkan kepada kami bahwa kami tidak boleh melakukan aktifitas sebelum adanya PKS (Perjanjian Kerja sama). Selanjutnya diungkapkan PKS dengan BKSDA yang rencanakan akan di tandatangani pada tahun 2018.(wawancara, Februari 2018)

Isi perjanjian PKS yakni apa saja yang dikelola pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah selama 5 tahun dan setelah selesai akan diperpanjang, sehingga Pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun dan dipelihara. Selanjutnya Kelapa Disporaparekraf (H.52 Thn) mengatakan bahwa;

jadi yang sudah menjadi program kami tetap kami laksanakan karena bagi saya bukan keterlanjuran walau mereka menganggap itu merupakan keterlanjuran. Justu saya pikir itu keterlambatan mereka mengelola menangani sehingga pemerintah daerah melakukan pengembangan kepariwisataan untuk memanfaatkan potensi dan pemeliharaan yang ada karena bagian dari hidup juga masyarakat setempat yang berkaitan pembenahan sarana dan prasarana di Bukit Kelam kawasan itu agak bersih.(wawancara, Februari 2018)

Sehubungan dengan ditetapkan sebagai kawasan konservasi bahwa kawasan konservasi tidak boleh dirusak, dilain pihak masyarakat adalah secara turun temurun telah memiliki kedaulatan hukum adat yang mengatur tatanan kehidupan sosial mereka sehingga mereka telah lama memiliki kedaulatan mendiami kawasan



tersebut, sehingga mereka merasa perlu dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidupan dan kepariwisataan di kawasan.

Keinginan masyarakat yang merasa berdaulat menginginkan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan, karena secara turun mereka merasa bahwa kawasan tersebut telah mereka jaga dan merupakan tempat tinggal mereka. Akan tetapi dengan adanya peraturan pemerintah atau undang-undang, masyarakat setempat yang pada dasarnya telah melakukan sejak belum ditetapkan kawasan berdasarkan undang-undang. Hal ini bagi mereka adalah suatu bentuk pembodohan dan tidak menghargai tatanan sosial kehidupan masyarakat yang mana pada dasarnya bahwa tradisi yang mereka lakukan selama ini adalah sama seperti yang diamanatkan peraturan tersebut.

Implementasi kebijakan kawasan wisata bukit kelam masih ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan, seperti tapal batas kawasan, Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kebong (Dm.42 th) mengatakan:

Kami menginginkan batas harus jelas, setelah menetapkan kawasan konservasi sejak 1992, ada perintisan tapal batas kembali pada tahun 1997 yakni antara hutan konservasi dengan hutan masyarakat, bahkan perintisan itu sangat-sangat baik melibatkan semua komponen masyarakat, setelah dilakukan perintisan jalan setapak, selanjutnya pihak pemerintah tidak setuju dan mengatakan bukan dari yang dirintis tersebut batas dari batas tersebut. Sejak itu tidak pernah ada kejelasan tentang tapal batas hingga sekarang.(wawancara, Juni 2017)

Selanjutnya menurut Anggota Dewan Adat Dayak Desa Kecamatan Kelam Permai (Ny.65 Thn) menyatakan bahwa:

Sebenarnya pak permasalahan dari aspek adat tentang kawasan sudah lama masyarakat meminta atau menginginkan batas-batas kawasan konservasi dimulai dari hak taman tumbuh masyarakat sejak dari dulu. Sehubungan hal ini sampai sekarang pun belum terjawab, pada tahun 1990 ada patok putih yang ditanap di pinggir jalan, hal ini terpertanyakan oleh masyarakat. Karena bersama dengan hal tersebut ada himbau bahwa kawasan ini tidak boleh ditebang, tidak boleh diladang, namun demikian masyarakat tetap sadar dengan kondisi itu karena pola hidup masyarakat disini juga selalu melindungi dan menjauhi pengerusakan hutan dikarena adat dan tradisi kehidupan kami yang masih terpelihara hingga sekarang.(wawancara, Juni 2017)

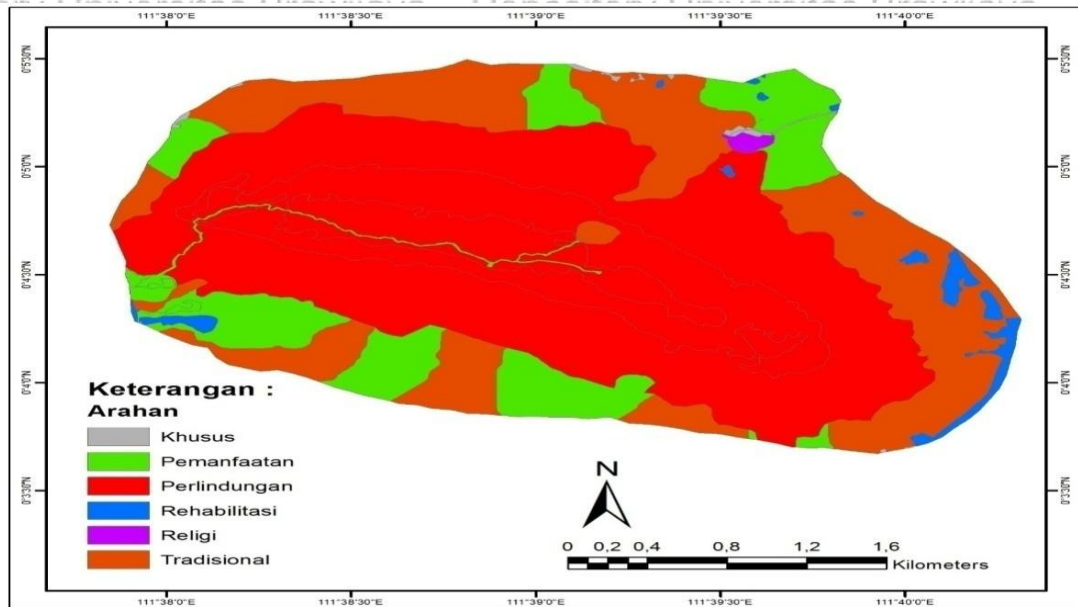


Berdasarkan petikan hasil wawancara peneliti tersebut kawasan lingkaran kelam bahwa pengukuran tata batas baru dilaksanakan pada sekitar tahun 1998 dan tata batas kawasan adalah pada tanam tumbuh milik masyarakat. Selanjutnya sehubungan dengan permasalahan dengan penetapan tata batas kondisi sekarang yang masyarakat ketahui adalah mengikuti poros jalan lingkaran kelam. Akan tetapi sekarang terus menjadi polemik tentang tata batas yang menurut masyarakat bahwa tata batas belum tuntas atau tidak ada kesepakatan bersama hingga sekarang. Akan tetapi tapal batas wilayah tetap menjadi harapan yang harus diselesaikan bersama masyarakat.

Sehubungan dengan penetapan tata batas yang terus menjadi polemik maka BKSDA Wilayah II Sintang telah melakukan menata kembali. Penataan blok bertujuan menyamakan persepsi dalam masyarakat kawasan serta untuk dapat membangun harmonisasi fungsi kawasan. Berdasarkan studi dokumentasi yang bersumber dari BKSDA wilayah II Sintang bahwa prinsip pendekatan didalam penetapan Blok TWA Bukit Kelam ditentukan berdasarkan pada tiga pertimbangan utama yakni: (1) potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (2) tingkat interaksi dengan masyarakat setempat; (3) kepentingan efektifitas pengelolaan kawasan TWA Bukit Kelam yang harus dilakukan. Selain dari tiga prinsip dasar tersebut, didalam penetapan blok tersebut juga harus mempertimbangkan 3 hal penting yang terkait dengan penentuan atau pembagian blok, yaitu: (a) jenis blok yang dibutuhkan; (b) luas masing-masing blok; dan (c) letak/lokasi blok. Untuk dapat merumuskan hal tersebut, maka pengkajian dan pemahaman terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem kawasan taman wisata alam dengan seluruh unsur yang ada didalamnya mutlak diperlukan.

Penyelesaian sengketa tata batas dengan masyarakat belum menemukan titik terang didalam kawasan akan tetapi dasar yang digunakan oleh pemerintah dalam penentuan penataan blok kawasan yakni Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.76/Menlhk-

Setjen/2015 tentang kriteria zona pengelolaan taman nasional dan blok pengelolaan cagar alam, suaka marga satwa, taman hutan raya dan taman wisata alam, telah dibuat pembagian blok pengelolaan untuk taman wisata alam. Pembagian blok dapat dilihat pada gambar/peta blok berikut:



Gambar 5.9 Peta Pembagian Blok kawasan Konservasi TWABK

Sumber: BKSDA Wilayah II Sintang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tersebut dalam penataan blok konservasi kawas terbagi atas; 1) Blok Perlindungan dengan luas 650,75 Ha. 2) Blok Pemanfaatan dengan luas 157,65 Ha. 3) Blok Rehabilitasi dengan luas 20,56 Ha. 4) Blok Religi dengan luas 2,99 Ha. 5) Blok Tradisional dengan luas 292,37 Ha. 6) Blok Khusus dengan luas 3,10 Ha.

5.2.2.2 Kesadaran Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Sintang merasa sintang adalah miliknya sejak kabupaten sintang berdiri sehingga penggelolaan bukit kelam ini juga sudah menyentuh masyarakat sejak lama dikelola secara tradisional yakni dengan memanfaatkan air dan tanam-tanaman serta ekosistem yang ada didalam, ini



merupakan bagian dari hidup daripada masyarakat Kecamatan Kelam permai sejak jaman dahulu.

Kemudian perkembangan jaman bahwa pada akhirnya pemerintah pusat menetapkan bahwa Bukit Kelam adalah wilayah konservasi alam, sehingga sudah ada pengelolaan sudah adanya aktivitas masyarakat baru adanya aturan, tentu saja pengelolaan pembenahan terjadi setelah aturan ditetapkan kemudian keluaran aturan-aturan yang ditetapkan oleh perintah pusat mungkin hanya sebatas asumsi pemerintah pusat tetapi belum terjalinan komunikasi karena bukit kelam itu sendiri belum tersentuh oleh KSDA itu sendiri.

Kesadaran masyarakat tidak bisa muncul begitu saja jika tidak ada yang mendorong mereka, peran Diporaparekraf dalam merubah dan mengirim pola berpikir mereka bahwa mereka mengetahui mereka berada dikawasan TWA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelapa Disporaparkraf (H. 52Thn) mengatakan bahwa;

Berkaitan dengan kesadaran masyarakat kami bersama dengan BKSDA akan berkerja sama melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, kami ada pembuat program Bina Kawasan Bukit Kelam (BKBK), dan akan kami masukan dalam program RKA (Rencana Kerja Anggaran) pada tahun anggaran 2018 ini, salah satu program adalah sosialisasi pembinaan untuk mencintai kawasan bukit kelam sebagai kawasan wisata kita. (wawancara, Februari 2018)

Harapannya keberhasilan Program BKBK ini bertujuan agar mereka tidak sembarang membuang sampah, tidak merusak fasilitas yang ada didalam kawasan, memberi pemahaman agar mereka bisa juga ambil bagian dalam rangka peningkatan ekonomi, misal dengan menjual alat-alat/kerajinan yang berada dalam kawasan TWABK. Arah yang kearifan lokal merupakan salah satu prgram yang akan dilaksanakan oleh Disporaparekraf.

Pembinaan masyarakat kawasan untuk dapat memahami rasa kesadaran masih harus dilakukan, hal ini yang diungkapkan oleh Sekretaris Disporaparekraf (E.51Th) menyatakan bahwa:

Belum ada kelompok sadar wisata, masyarakat dikawasan belum memiliki kesadaran wisata, kita (disporaparekraf) tahun depan akan merencana membentuk kelompok-kelompok sadar wisata, kita akan terus melakukan



pembinaan terhadap kepariwisataan kepada masyarakat setempat, pada saat ini kami hanya melaksanakan program pimpinan dan perencanaan tahun yang lalu. Kunci suksesnya kawasan wisata adalah masyarakat setempat. Kita melakukan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan taman wisata bukit kelam untuk kepentingan semua kita ingin ada multi player effect bagi masyarakat setempat. Sehingga anggapan masyarakat kawasan "pemerintah datang kesini mengambil hasil akan tetapi kami dapat apa" dapat kita tepis.(wawancara Oktober 2017)

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa kesadaran masyarakat perlu dibangun dari semua komponen yang berkepentingan dalam kawasan TWABK, kesadaran masyarakat ini sangat penting karena mereka hidup dalam kawasan Konservasi Taman Wisata Alam yang merupakan daerah yang menjadi perlindungan terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut dipertegas lagi oleh Sekretaris Disporaparekraf (Er.51Th) mengatakan bahwa;

menjalankan tugas pokok dan fungsi banyak permasalahan yang ada dikawasan, sejak di tetapkan sebagai kawasan konservasi BKSDA masyarakat sudah melarang untuk melakukan aktivitas apapun di kawasan bukit kelam, di karenakan Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak mempunyai MOU dengan ke dengan pengelolaan kawasan sementara perda retribusi sudah ada, Target yang harus dicapai sudah ada sehingga Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus melakukan rencana dan pengembangan pembangunan bidang kepariwisataan (wawancara Oktober 2017)

Kesadaran terhadap kawasan menjadi sangat penting sehingga dibutuhkan pengawasan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelestarian kawasan, tidak ada pengawasan secara rutin seperti yang disampaikan oleh masyarakat dalam Kawasan TWABK (Hm 30 Th) mengatakan bahwa;

Tidak ada pengawasan atau monitoring secara rutin karena fokus pembangunan kepariwisataan kabupaten sintang belum maksimal sehingga pengelolaan dan pemanfaatkan terhadap kawasan wisata bukit kelam hanya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah pada saat hari besar saja serta Tidak ada melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan taman wisata alam bukit kelam bahkan banyak yang membuat perubahan kawasan bukit kelam tidak alami lagi seperti sebelumnya karena banyak pengerusakan hutan dan batu di sekitar dan terkesan adanya pembiaran dari pemerintah daerah itu sendiri. (wawancara Januari, 2018)

Masih lemah kesadaran masyarakat juga di buktikan lingkungan yang tersekan kumuh tidak ada penataan serta petunjuk bagi masyarakat, tong sampah yang tidak tampak, sampah yang berserahkan apalagi pada saat-saat hari libur tahun baru



dan hari besar keagamaan. Selain itu tidak adanya toilet yang layak juga sangat membuat pengunjung tidak nyaman. Seperti yang diungkapkan pengunjung TWABK (Drm 46 Thn) dan (Ls 29Th) mengatakan bahwa;

Sarana dan prasarana yang dibangun dikawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam belum cukup baik, belum ada kenyamanan yang ada cuma sampah yang berserakan. Akses jalan di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam sangat kurang, terutama jalan banyak yang rusak dan berlubang-lubang, kami hanya datang sekali sekali pada saat hari-hari besar dan hari libur saja. (wawancara Oktober, 2018)

Berdasarkan petikan wawancara diatas bahwa kebersihan kawasan sangatlah harus diperhatikan. Kesadaran masyarakat akan kesebersih dikawasan TWABK sangatlah penting, tidak ada kesan semberaut dan kotor. Di dlam kawasan dan yang menjadi objek-objek tujuan pengunjung sarana penunjang kebersihan masih sangat kurang, belum tersedianya kamar mandi, kakus atau wc umum yang memadai, pada hal hal tersebut adalah merupakan hal sangat sangat penting, serta sangat mutlak untuk kenyamanan bagi pengunjung.

Di Kawasan TWABK adanya penghancuran batu-batuan yang besar dan unik yang berada di sekitar rumah, di pecah-pecah oleh sebagian masyarakat beranggapan bahwa itu adalah hak mereka, hasil wawancara dengan masyarakat (My.47 thn) bahwa;

Wajar pengambilan atau pegalian batu, penebangan dan pembukaan lahan oleh penduduk karena secara turun temurun kawasan bukit kelam adalah dibawah penguasaan kami.(Wawancara, September 2017).

Berdasarkan petikan wawancara tersebut masyarakat berpandangan kawasan adalah hak mereka yang dapat mereka olah dan di ambil untuk diperjual belikan. Pandangan atau anggapan mereka bahwa bebatuan yang berada di perkarangan rumah mereka atau berada di lahan pertanian adalah bebas untuk diambil. Serta anggapan ini diperkuat juga bahwa tuntutan ekonomi menjadi pembenaran bagi mereka untuk melakukan pengalihan secara besar-besaran.



5.3 Model Empirik Implementasi Kebijakan Kepariwisata Taman Wisata Alam Bukit Kelam

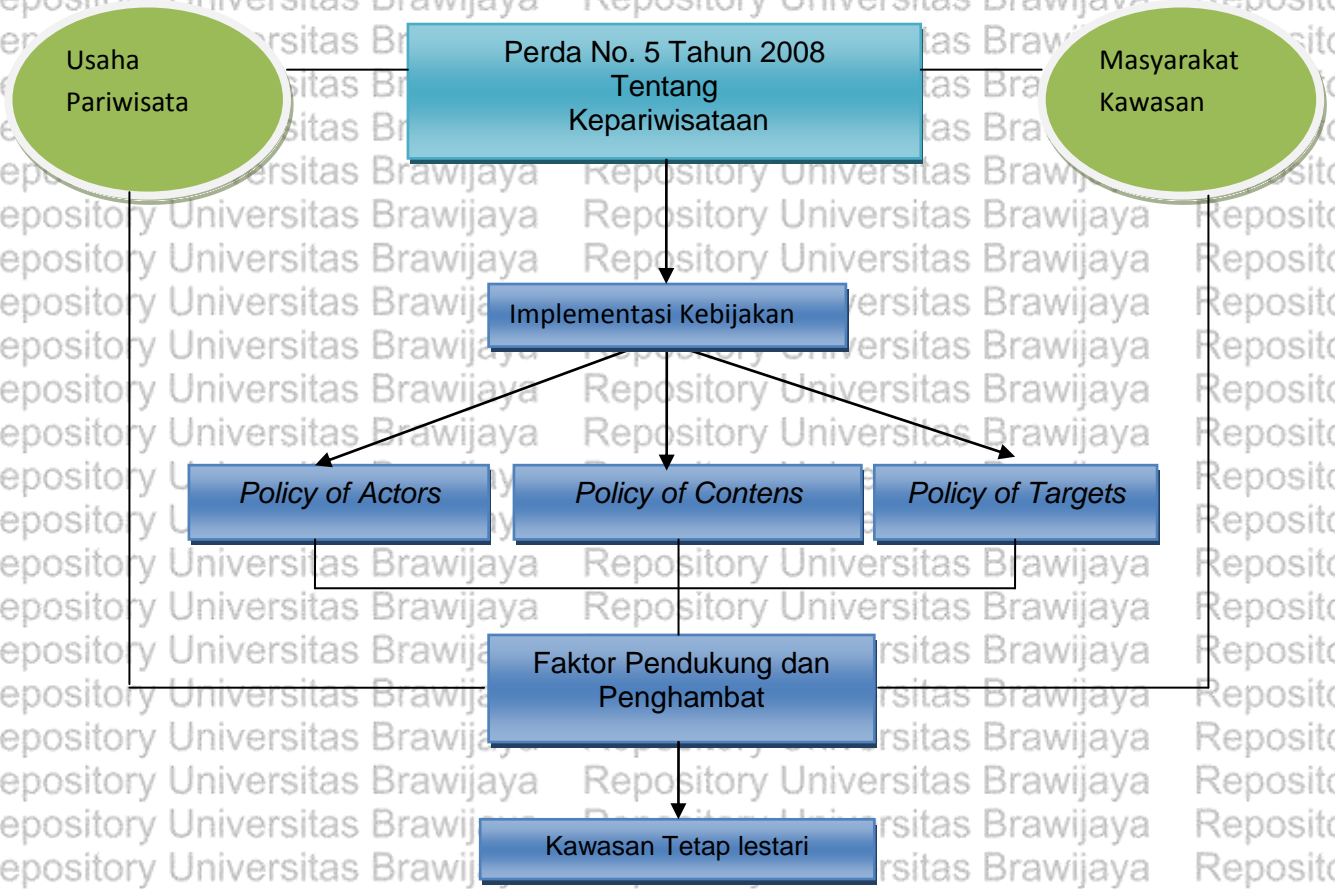
Implementasi kebijakan kepariwisataan secara umum telah diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip: a). menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; b). menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; c). memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; d). memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; e). memberdayakan masyarakat setempat; f). menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; g). mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; h). memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Kepariwisata di Kabupaten Sintang dalam implementasinya menggunakan instrumen kebijakan daerah terutama bagi instansi pelaksana teknis melalui lima aspek, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepemudaan olahraga, kepariwisataan dan ekonomi kreatif guna mendukung sinergisitas pembangunan kepemudaan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif. (2) Terjaganya kelestarian lingkungan, meningkatnya daya tarik wisata, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan serta meningkatnya pendapatan masyarakat. (3) Mengembangkan dunia usaha jasa Pariwisata yang dapat



memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. (4) Meningkatnya Ekonomi Kreatif berbasis Seni Budaya, Media, desain ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersih dan berwibawa. Dengan pelaksanaan kebijakan selama ini sangatlah kaku. Sehingga hanya pelaksanaan program saja di lakukan untuk tercapainya tujuan. Secara diagramatik, model implementasi kebijakan Kepariwisata Kabupaten Sintang sebagaimana disajikan dalam uraian di atas, dapat digambarkan berikut:



Gambar 5.11 Model Empirik Implementasi Kepariwisataaan/Perda Kabupaten Sintang